

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DI  
KABUPATEN SIDOARJO SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN  
ANGKA KEMISKINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Disusun Oleh :**

**IMEYLDA AGDELIA TARORE**

**105030101111102**



**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2015**

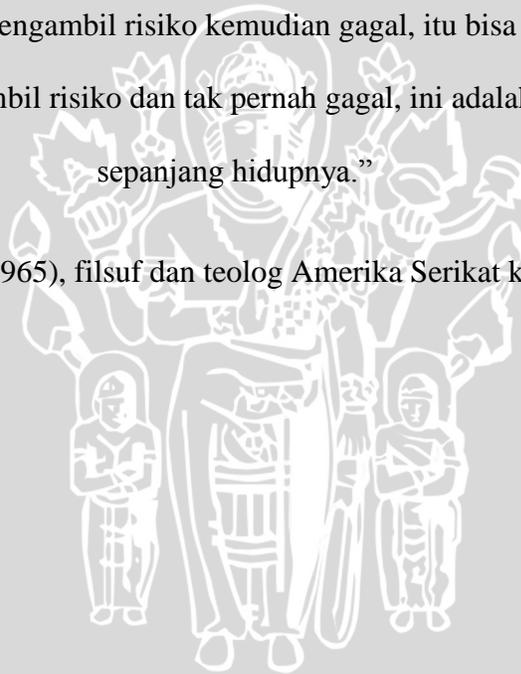
## MOTTO

”Jangan pernah takut pada kesempurnaan karena Anda tidak akan pernah bisa mencapainya.”

Salvador Dalí (1904–1989), pelukis Spanyol

”Mereka yang berani mengambil risiko kemudian gagal, itu bisa dimaafkan. Mereka yang tak pernah mengambil risiko dan tak pernah gagal, ini adalah kesalahan manusia sepanjang hidupnya.”

Paul Tillich (1886-1965), filsuf dan teolog Amerika Serikat kelahiran Jerman



### TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan majelis penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

- Hari : Selasa
- Tanggal : 17 November 2015
- Jam : 08.00
- Skripsi Atas Nama : Imeylda Agdelia Tarore
- Judul : Penanggulangan Kemiskinan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Pengurangan Angka Kemiskinan

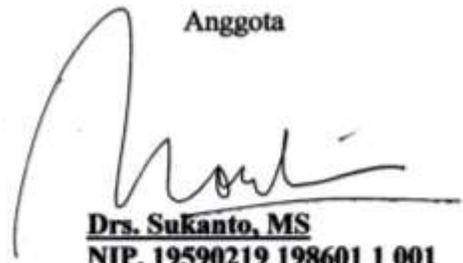
### MAJELIS PENGUJI

Ketua



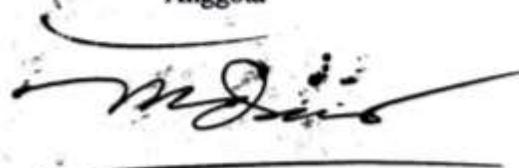
**Drs. Minto Hadi, M.Si**  
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota



**Drs. Sukanto, MS**  
NIP. 19590219 198601 1 001

Anggota



**Dr. Mardivono, MPA**  
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



**Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19730713 200604 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 16 September 2015

Mahasiswa

Materai  
Rp.6000,-

TTD

Nama : Imeylda Agdelia Tarore

NIM : 105030101111102

## RINGKASAN

Imeylda Agdelia Tarore, 2015, **Penanggulangan Kemiskinan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Pengurangan Angka Kemiskinan**. Drs. Minto Hadi, Msi Sebagai Dosen Pembimbing I, dan Drs Sukanto, MS sebagai Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan di Indonesia karena pada kenyataannya masih membutuhkan perbaikan dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo adalah masalah yang harus diatasi. Salah satu cara mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan mempercepat pengurangan angka kemiskinan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Dengan adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sidoarjo ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Hanya saja kerjasama antar pegawai di dalam TKPK sendiri masih kurang baik. Dikarenakan seringnya mutasi sehingga mempengaruhi kinerja dalam tim ini dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman melalui tiga alur yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Koordinasi antara TKPK dengan SKPD teknis yaitu BPMPKB selaku SKPD teknis program rehab rumah tidak layak huni yang diangkat sebagai contoh oleh peneliti. Selain itu dalam pelaksanaannya TKPK juga berkoordinasi dengan P3M dalam menghimpun saran dan informasi dari masyarakat mengenai masyarakat sasaran yang membutuhkan bantuan program rehab rumah tidak layak huni. Program tersebut mengharapkan adanya perubahan keadaan rumah masyarakat miskin penerima bantuan dari kerjasama antara TKPK dengan SKPD yang terkait yaitu BPMPKB berupa program bantuan rumah tidak layak huni.

Dari hasil penelitian diperoleh data tentang TKPK dalam mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan dengan menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS), selanjutnya TKPK dalam penyusunan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan, serta TKPK dalam melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah dalam Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2). Selain itu TKPK juga menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010) yaitu Analisa Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar, Analisa Pelaksanaan PKH 2014, Analisa PNPM MP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014.

Kata Kunci: Kemiskinan

## SUMMARY

Imeylda Agdelia Tarore, 2015, **Poverty Reduction By Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sidoarjo District For Poverty Reduction Efforts**. Drs. Minto Hadi, Msi As a Supervisor I, and Drs Sukanto, MS as Supervisor II.

This research was conducted on the basis of the importance of poverty reduction in development in Indonesia because it is in fact still in need of improvement in implementing poverty reduction, especially in Sidoarjo. Poverty in Sidoarjo is a problem that must be addressed. One way to overcome poverty in Sidoarjo is to accelerate the reduction of poverty by forming a Poverty Reduction Coordination's Team (TKPK). With the Poverty Reduction Coordination's Team (TKPK) in Sidoarjo has contributed significantly to the reduction of poverty. Only cooperation between employees within TKPK itself is still not good. Due to frequent mutations that affect the performance of this team in implementing poverty reduction in the District Sidoarjo.

To find out how to reduce poverty in Sidoarjo by the Poverty Reduction Coordination's Team (TKPK), in this study the author uses descriptive research with a qualitative approach. The data analysis technique used in this research is the analysis of Interactive Data Model Miles and Huberman through three grooves that condensation, data presentation and conclusion

Coordination between the Commission with technical SKPD that BPMPKB as technical SKPD rehab program uninhabitable houses raised as an example by the researcher. Besides in implementation TKPK also coordinate with P3M in collecting suggestions and information from the public regarding the target communities who need assistance home improvement's program. The program expects a change in the home state of the poor beneficiaries of the cooperation between TKPK with related SKPD that BPMPKB as assistance uninhabitable houses's program.

The results were obtained data about Poverty Reduction Coordination's Team (TKPK) in encouraging the planning and budgeting process so as to produce a budget that is effective for the alleviation of poverty to determine Target Households (RTS), hereinafter Poverty Reduction Coordination's Team (TKPK) in budgeting effectively for poverty reduction, as well as TKPK in coordinating and monitoring control programs poverty in the region in home improvement's program and Zone-Based Integrated Development Program of Poverty (PTBK2). In addition TKPK also submit a report of the coordination meeting TKPKD (Article 25, Regulation No. 42 of 2010); and the results of the implementation of poverty reduction in the region to the Vice President as Chairman TNP2K (Article 27 of Regulation No. 42 of 2010), namely Basic infrastructure Poverty Analysis Division, Analysis Implementation PKH 2014, PNPM MP analysis Sidoarjo Regency 2014.

Keywords: Poverty

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk Ayah dan Ibunda tersayang. Dengan doa dan dukungan Ayah dan Ibunda penulis bisa mewujudkan salah satu doa dan harapan kalian. Terimakasih untuk semuanya.**



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, serta shalawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Rasullullah SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Kemiskinan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Pengurangan Angka Kemiskinan”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih keppada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Choirul Saleh, Dr., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Lely Indah Mindarti, Dr., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Drs. Minto Hadi, Msi selaku Dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Drs. Sukanto, MS selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
6. Bapak Mardiyono, Dr., MPA dan Bapak Ainul Hayat Spd, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. 8.Seluruh pegawai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo yang telah bersedia memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Guntur Marchedy Tarore dan Ibu Sri Atin yang terhormat, yang selalu memberikan dorongan berupa moril dan materil, memberikan kasih dan kesabaran serta doa restu yang tiada henti-hentinya kepada peneliti sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Adik tercinta Nabiila Tarore yang senantiasa menumbuhkan semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa kepada peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Meylani Yustian, SE dan dr Vinny Alvion, yang selalu memberikan semangat dan canda tawa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
13. Segenap sahabat “Aprelia Dyah Damayanti, Alun Anggraeni, Andre Endarto, M. Lutfi, Doni Irawan, Zul’is Muhtadi, Sevi Tunjung, Denada Violy Salsabila,

Wanda Pustikha, Julian Nindra, Indah Setia Lestari, Clarisa Danita, Tyas Sudiro, Suhandarini Sugiono, Vania Tacca, Nikita Azza Istighfarah, Kartika Iskandar, Ferisa, Leveina Huzzeld, Okky Caraka Rizki, dan Danis Kurniawan” yang telah mengisi hari-hari penulis dengan kebahagiaan hingga terselesaikan skripsi ini.

14. Melinda Damayanti dan Irianti Prasetyo yang terhormat, yang selalu memberikan waktu luangnya untuk memberi dukungan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
15. Ryanda Ramadhana, yang senantiasa memberikan waktu luangnya dan menjadi teman berbagi disaat suka dan duka sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2010 yang telah banyak memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, hingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga masih menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, hal ini karena keterbatasan penulis semata. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya.

Malang, 8 September 2015-09-14

Penulis

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Balakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	11
C.    Tujuan Penelitian .....	11
D.    Kontribusi Penelitian .....	12
E.    Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.    Penelitian Terdahulu .....	14
B.    Administrasi Publik .....	15
2.2.1.    Pengertian Administrasi Publik .....	15
2.2.2.    Peran Administrasi Publik .....	16
C.    Manajemen Publik .....	19
2.3.1.    Pengertian Manajemen Publik .....	19
D.    Organisasi .....	20

2.5.1	Pengertian Organisasi .....	20
2.5.2	Sumber Daya Organisasi.....	21
2.5.3	Asas-asas Organisasi.....	22
2.5.4	Macam-macam Organisasi.....	24
2.5.5	Bentuk-Bentuk Organisasi .....	24
2.5.6	Fungsi dan Manfaat Tujuan Organisasi .....	26
2.5.7	Koordinasi Dalam Organisasi .....	27
E.	Kinerja .....	28
2.5.1	Pengertian Kinerja .....	28
2.5.2	Landasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).....	31
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	35
B.	Fokus Penelitian.....	36
C.	Lokasi dan Situs Penelitian.....	38
D.	Jenis dan Sumber Data.....	39
1.	Data Primer.....	39
2.	Data Sekunder.....	40
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	40
1.	Wawancara .....	41
2.	Observasi .....	41
3.	Dokumentasi .....	42
G.	Instrumen Penelitian .....	42
H.	Analisa Data.....	43
I.	Prosedur Penelitian .....	44
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Gambaran Umum.....	46
1.	Kedudukan dan Wilayah Administratif .....	46



2. Penggunaan Lahan.....	48
3. Jumlah Penduduk.....	49
4. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	51
5. Mata Pencaharian Penduduk.....	53
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan .....	55
a) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.....	55
b) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota.....	60
B. Penyajian Data .....	61
4.2.1. TKPK dalam Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. ....	74
4.2.2. TKPK Melakukan Koordinasi dan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. ....	78
4.2.3. Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD,	
4.2.4. Paling sedikit 3 kali setahun; dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan didaerah kepada wakil presiden selaku ketua TN2PK.....	106
C. Analisis Data .....	119
4.3.1. TKPK dalam Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.....	119
 <b>BAB VI KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran .....	135
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 137
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>140</b>

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah RTS dan Anggota RTS Hasil PPLS-2011 Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.....	2
4.1.	Tabel Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo .....	47
4.2.	Penduduk per Kecamatan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013 .....	53
4.3.	jumlah rumah tangga sasaran berdasarkan hasil pendataan PPLS 2011 yang diresmikan oleh TKPK terdapat 99.492 RTS (375.061 jiwa) .....	64
4.4.	Dana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Anggaran Belanja .....	74
4.5.	Anggaran Belanja Sektor Menurur Urusan Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 .....	77
4.6.	Anggaran Belanja Sektor Menurur Urusan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 .....	77
4.7.	Anggaran Belanja Sektor Menurur Urusan Perumahan dan Fasilitas Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 .....	77
4.8.	Anggaran Belanja Sektor Menurur Urusan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013 .....	78
4.9.	Program Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kabupaten Sidoarjo .....	79
4.10.	Penerima bantuan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di 19 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo .....	90
4.11.	Tahap Pertama Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	97
4.12.	Tahap Kedua Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 .....	97
4.13.	Tahap Ketiga Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 .....	98

## DAFTAR GAMBAR

1.1. Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2013 .....	3
4.1. Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo .....	46
4.2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 1980 – 2010 .....	49
4.3. Perkembangan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2013 Hasil Registrasi Penduduk .....	51
4.4. Perbandingan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	52
4.5. Sebaran Rumah Tangga Sangat Miskin (SM) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo .....	65
4.6. Sebaran Rumah Tangga Miskin (M) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo .....	65
4.7. Sebaran Rumah Tangga Hampir Miskin (HM) Hasil Pendataan PPLS Kabupaten Sidoarjo .....	66
4.8. Sebaran Rumah Tangga Rentan Miskin (RM) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo .....	66
4.9. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo 2006-2013 .....	67
4.10. Prioritas Wilayah Penduduk Miskin Usia 7-12 Tahun Tidak Bersekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	66
4.11. Prioritas Bagi Penduduk Miskin Usia 13 - 15 Tahun Tidak Bersekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	67
4.12. Prioritas Wilayah Bagi Penduduk Miskin Usia 16- 17 Tahun Tidak Bersekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	68
4.13. Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Bidang Kesehatan Penduduk Miskin Cacat di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	71
4.14. Prioritas Wilayah Program Pembangunan Fasilitas Buang Air Besar Milik Sendiri Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	71
4.15. Prioritas Wilayah Program Akses Air Minum Bersih Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	72
4.16. Prioritas Wilayah Program Akses Penerangan Utama Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	72
4.17. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan Penurunan Angka Pengangguran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	73
4.18. Komposisi Belanja Sektoral Terhadap Anggaran di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	73
4.19. Formulir Online Pengaduan Masyarakat Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo Melalui Website Resmi .....	88
4.20. Monitoring Pelaksanaan Program Jamban Sehat PTBK2 Tahap Pertama Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 .....	98

DAFTAR LAMPIRAN

1. <i>A Cognitive-Behavior Therapy Manual: Anger Management for High School Student</i> .....	140
2. <i>Sertivicate CBGT for Anger Management</i> .....	141
3. <i>Anger Meter</i> .....	142
4. <i>My Anger Diary</i> .....	143
5. <i>Daftar Hadir Terapi</i> .....	140
6. <i>Uji Ahli Bahasa</i> .....	141
7. <i>Angket Anger Management Scale</i> .....	144
8. <i>Tabulasi Anger Management Scale</i> .....	145
9. <i>Uji Validitas Anger Management Scale</i> .....	146
10. <i>Uji Reliabilitas Anger Management Scale</i> .....	148
11. <i>Hasil Uji Statistik</i> .....	149
12. <i>Lembar Konsultasi</i> .....	155
13. <i>Surat Ijin Penelitian</i> .....	158
14. <i>Surat Rekomendasi Penelitian Dari Diknas</i> .....	159
15. <i>Surat Keterangan Melakukan Penelitian</i> .....	160
16. <i>Handout CBGT for Anger Management</i> .....	161



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pemerintah melalui Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan pada tahun 2011 atau yang biasa dikenal dengan istilah PPLS 2011 mencoba untuk mengidentifikasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) berupa data yang berisikan informasi mengenai nama, alamat, dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan karena tantangan terbesar dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan adalah ketepatan sasaran bagi rumah tangga atau individu penerima manfaat. Jumlah rumah tangga sasaran di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil pendataan PPLS 2011 terdapat 99.492 RTS (375.061 jiwa) dengan *income* perkapita 30% menengah ke bawah. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah RTS yang tergolong kelompok sangat miskin sebesar 10.854 atau sekitar 17,51% sedangkan kelompok miskin sejumlah 18.755 atau sekitar 30,26% dan kelompok hampir miskin sejumlah 32.362 atau sekitar 52,22% dari total keseluruhan RTS. Dapat diketahui berdasarkan data tersebut maka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi yang proses penanggulangannya sebatas pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Karena pemecahan permasalahan kemiskinan benar-benar harus dipercepat pengurangannya tidak hanya melalui pemberian bantuan tunai saja. Hal ini bisa dilihat dalam rincian data RTS hasil pendataan PPLS 2011 per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo pada gambar tabel di bawah ini:

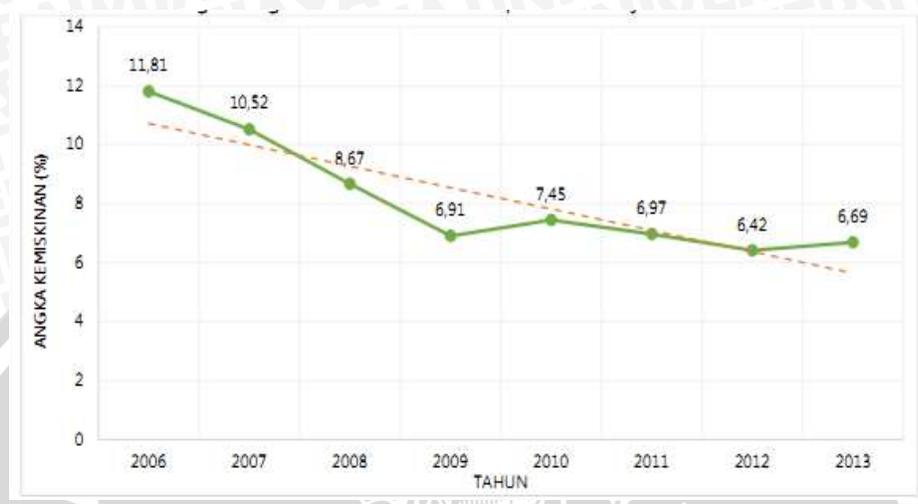
Gambar 1.1. Jumlah RTS dan Anggota RTS Hasil PPLS-2011 Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga **				Jumlah Anggota Rumah Tangga **			
	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Jumlah	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Jumlah
Tarik	2.467	3.249	2.833	8.549	10.251	11.447	9.297	30.995
Prambon	2.350	2.631	1.640	6.621	9.838	8.952	4.968	23.758
Krembung	2.494	2.454	1.875	6.823	10.776	9.019	6.612	26.407
Porong	1.414	1.873	1.946	5.233	6.573	7.425	7.047	21.045
Jabon	1.684	2.155	1.954	5.793	6.988	8.102	6.828	21.918
Tanggulangin	1.044	1.441	1.477	3.962	4.919	5.741	5.000	15.660
Candi	980	1.614	2.075	4.669	4.387	6.099	6.835	17.321
Tulangan	1.838	2.396	1.996	6.230	7.581	8.507	6.301	22.389
Wonoayu	1.921	1.996	1.481	5.398	8.035	6.867	4.691	19.593
Sukodono	1.101	1.244	1.265	3.610	4.860	4.444	3.851	13.155
Sidoarjo	1.100	1.592	2.178	4.870	4.823	5.997	7.635	18.455
Buduran	804	1.129	1.525	3.458	3.731	4.570	5.304	13.605
Sedati	1.199	1.065	1.171	3.435	5.138	3.866	3.625	12.629
Waru	906	1.409	1.997	4.312	4.665	6.331	8.064	19.060
Gedangan	444	812	1.298	2.554	2.153	3.403	4.938	10.494
Taman	1.199	2.289	3.398	6.886	5.615	9.030	11.919	26.564
Krian	3.187	3.205	2.796	9.188	13.476	11.695	9.463	34.634
Balombang	2.557	2.847	2.497	7.901	10.373	9.435	7.571	27.379
<b>Kab. Sidoarjo</b>	<b>28.689</b>	<b>35.401</b>	<b>35.402</b>	<b>99.492</b>	<b>124.182</b>	<b>130.930</b>	<b>119.949</b>	<b>375.061</b>

Sumber : Dokumen TKPK 2014

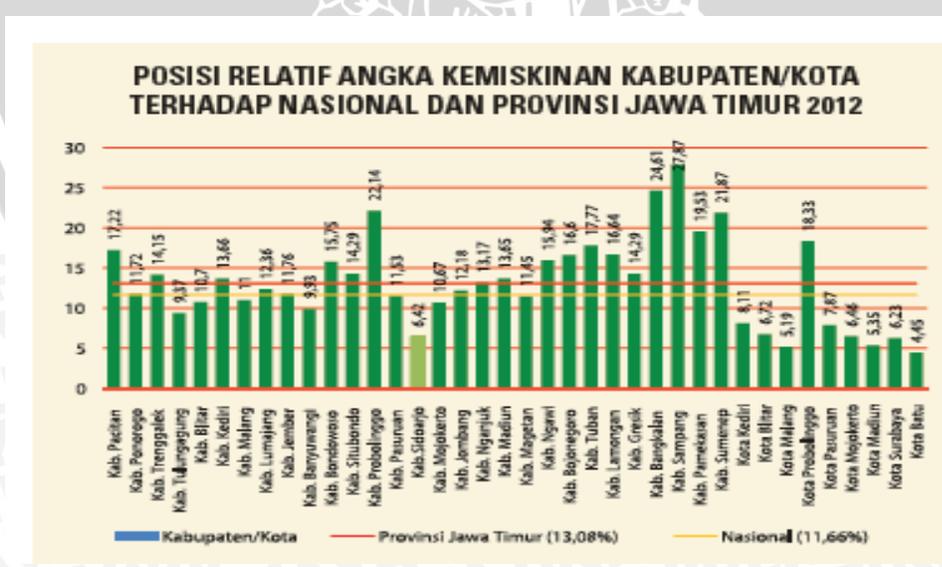
Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami penurunan setiap tahunnya. Hanya saja pada tahun 2010 sempat mengalami kenaikan. Kemudian tahun 2010, perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo kembali mengalami penurunan setiap tahunnya. Terjadinya kenaikan BBM pada tahun 2013 sedikit memberikan dorongan bagi peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Akibatnya pada tahun 2013 jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo kembali mengalami kenaikan. Gambar grafik di bawah ini akan memperlihatkan perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.

Gambar 1.2 Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2013



Sumber : Dokumen TKPK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

Gambar 1.3 Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012



Sumber: BPS Tahun 2012

Berdasarkan gambar pada grafik diatas maka kondisi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menurun sejak tahun 20 ke 2011 terjadi penurunan 6,97% kemudian di tahun 2012 kembali menurun 6,42%. Akan tetapi pada tahun 2013 kondisi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo kembali naik menjadi 6,69%. Pada posisi relatif angka kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi 6,42 %.

Dalam suatu organisasi, baik publik maupun swasta terdapat suatu penggerak yaitu sumber daya manusia (aparatur). Sumber daya manusia (aparatur) merupakan penggerak utama dan sekaligus memegang peranan penting dalam suatu organisasi. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan kunci sukses suatu organisasi. Pengelolaan sumberdaya manusia termasuk didalamnya meningkatkan dan mempertahankan kualitas dari sumberdaya manusia itu sendiri. Karena didalam organisasi dengan berbagai macam individu sebagai pegawai seringkali menghasilkan kualitas kerja yang berbeda-beda.

Sebagai suatu instansi atau organisasi, pemerintah wajib untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan pemerintah yang telah ditetapkan adalah keberhasilan pembangunan perkotaan yang mempunyai dampak terhadap taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Tuntutan akan keberhasilan pembangunan perkotaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, hal ini dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat yang semakin kritis dalam menilai sesuatu termasuk yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan perkotaan yang diselenggarakan oleh

pemerintah pusat bersama daerah dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan melalui pengurangan angka kemiskinan menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Peranan organisasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangat besar guna menentukan cepat lambatnya laju pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa birokrasi pemerintah perlu didukung oleh aparatur negara yang benar-benar mampu melaksanakan tugasnya. Karena pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengandung pengertian bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Meskipun program pembangunan sudah dijalankan dan dinilai cukup berhasil, namun belum berarti program pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

*(Sumber: Dokumen LP2KD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011)*

Pembangunan fisik maupun non fisik yang diprogramkan baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, tentunya perlu dilakukan evaluasi dan hasilnya dapat menjadi parameter yang sesuai terutama untuk mengukur sejauh mana efektifitas kinerja yang telah dilakukan pemerintah selama ini dan dapat menjadi arahan pada perencanaan pembangunan selanjutnya. Dalam rangka memenuhi amanat rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. RPJMN 2009-2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dalam hal target penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% (persen) pada 2009 menjadi 8-10% (persen) pada

tahun 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah secara berkesinambungan melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kebijakan dan program tersebut, diupayakan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dan pendampingan.

*(Sumber: Dokumen LP2KD Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011)*

Pembangunan fisik dan non fisik yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah memperbaiki kinerja sumberdaya manusia (aparatur) dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tidak sedikit biaya yang telah dikeluarkan dan program telah dicanangkan, tetapi akibat kurangnya maksimalnya koordinasi yang dilakukan antar instansi atau lembaga dalam penanggulangan kemiskinan, maka berbagai upaya yang telah dilakukan seringkali kurang memberikan hasil yang optimal.

Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan oleh TKPK dalam menurunkan angka kemiskinan dapat memberikan suatu pandangan agar kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat terus menurun dengan penanggulangan yang efisien dan efektif. Menurut pernyataan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam

Surjadi (2009:12) “Negara tidak boleh tidur demi menjalankan tugasnya dan menjalankan roda pemerintahan untuk melayani rakyat”. Hal ini dibenarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia melalui pembentukan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) melalui Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu pertama, menyempurnakan program perlindungan sosial. Kedua, Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Ketiga, Pemberdayaan masyarakat, dan Keempat, Pembangunan yang inklusif. (Sumber: [www.tkpsidoarjokab.org](http://www.tkpsidoarjokab.org))

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster, masing-masing: Klaster I : Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Klaster II : Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Klaster III : Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Pelaksanaan ketiga program bantuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tersebut dilaksanakan secara merata pada semua provinsi dan Kabupaten/ kota di Indonesia. ([www.tkpsidoarjokak.org](http://www.tkpsidoarjokak.org))

Sebagaimana RPJMD 2010 - 2015 dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal target penurunan tingkat kemiskinan dari 9,94% (persen) pada 2010 menjadi 7,44% (persen) pada tahun 2015. Oleh karena itu, Substansi Program aksi penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Terpadu merupakan Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan Program Keluarga Harapan (PKH);
2. PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dengan total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada tahun 2010 sebesar Rp. 46,4 miliar dan tahun 2011 sebesar 40,7 miliar yang tersebar di seluruh kecamatan sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo serta integrasi secara selektif PNPM Pendukung;
3. Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo di bawah koordinasi Wakil Bupati Sidoarjo, diharapkan dapat memacu untuk mengurangi penduduk miskin. Tentunya dengan menggunakan database yang tervalidasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.

Sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang mengamatkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 adalah Kabupaten Sidoarjo yang dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan kepadatan penduduk yang selalu mengalami peningkatan, Berdasarkan hasil sensus penduduk dalam data Badan Pusat Statistik 2010 yang

diakses dalam ( [disnakertransdukjatimprov.go.id](http://disnakertransdukjatimprov.go.id) ) menunjukkan jumlah penduduk Jatim 37.476.011 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 18.488.290 laki-laki dan 18.987.721 perempuan. Jika dilihat dari penyebaran penduduk di 38 Kabupaten/Kota, jumlahnya sangat bervariasi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota di Jatim rata-rata dibawah 1 persen. Tetapi, khusus Kabupaten Sidoarjo, laju pertumbuhan penduduk hingga 2,21 persen. Dengan demikian, bencana Lumpur Lapindo ternyata tidak menyebabkan terjadinya migran keluar. Sebagian besar penduduk Sidoarjo yang terkena dampak atas bencana tersebut memilih tetap tinggal di Sidoarjo.

Dengan jumlah laju pertumbuhan penduduk hingga 2,21 persen, maka berbagai permasalahan timbul akibat kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kabupaten Sidoarjo juga tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan.. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya mempercepat mengurangi angka kemiskinan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sidoarjo.

Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010. Dengan menggunakan jumlah rumah tangga sebagai indikator utama dan jumlah rumah tangga miskin sebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah-wilayah yang

menjadi prioritas intervensi. Terdapat 9 (sembilan) wilayah yang menjadi prioritas pertama untuk dilakukannya intervensi program-program penanggulangan kemiskinan. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kecamatan Krebung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Tarik, Kecamatan Sedati, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Wonoayu. Wilayah yang menjadi prioritas kedua yaitu Kecamatan Krian. Untuk wilayah yang menjadi prioritas ketiga yaitu Kecamatan Buduran dan Kecamatan Sukodono. Sedangkan wilayah yang menjadi prioritas keempat yaitu Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Candi, Kecamatan Taman, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Waru.

(Sumber: [www.tpkksidoarjokab.org](http://www.tpkksidoarjokab.org))

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidoarjo diatas rata-rata dari pertumbuhan penduduk kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur hanya mencapai angka 1 %, sedangkan Kabupaten Sidoarjo mencapai 2,21 %. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta kondisi alam yang dipengaruhi oleh Bencana Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, tentu juga mempengaruhi laju peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai organisasi yang dibentuk dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, keberadaan TKPK sebagai organisasi publik dalam pengurangan angka kemiskinan seharusnya dapat berperan aktif dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang, serta fakta dan realita tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **PENANGGULANGAN**

## **KEMISKINAN OLEH TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DI KABUPATEN SIDOARJO SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN”**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas dalam evaluasi kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo sehingga keberadaannya dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja hambatan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi angka kemiskinan.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis penghambat kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo dalam efektivitas pengurangan angka kemiskinan.

#### D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran atau masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan maupun kebijaksanaan dalam permasalahan pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan efektivitas pengurangan angka kemiskinan.
3. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan efektivitas pengurangan angka kemiskinan.

## **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah secara sistematis dalam penyajian hasil penelitian ini disusun ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang masalah terkait dengan judul penelitian “Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sebagai upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo”, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan tentang berbagai konsep-konsep dan teori yang di gunakan sebagai pembanding antara realita dan teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Memuat pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, fenomena yang diamati, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Penelitian Terdahulu

Ahmad Habibi (2012) “Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita” Studi di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Malang. Penelitian ini membahas peran negara dalam implementasi program pembinaan narapidana wanita pada lembaga permsyarakatan wanita kelas IIA Malang. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

- a. Bentuk-bentuknya
- b. Fungsi pemerintah
- c. Tugas dan wewenang pegawai/petugas

Selain itu juga peneliti menambahkan faktor-faktor pendukung dan penghambat peran negara dalam implmentasi program pembinaan narapidana wanita di lembaga permasyarakatan wanita kelas IIA Malang. Faktor pendung dan penghambat tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Kesimpulan yang peneliti peroleh selama masa penelitian bahwa peran negara dalam implementasi program pembinaan melalui lembaga permasyarakatan wanita kelas IIA Malang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, meskipun kekurangan petgas/pegawai, kelebihan kapasitas penghuni, dan juga minimnya sarana dan prasarana, pihak lembaga permasyarakatan

wanita kelas IIA malang dapat menyiasatinya dengan lebih mendekatkan diri kepada narapidana, sehingga dalam implementasi program pembinaan, petugas/pegawai mendapatkan bantuan dari narapidana (Tamping).

## **2. Administrasi Publik**

### **2. 2. 1 Pengertian Administrasi Publik**

John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960:4) dalam Pasolong (2010:7) Mendefinisikan administrasi publik adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah, (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhitung jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dalam Keban (2004:16) juga menuliskan bahwa kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari pelayanan rutin di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, perijinan, dsb. Dan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi (sarana dan prasarana fisik dan sosial), sistem sosial budaya, hukum, politik dan pembangunan kualitas manusia, dalam rangka mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguran.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah segala aktivitas pemerintah yang mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat, baik pada ruang lingkup nasional maupun daerah.

Sedangkan Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi empat prinsip administrasi yang lebih umum yaitu:

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas dikalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hierarki yang pasti
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor didalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tuuan, proses, tempat.

### **2.2.2 Peran Administrasi Publik**

Menurut Keban (2004) peran administasi publik dapat diamati secara jelas dari dinamika peengaturan dan perubahan jenis departmen, penempatan menteri dan semua jajaran dalam jabatannya, pengaturan persyaratan jabatan, mekanisme pengangkatan/pemilohan dan pemberhentian para gubernur, bupati dan walikota, serta semua sekretaris daerah, kepala dinas, badan dan kantor pada tingkat lokal. Peran tersebut juga daapat dirasakan ketika kualitas para birokrat kunci atau eksekutif seperti menteri dan semua eselon yang ada dipusat atau didaerah tidak memadai, penggantian struktur dan fungsi birokrasi mulai dari pusat samai didaerah secara tidak responsif. Mungkin pengaruh negatif yang paling dirasakan adalah ketika terjadi berbagai kesalahan dalam pengaturan struktur organisasi publik, proses manajemen dan kebijakan publik yang krang rasional, dan rendahnya etika dan moral birokrat. Di

negara sedang berkembang, peran negaif seperti ini masih nampak dan menjadi salah satu sumber keterbelakangan.

Oleh karena itu administrasi publik merupakan medan dimana para aparat atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Menurut Keban (2004:16) administrasi publik juga dapat dilihat sebagai ajang dimana dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar-benar para elit-elit birokrasi dan politisi memenuhi janji-janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih mereka. Karena itu, administrasi publik juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik.

Dalam Keban (2004:17) menuliskan bahwa secara khusus kegiatan administrasi publik difokuskan kepada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Artinya administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik maupun penyediaan barang-barang publik. Persepsi umum tentang administrasi adalah "*The Management Of Public Affairs*". Karena itu, kegiatan ini meliputi semua yang dilakukan oleh para manajer publik.

Meskipun kepentingan umum merupakan sasaran utama dari kegiatan administrasi publik, tetapi kepentingan umum itu sendiri sering menimbulkan masalah karena ketidakjelasan konsepnya Denhardt (2003) dalam Keban (2004:18) Menurut Keban (2004:18) ada yang mengartikannya sebagai kepentingan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan yang dipilih (*elected policy makers*) sebagaimana terdapat dalam administrasi publik lama (klasik). Ini berarti kepentingan

publik tidak harus berasal dari masyarakat secara langsung, tetapi dapat diusulkan melalui wakil-wakilnya, atau pejabat publik yang ditunjuk untuk memutuskannya. Akibatnya banyak warga masyarakat yang merasa kecewa ketika apa yang diputuskan tidak sejalan dengan aspirasi mereka.

### 3. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon issue-isue yang bersifat publik, yakni mengatasi masyarakat sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006:4) *“In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing of range of income support, community services and support programs”*. Artinya kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Menurut Suharto (2005) Sebagai sebuah kebijakan publik. Kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan yaitu mencegah terjadinya masalah sosial), kuratif (penyembuhan yaitu mengatasi masalah sosial), dan pengembangan yaitu mempromosikan kesejahteraan (developmental) sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Sedangkan menurut Midgley (2000) membagi kebijakan sosial menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
2. Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan)
3. Sistem perpajakan. Dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak, juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil.

#### **4. Manajemen Publik**

##### **2.4.1 Pengertian Manajemen Publik**

Menurut George R. Terry dan Lestie W. Rue dalam bukunya Dasar-dasar Manajemen (2013:1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Adapun lima fungsi utama manajemen, yaitu:

1. Planning, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2. Organizing, yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3. Staffing, yaitu menentukan keperluan-keperluan SDM, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.
4. Motivating, yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan
5. Controlling, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

Wilson dalam Keban (2004: 92) meletakkan 4 (empat) prinsip dasar bagi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu: (1) pemerintah sebagai setyng utama organisasi; (2) fungsi eksekutif sebagai fokus utama; (3) pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan; (4) metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Manajemen menurut Shafritz dan Russel (1997:20) dalam Keban (2004:84), manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan tetapi juga sekelompok orang yang bertanggung jawab menjalankan proses tersebut.

J. Steven Ott, Albert C. Hyde, dan Jay M. Shafritz (1991) dalam Keban (2004: 85) berpendapat bahwa manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting. Yaitu: (1) privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik; (2) rasionalitas dan akuntabilitas; (3) perencanaan dan kontrol; (4) keuangan dan penganggaran; dan (5) Produktivitas sumberdaya manusia.

Dalam Keban (2004:86) Salah satu pendekatan manajemen adalah manajemen normatif yaitu manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Beberapa fungsi yang bersifat universal dalam manajemen normatif: (1)

Planning; (2) Organizing; (3) Staffing; (4) Coordinating; (5) Motivating; (6) Controlling.

## 5. Organisasi

### 2.5.1 Pengertian Organisasi

Menurut pendapat Makmur (2008:109) yakni:

Organisasi terdiri dari organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah pembentukan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara resmi dengan diikat suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap manusia yang terikat dalam persekutuan itu juga secara resmi pengangkatannya dengan ditandai surat keputusan bagi pejabat yang berwenang. Sedangkan organisasi informal adalah suatu bentuk organisasi sebagai pelengkap atau pendukung keberhasilan kegiatan organisasi formal. Pembentukan organisasi informal tidak serumit pembentukan organisasi formal.

Sedangkan menurut Blake dan Mouton dalam Miftah Thoha (2010:168) yaitu:

Pengertian organisasi dengan mengenalkan tujuh unsur yang melekat pada organisasi. Ketujuh unsur tersebut diantaranya: (1) Organisasi senantiasa mempunyai tujuan, (2) Organisasi mempunyai kerangka (structure), (3) organisasi mempunyai sumber keuangan, (4) Organisasi mempunyai cara yang memberikan kecakapan bagi anggotanya untuk melaksanakan kerja mencapai tujuan tersebut, (5) didalam organisasi terdapat proses interaksi hubungan kerja antara orang-orang yang bekerja sama mencapai tujuan tersebut, (6) organisasi mempunyai pola kebudayaan sebagai dasar cara hidupnya, (7) organisasi mempunyai hasil-hasil yang ingin dicapainya.

Lain halnya dengan menurut pendapat Kusdi dalam (2009:57) yaitu

Organisasi publik dibedakan dengan organisasi bisnis, yaitu dari aspek: (1) tujuan (antara laba dan non laba); (2) produk yang dihasilkan (antara public goods dan private goods); (3) cara pengambilan keputusan (antara proses demokratis/birokratis dan proses strategi bisnis), dan (4) ukuran kinerja (antara social welfare dan efisisensi).

Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan daripada orang-orang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus

jelas, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi bersifat “status”, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “dinamis”, yaitu organisasi dilihat daripada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal.

### 2.5.2 Sumber Daya Organisasi

Sedarmayanti (2000:96) menyebutkan sumber daya organisasi yang perlu dimiliki dan perlu disiapkan untuk menjadi kuat meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Sumber daya nyata
  - 1) Fisik (materiil) berarti segala sesuatu yang merupakan satuan tertentu, dapat diukur, dihitung dan ditimbang, terdiri dari barang tetap atau bergerak dan tidak bergerak amupun barang habis pakai (termasuk didalamnya sarana dan prasarana)
  - 2) Keuangan, hal ini erat kaitannya dengan proses manajemen perusahaan karena memiliki sasaran yang sama.
- b. Sumber daya tidak nyata
  - 1) Teknologi, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern mengakibatkan adanya peningkatan tuntutan guna memiliki kemampuan atau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tersebut.
  - 2) Reputasi dan budaya, hal ini mengarahkan penyelesaian masalah pada kepemimpinan dapat dikembangkan dan dipelihara budaya yang adaptif terhadap perubahan
- c. Sumber daya manusia
  - 1) Keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diisyaratkan untuk menduduki jabatan tertentu harus dimiliki oleh pegawai yang ada. Hal tersebut akan menunjukkan tingkah laku dan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan keprofesionalan, yang mana semuanya sangat berperan dalam mewujudkan produktifitas individu , kelompok dan organisasi.
  - 2) Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Komunikasi yang efektif akan menciptakan iklim kerja yang sehat atau kondusif dalam organisasi.

### 2.5.3 Asas-asas Organisasi

Beberapa pendapat para ahli tentang asas-asas organisasi diungkapkan Mohyi, (1999:61-63) diantaranya:

1. Fayol, mengungkapkan 5 asas-asas manajemen yang dikatakan sama dengan asas-asas organisasi yaitu:

- 1) Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)  
Tidak hanya bertumpu pada perseorangan saja, tetapi juga pada kelompok, atau dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel.
- 2) Disiplin (*disipline*)  
Merujuk pada ketaatan personal tidak hanya terhadap waktu, melainkan juga terhadap pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Pembagian kerja (*division of work*)  
Setelah dilakukan departemenisasi, perlu pengisian aktifitas kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- 4) Gaji pegawai (*renumeration of personel*)  
Suatu imbalan dari hasil kerja yang telah dilaksanakan serta diberikan sesuai atas posisi atau jabatan yang diduduki pegawai tersebut.
- 5) Kesatuan jiwa korp (*esprit de corp*)  
Sebuah bentuk pengabdian pegawai terhadap suatu organisasi dimana dalam bekerja mengacu pada pedoman dasar organisasi sehingga terwujud suatu pencapaian visi dan misi.

2. Alford dan Beatty mengungkapkan 4 macam asas-asas yaitu:

- 1) Asas tujuan (*principle of objective*)  
Merujuk pada acuan akhir dari keseluruhan pelaksanaan aktivitas berorganisasi, yang diarahkan pada sebuah pembentukan baru baik itu struktur maupun sistemnya.
- 2) Asas penugasan kewajiban-kewajiban (*principle of assignment to duties*)  
Merujuk dimana seluruh anggota organisasi wajib melaksanakan tugasnya, dimana tugas tersebut tidak hanya bersifat kewajiban melainkan juga tanggung jawab.
- 3) Asas kesamaan (*principle of homogenety*)  
Tidak terdapat pembedaan antara pimpinan maupun pegawai, karena dengan adanya perasaan sama terdapat orang lain dalam berorganisasi, akan tercipta sebuah keharmonisan antar amsing-masing individu yang ada didalam organisasi tersebut.

4) Asas wewenang dan tanggung jawab (*principle of organization effectiveness*) merujuk pada tercapainya visi dan misi yang mendasari suatu organisasi agar dapat tercapai optimal dan sesuai dengan target.

3. Sutarto mengemukakan 5 macam organisasi, yaitu:

1) Perumusan tujuan dengan jelas

Merujuk pada rumusan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sehingga penataan sistem kinerja akan dapat lebih dipertanggungjawabkan.

2) Pembagian kerja

Berdasar pada struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut dibuat berdasarkan pada kemampuan/keahlian dari masing-masing anggota organisasi.

3) Koordinasi

Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai keselarasan dalam organisasi

4) Depertemenisasi

Penyusunan bagian-bagian yang akan menjalankan tugas-tugas sesuai bidang-bidang tertentu. Dapat dilakukan dengan mengelompokkan tugas-tugas sejenis.

5) Bagian atau dalam organisasi yang memiliki peran yang sama pentingnya harus ditempatkan pada level yang sama pula.

#### 2.5.4 Macam-macam Organisasi

Macam-macam organisasi menurut Hasibuan (2003:57-74)

a. Berdasarkan proses pembentukannya

1) Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal, dalam Anggaran Rumah Tangganya.

2) Organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya, tujuannya juga tidak jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya tidak ada dan hubungan-hubungan terjalin secara pribadi saja.

b. Berdasarkan kaitannya dengan pemerintah

1) Organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh (ada hubungannya) dengan pemerintah dan atau terdaftar pada lembaga negara.

2) Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah dan atau tidak terdaftar pada lembaran negara.

c. Berdasarkan tujuannya

1) Public organization (organisasi sosial) adalah organisasi yang (nonprofit) yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum, tanpa perhitungan rugi laba. Tujuannya adalah memberikan pelayanan dan bukan memperoleh laba (non profit motive)

2) Bussiness organization (organisasi perusahaan) adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan komersial (mendapatkan laba) dan semua tindakannya selalu bermotif laba (profit motive).

d. Berdasarkan skala (ukuran) besar-kecilnya

1) Organisasi besar yaitu menurut ukuran tertentu tergolong besar

2) Organisasi sedang (menengah) yaitu menurut ukuran tertentu tergolong sedang

3) Organisasi kecil yaitu berdasarkan ukuran tertentu tergolong organisasi kecil

### 2.5.5 Bentuk-Bentuk Organisasi

Adapun bentuk-bentuk organisasi menurut Sarwoto (1978) dalam Juliantara (2005:53)

a. Organisasi Lini

Organisasi lini mempunyai bentuk sederhana. Bentuk organisasi ini terdapat pada organisasi militer. Dalam organisasi lini ini bawahan hanya mengenal satu atasan atau satu pimpinan, sebagai sumber dari satu kewenangan yang memberikan perintah atau instruksi. Bawahan hanya bertindak sebagai pelaksana, sekalipun para pelaksana tidak seluruhnya melaksanakan secara langsung tercapainya tujuan atau tugas pokok organisasi.

b. Organisasi Lini dan Staff

Organisasi lini dan staff adalah organisasi yang pada umumnya dipergunakan pada organisasi pemerintah. Organisasi ini terdiri dari atas unit-unit lini dan unit-unit staff. Dalam organisasi ini telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lini adalah orang-orang atau unit-unit secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tugas pokok atau tujuan organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan staff disini adalah unit-unit yang tidak secara langsung ikut serta mencapai tujuan organisasi, tetapi hanya memberikan kontribusinya dalam hal-hal yang tidak langsung dengan menyediakan bantuan dibidang kepegawaian, keuangan, material, dan bantuan lainnya baik untuk kepentingan unit staff sendiri maupun unit lini.

Kebaikan dari organisasi lini dan staff adalah hanya pembagian pekerjaan yang jelas, kesempatan para pegawai untuk mengembangkan dirinya, ikut serta dalam

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, kesempurnaan dalam analisa unit, adanya fleksibilitas. Sedangkan kelemahannya adalah kekaburan antara tugas lini dan staff dan kurangnya koordinasi.

#### c. Organisasi Fungsional

Organisasi fungsi pada umumnya terdapat pada organisasi niaga. Dalam organisasi fungsi ini disusun atas dasar kegiatan dari tiap-tiap fungsi sesuai dengan kepentingan perusahaan, dimana tiap-tiap fungsi sesuai dengan kepentingan perusahaan, dimana tiap-tiap fungsi atau kegiatan seolah-olah terpisah berdasarkan atas bidang keahliannya. Sekalipun demikian tiap-tiap fungsi tidak dapat berdiri sendiri. Karena fungsi satu dengan yang lainnya saling ketergantungan sehingga masalah koordinasi dan kerjasama menjadi sangat penting.

Kebaikan organisasi ini adalah hanya pembagian pekerjaan yang sempurna, kesempatan bagi pegawai untuk berkembang dan adanya kerjasama yang baik dan fleksibel. Keburukannya adalah suatu sistem yang ruwet, disiplin sulit ditegakkan dan sulitnya mendapatkan pimpinan yang mempunyai pengetahuan yang luas karena persyaratannya berdasarkan tingkat-tingkat keahlian.

#### d. Organisasi Panitia

Panitia adalah sekelompok orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus, yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seorang atau oleh orang banyak. Disamping panitia terdapat istilah semacam yaitu gugus tugas. Yang dimaksud gugus tugas ialah sekelompok sementara yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus, yang diambil atau ditunjuk dari berbagai unit organisasi yang bertugas untuk melaksanakan tugas tertentu.

Kebaikan dari organisasi ini adalah adanya dorongan kerjasama secara sukarela, adanya koordinasi secara sederhana, sumbangan kelanjutan kebijaksanaan, dapat membuat suatu rekomendasi secara kolektif, memainkan peranan sebagai pendidik, menitik beratkan pada fungsi keahlian. Sedangkan keburukannya ialah bahwa tanggung jawab dibagi-bagi diantara anggota, mendorong adanya kompromi, kurang adanya sifat-sifat kepemimpinan, banyak waktu yang terbuang oleh para anggota, sehingga tidak memadai untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

### 2.5.6 Fungsi dan Manfaat Tujuan Organisasi

Menurut Etzioni dalam Handoko (2000:19) Tujuan organisasi sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya.

Fungsi manfaat tujuan organisasi menurut Arthur G. Bedeian dalam Handoko

(2000:111) antara lain sebagai berikut:

- 1) Pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil-hasil akhir diwaktu yang akan datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi. Dalam hal ini fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan.
- 2) Sumber legitimasi. Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya, dan disamping itu keberadaannya dikalangan kelompok seperti pelanggan, politikus, karyawan, pemegang saham dan masyarakat umumnya. Pengakuan atas legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.
- 3) Standart pelaksanaan. Bila tujuan dinyatakan jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standart langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi.
- 4) Sumber motivasi. Tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insetif bagi para anggota.
- 5) Dasar rasional pengorganisasian, dinyatakan secara sederhana, tujuan organisasi merupakan suatu dasar rancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pola penggunaan sumberdaya, implementasi berbagai unsur perancangan organisasi: pola komunikasi, mekanisme pengawasan, departmenisasi dan sebagainya.

Sedangkan manfaat-manfaat tujuan organisasi menurut Arthur G. Bedeian

(dalam Handoko 2000:112) antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu memebrikan arah dalam pembuatan rencana yang efektif dan pelaksaan
- 2) Dapat memberikan motivasi pada karyawan dalam melaksanakan aktivitas organisasi
- 3) Membantu mengenalkan eksistensi organisasi pada msyarakat maupun lembaga atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Membantu pimpinan organisasi dalam mengkoordinasikan bawahannya maupun dalam pembuatan kebijaksanaan organisasi.

### 2.5.7 Koordinasi Dalam Organisasi

Dalam Keban (2004:87) Koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target/tujuan dari beberapa unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan bagian yang ada akan bekerja menuju arah yang berlainan dengan irama/kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula tanpa koordinasi, masing-masing bekerja sesuai dengan kepentingannya masing-masing dengan mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan.

Dalam suatu organisasi seperti TKPK, diperlukan suatu bentuk koordinasi yang baik antar SKPD teknis dan TKPK itu sendiri, Karena pada dasarnya Anggota TKPK juga merupakan SKPD teknis yang berasal dari dinas-dinas dan badan-badan yang mempunyai program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Menurut James D. Money dalam Sutarto (1981:123) memberikan pengertian koordinasi sebagai:

*“The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common purpose”*

(Pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama)

Sedangkan menurut Leonard D. White (1981:123) koordinasi adalah :

*“Coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the movement and operation of parts in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole”*

(Koordinasi adalah penyesuaian diri dari bagian-bagian satu sama lain, dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan)

## **F. Kinerja**

### **2.6.1 Pengertian Kinerja**

Istilah kinerja dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, ataupun kemampuan kerja. Pengertian kinerja menurut A. Dale Timple (1992:231) dalam Echols dan Shadily (1986:97) Dipersamakan dalam bahasa inggris yaitu “performance”. Kata performance sendiri bila dilihat dalam kamus bahasa inggris diartikan sebagai daya guna, prestasi atau hasil.

Wirawan (2009:5) Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-sungsi atau indicator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut pendapat Ningsih, 2002 dalam Ihyaul Ulum (2009:19) Kinerja bisa berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politisi atau birokrasi. Kinerja bisa juga focus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas dengan hokum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan.

Kinerja menurut Mulyadi (2001:353) “Kinerja merupakan penentuan secara periodic efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan bagian karyawannya berdasarkan sasaran, standard an kriteria sebelumnya”. Berbeda dengan

yang diungkapkan Prabu (2005:67) Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Bernardin dan Russel Ruky (2002:15) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut: "*Performanced is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period.*" (Prestasi kerja/kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu)

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Simajuntak (2005:1) yang mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Sedangkan Dessler (2000:87), kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan oleh karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standart yang yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standart yang dibuat.

Rivai (2008:14) mendefinisikan kinerja sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Dalam Rangka pencapaian tujuan bersama dalam suatu organisasi, perlu adanya sinergi dalam bekerja. Menurut Aman Sudarto (1999:3) terdapat tiga jenis kinerja yang harus bersinergi, yakni:

1. Kinerja Organisasi. Yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh proses atau kinerja individu, yang membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif dan tidak mencerminkan potensi organisasi.
2. Kinerja Proses, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi, dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
3. Kinerja individu, yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai factor dan dari individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu.

Sumber daya manusia yang unggul akan mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kinerja individu perlu diarahkan menuju kinerja yang baik. Adapun kinerja yang baik menurut Kusnadi (2003:267) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Rasional. Kinerja yang baik seharusnya diterima oleh akal sehat. Tidak ada kinerja yang baik yang tidak rasional.
- b. Konsisten. Kinerja yang baik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi dan departemen dan tujuan organisasi.
- c. Tepat. Kinerja yang baik harus dapat dinyatakan secara teoat dan jelas serta tidak menimbulkan kemenduan penafsiran.
- d. Efisiensi. Kinerja yang baik sedapat mungkin melalui pengorbanan dana yang minim dengan hasil yang memuaskan.
- e. Tertantang. Kinerja yang baik seharusnya memberikan tantangan yang tinggi bagi pelakunya dan diupayakan menjadi motivator yang efektif.
- f. Terarah. Kinerja yang baik seharusnya terarah kepada suatu tujuan tertentu, dapat melalui garis komando atau lepas
- g. Disiplin. Kinerja yang baik seharusnya dikerjakan melalui disiplin yang tinggi.
- h. Sistematis. Kinerja sebaiknya dilakukan secara sistematis dan tidak acak

- i. Dapat dicapai. Kinerja yang baik sebaiknya diarahkan dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan.
- j. Disepakati. Kinerja yang baik seharusnya disepakati oleh semua pihak yang terkait, baik dari pimpinan puncak sampai kepada pelaksana terendah
- k. Terkait dengan waktu. Kinerja yang baik seharusnya dikaitkan dengan waktu yang telah terukur
- l. Berorientasi kepada kerjasama kelompok. Kinerja yang baik seharusnya diarahkan kepada kerjasama kelompok. Kinerja kelompok umumnya lebih efektif dan efisien daripada kinerja individu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa

kinerja merupakan gambaran tingkat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan, misi, dan visi organisasi. Istilah kinerja sering dipakai untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. berhubungan dengan organisasi, di mana organisasi tersebut. Dikatakan bahwa kinerja bukan outcome, konsekuensi atau hasil dari perilaku atau perbuatan, tetapi kinerja adalah atau aksi itu sendiri.

### **2.5.2 Landasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)**

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres No. 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010

TKPK memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota);

dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Dalam pelaksanaannya, TKPKD diharapkan mampu :

- a) Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
- b) Melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- c) Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

## **7. Kemiskinan**

### **2.7.1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan berasal dari kata 'miskin' dimana dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1996:660) diartikan "tidak berharta benda". "serba kekurangan", (Berpenghasilan rendah). Pengertian kemiskinan menurut Kuncoro dalam Sudarwati (2009:20) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standart hidup minimum. Namun menurut Brendley dalam Sudarwati (2009:22) kemiskinan adalah keidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memaadai untuk

kebutuhan sosial yang terbatas. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Suzetta (2008:12) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimum yang layak. Selain itu definisi kemiskinan dilihat dari Bappenas yaitu, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat .

Pada dasarnya kemiskinan dalam realita selalu dilihat dari sudut ekonomi, dimana batasan kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang tidak memiliki harta benda atau mempunyai pendapatan di bawah batasan nominal tertentu. Hal ini seperti yang diungkapkan Sudarwati (2009:33) yaitu masyarakat menjadi miskin disebabkan karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan kehidupan secara layak.

### 2.7.2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Esmara (1996:286) membuat klasifikasi kemiskinan menjadidi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah:

“Seseorang dapat dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut yang diteetapkan atau dengan kata lain jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan untuk garis kemiskinan absolut tersebut. Dengan demikian tingkat pendapatan minimum merupakan pembatasan antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin atau sering disesebut garis kemiskinan. Sementara itu,

kemiskinan relatif antara keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat yakni kelompok yang miskin. Tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang relatif lebih tinggi dari garis relatif kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif kaya. Dengan kata lain walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.”

Adapun bentuk-bentuk kemiskinan menurut Sudarwati (2009:24) yaitu:

- a. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.
- b. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.
- c. Kemiskinan struktural menurut Baswir (1997) dalam Sudarwati (2009:33) adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, kolusi dan korupsi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Menurut pendapat peneliti, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan beserta akses lain, seperti kesehatan, pekerjaan maupun

pendidikan. Kemiskinan mengarah pada keterbatasan individu atau kelompok dalam mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis-jenis metode penelitian juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamian objek yang diteliti. Narbuko dan Achmadi (2007:1) mengatakan bahwa yang disebut dengan metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara/ prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian menurut Singarimbun (1985:8) diuraikan sebagai berikut:

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Hasil akhirnya, pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya.

Metode penelitian akan lebih terarah apabila penelitian sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Karena dengan metode penelitian akan diperoleh data yang valid.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta dan berusaha

mencari jalan pemecahan. penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Pertimbangan mengenai penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila menghadapi kenyataan. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan informan lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan gejala-gejala yang sedang dihadapi.

Dengan menggunakan jenis dan metode penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan secara rinci, serta jelas dan tepat mengenai berbagai hal yang telah ditetapkan oleh penulis sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mencakup tentang keseluruhan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai organisasi publik dalam efektivitas mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

### **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian adalah suatu objek yang merupakan tujuan untuk meneliti fenomena yang terjadi atau sedang berlangsung. Fokus penelitian pada dasarnya adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian digunakan untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah.

Tujuan dari fokus penelitian ini yaitu untuk membatasi pembahasan pada faktor-faktor tertentu pada lingkungan penelitian. Pembatasan masalah ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Fokus menurut Moleong (2000:62) dijelaskan bahwa maksud ditentukannya focus penelitian adalah untuk membatasi studi dan memasukkan atau mengeluarkan suatu informan yang diperoleh di lapangan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah membahas tentang penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan TKPK Kabupaten Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

- a. TKPK menentukan Rumah Tangga Sasaran
- b. TKPK menyusun anggaran yang efektif untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- c. TKPK melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah
- d. Realisasi Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo:
  - (a) Program Rehab Rumah
  - (b) Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2)
- e. TKPK menyampaikan menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali dalam satu tahun

2. Hambatan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti akan dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian yang telah diterapkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sidoarjo. Penetapan lokasi penelitian ini didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dalam efektivitas pengurangan angka kemiskinan.
2. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yang ditentukan.
3. Peneliti paham mengenai kondisi sosial Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan Situs penelitian adalah lokasi atau tempat dimana peneliti menangkap keadaan atau fenomena yang sebenarnya dari objek yang diteliti dan melakukan penelitian untuk memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi situs penelitian ini adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo. Pemilihan situs penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut memungkinkan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Agar dapat diperoleh data yang lebih akurat, maka untuk menggali dan mengumpulkan data yang dimaksud diambil dari berbagai sumber. Jenis sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat peneliti melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang yang bersangkutan dengan penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Sehingga dapat diperoleh data-data dan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian adalah:

##### a) Penelitian secara individu

Yaitu dalam memperoleh data, peneliti sebagai instrument mengamati serta mencatat fenomena objek yang terjadi untuk diteliti dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

##### b) Informan

Informan adalah orang yang dijadikan sebagai objek yang diwawancarai, serta diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu obyek penelitian. Adapun nara sumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer adalah:

##### 1. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Kabupaten Sidoarjo

2. Pegawai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo
3. Masyarakat sebagai penerima layanan berupa bantuan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya akan mencari dan mengumpulkan data. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Dokumen
2. Laporan pertanggungjawaban
3. Catatan dan arsip yang berhubungan dengan focus penelitian

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain

penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara merupakan metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Penentuan informan didasarkan pada perkiraan kemampuan informan dalam memberikan data-data yang diperlukan sesuai dengan rumusan permasalahan.

### 2. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek yang dapat berupa orang, objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Observasi yang dilakukan mencakup gambaran tentang kinerja Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dalam efektivitas mengurangi angka kemiskinan.

Penggunaan pengumpulan data melalui observasi memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Karena peneliti dalam observasi tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Peneliti hanya mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Tujuan observasi dalam banyak hal adalah untuk memahami perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Kegiatan dokumentasi melibatkan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pemilihan dokumen sesuai dengan kebutuhan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data melalui dokumentasi ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti. Pengumpulan data perlu didukung pula dengan pendokumen-tasian, dengan foto dan video. Dokumentasi ini akan berguna untuk mengecek data yang telah terkumpul.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk penelitian dengan objek manusia yang di dalamnya mencakup unsur variabel yang terkait dengan manusia, tes merupakan alat ukur yang sering ditemui di bidang penelitian pendidikan, psikologi maupun sosiologi. Adapun instrument penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Peneliti sendiri

Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif maka peneliti merupakan subjek dalam upaya pencarian dan pengumpulan data. Instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

### b. Pedoman Wawancara

Berupa materi yang berhubungan dengan masalah dan focus penelitian yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.

### c. Catatan Lapangan

Catatan lapangan ini merupakan catatan penelitian di lapangan untuk mencatat hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan objek dan yang diperoleh dari hasil pengamatan dari peneliti di lapangan. Catatan lapangan dalam hal ini adalah hasil wawancara dan hasil pengamatan dari peneliti yang berhubungan dengan focus penelitian.

### **G. Analisa Data**

Analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode penelitian karena analisa data sebagai alat untuk memberikan makna dan menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Analisis data menunjuk pada bagian pengorganisasian data ke dalam susunan-susunan tertentu didalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan akhirnya diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing penelitian maupun keseluruhan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman (2009) dalam Saldana (2013:12) melalui tiga alur yaitu: 1) Kondensasi Data; 2) Penyajian Data; 3) Penarikan Kesimpulan.

### **H. Prosedur Penelitian**

Bagi pihak-pihak yang lain khususnya yang berkepentingan. Menurut Moleong (2012:127), terdapat empat tahap dalam penelitian, sebagai berikut:

#### **a. Tahap Pra Lapangan**

Pada tahap ini, ada enam langkah dalam penelitian yang dimulai dengan menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan ditambah dengan persoalan etika penelitian.

#### **b. Tahap Pekerjaan Lapangan**

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan diri untuk memulai penelitian. Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu: memahami latar penelitian, memasuki lapangan, dan berperanserta sambil mengumpulkan data.

#### c. Tahap Analisis Data

Yaitu mengadakan analisa data yang telah dikumpulkan melalui teknik-teknik yang telah ditetapkan.

#### d. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menyusun laporan penelitian. Pada tahap penyusunan, semua hasil kegiatan selama penelitian disusun dan ditulis dalam laporan hasil penelitian dan diharapkan bermanfaat.



## BAB IV

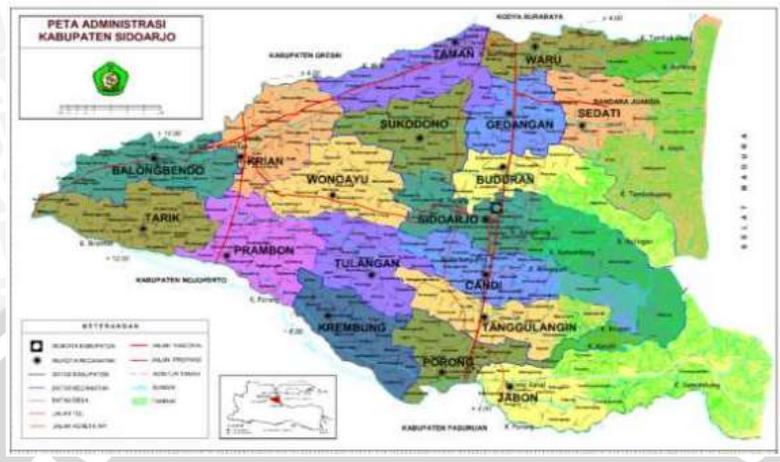
### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 4.1.1. Kedudukan dan Wilayah Administratif

Kabupaten Sidoarjo terletak antara  $112^{\circ} 5' - 112^{\circ} 9'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 3' - 7^{\circ} 5'$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang subur karena berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas yaitu Kali Mas dan Kali Porong. Lokasi Kabupaten Sidoarjo sangat strategis karena dilalui jalan arteri primer Surabaya – Malang, Surabaya – Banyuwangi, dan Surabaya – Madiun. Adapun luas wilayah daratan adalah sebesar  $714,245 \text{ km}^2$  dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar  $201,6868 \text{ km}^2$ . Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam Provinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara: Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik; Sebelah Timur: Selat Madura ; Sebelah Selatan: Kabupaten Pasuruan; Sebelah Barat: Kabupaten Mojokerto

Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Dokumen LP2KD TKPK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa, dan 31 Kelurahan. Pembagian wilayah administrasi dan luas tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Ha)
		Desa	Kelurahan	
1	Sidoarjo	10	14	6.256,00
2	Buduran	15	-	4.102,50
3	Candi	24	-	4.066,75
4	Porong	13	6	2.982,25
5	Krembung	19	-	2.955,00
6	Tulangan	22	-	3.120,50
7	Tanggulangin	19	-	3.229,00
8	Jabon	15	-	8.099,75
9	Krian	19	3	3.250,00
10	Balongbendo	20	-	3.140,00
11	Wonoayu	23	-	3.392,00
12	Tarik	20	-	3.606,00
13	Prambon	20	-	3.422,50
14	Taman	16	8	3.153,50
15	Waru	17	-	3.032,00
16	Gedangan	15	-	2.405,75
17	Sedati	16	-	7.943,00
18	Sukodono	19	-	3.267,75
<b>Total</b>		<b>322</b>	<b>31</b>	<b>71.424,25</b>

Sumber : Dokumen LP2KD TKPK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

Dari data di atas dapat diketahui jika Kecamatan Jabon merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 8.099,75 ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Gedangan dengan luas wilayah hanya 2.405,75 ha. Pada umumnya wilayah administratif di Kabupaten Sidoarjo masih berupa Desa, terlihat untuk wilayah administratif berupa Kelurahan hanya terdapat pada empat kecamatan saja yaitu Kecamatan Sidoarjo (14 Kelurahan dari 24 wilayah administratif yang ada), Kecamatan Porong (6 Kelurahan dari 19 wilayah administratif yang ada), Kecamatan Krian (3 Kelurahan dari 21 wilayah administratif yang ada) dan Kecamatan Taman (8 Kelurahan dari 24 wilayah administratif yang ada).

#### 4.1.2. Penggunaan Lahan

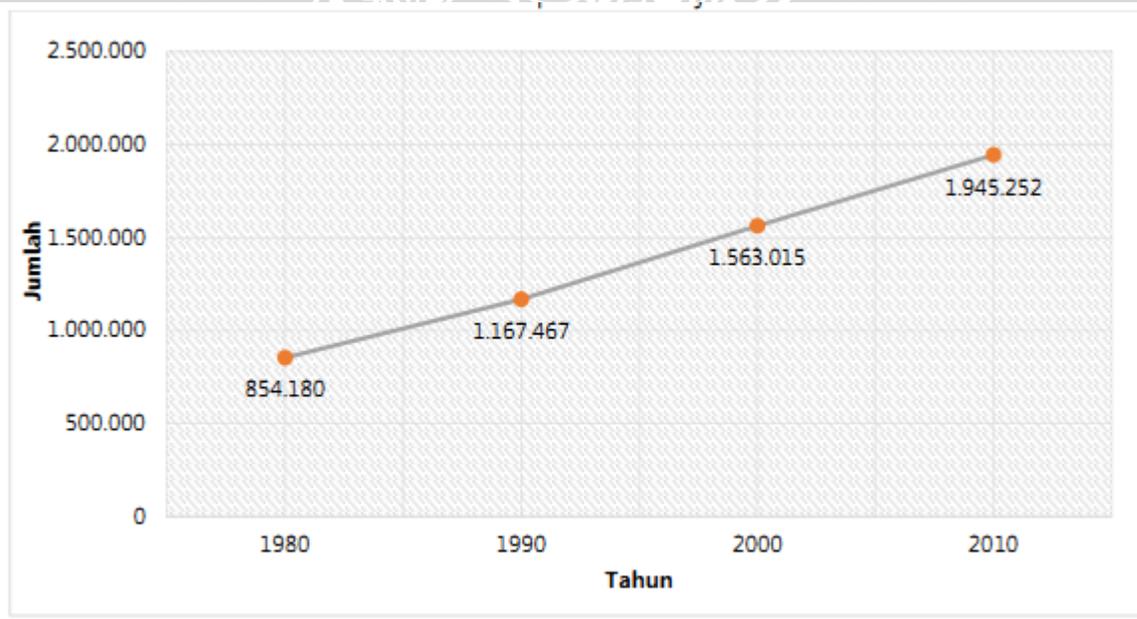
Penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dengan luas 71.424, 25 Ha, terdiri atas penggunaan lahan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan lindung meliputi penggunaan lahan untuk sempadan pantai, sempadan sungai, cagar alam, taman wisata alam, cagar budaya, dan kawasan hutan bakau. Sedangkan penggunaan lahan untuk budidaya meliputi permukiman, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dan konservasi bangunan sejarah. Penggunaan lahan untuk kawasan lindung berupa sempadan sungai terdapat pada Sungai Magetan, Sungai Porong, Kali Butung, Sungai Brantas, dan Sungai Mas. Sedangkan penggunaan lahan untuk perlindungan hutan bakau terdapat di pantai Timur Sidoarjo, dengan luas 1.038,25 Ha. Penggunaan lahan lainnya yaitu cagar budaya berupa Situs Purbakala candi yang ada di kecamatan Porong, Wonoayu dan Kecamatan Sedati sebanyak 5 buah dengan luas kurang lebih 7 ha, serta cagar budaya makam Dewi Sekardadu di Desa Kepetingan, Kecamatan Buduran. Penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan budidaya, yaitu mencapai 67.384,55 Ha, atau sekitar 94,34% dari luas wilayah keseluruhan, dengan klasifikasi penggunaan lahan berupa permukiman, dan industri,

#### 4.1.3. Jumlah Penduduk

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah wilayah yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai obyek sekaligus

subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, sedangkan sebagai subyek maka juga SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan. Kabupaten Sidoarjo memiliki SDM yang sangat banyak dan potensial untuk dikembangkan menjadi kekuatan pembangunan, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dari hasil sensus penduduk, secara umum jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dari tahun 1980, 1990, 2000, 2010 selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

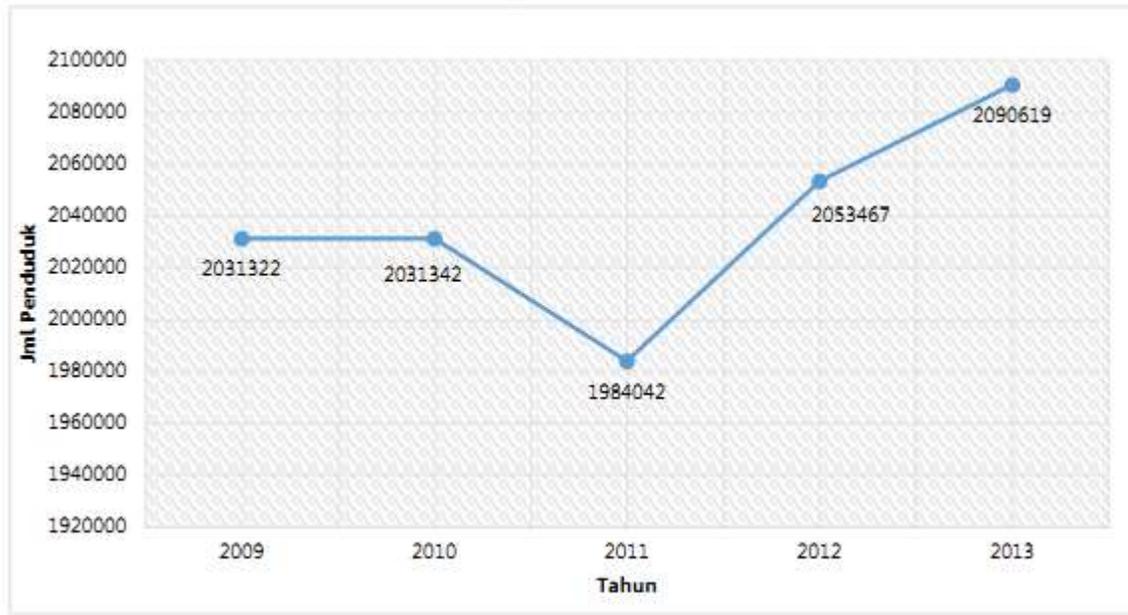
Gambar 4.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 1980 – 2010



Sumber : Dokumen TKPK Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemsikinan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 oleh TKPK Kabupaten Sidoarjo Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.945.252 jiwa, dimana Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Waru yaitu sebesar 231.298 jiwa, Kecamatan Taman sebesar 212.857 jiwa, dan Kecamatan Sidoarjo sebesar 194.051 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Jabon yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 49.989 jiwa. Pertumbuhan penduduk di satu sisi terus naik secara signifikan, sedangkan luas wilayah di sisi lain tidak berubah menjadikan tingkat kepadatan semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 2.090.619 jiwa. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan sebesar 1,81% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil registrasi tahun 2012 sebesar 2.053.467 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil registrasi penduduk mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 4.3 Perkembangan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2013 Hasil Registrasi Penduduk



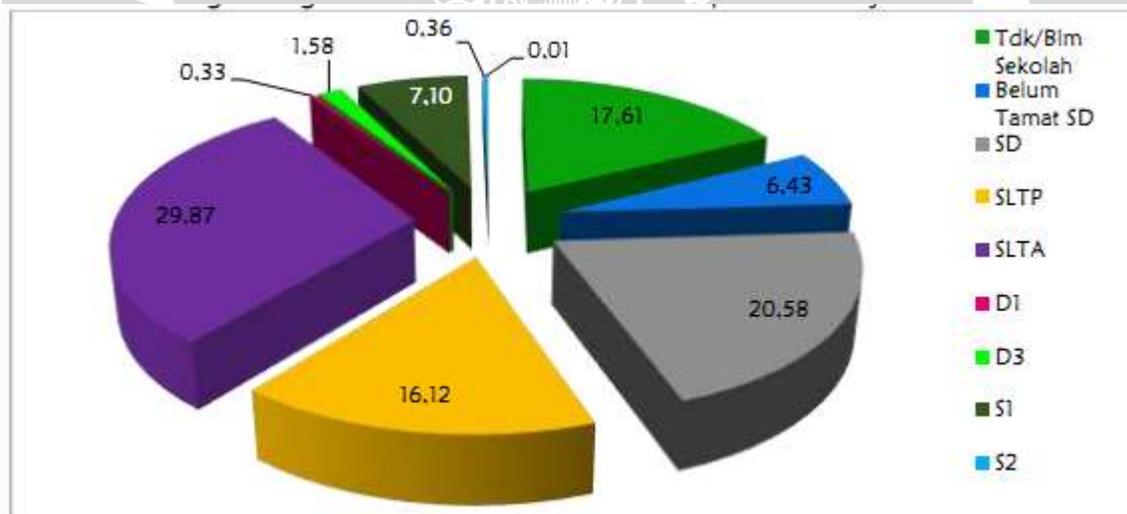
Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2014 dalam Dokumen TKPK

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Sidoarjo, terlihat pada tahun 2011 berdasarkan hasil registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo jumlah penduduk mengalami penurunan. Setelah tahun 2011 terlihat perkembangan penduduk menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari 2.090.619 jiwa penduduk hasil registrasi tahun 2013, jika dilihat dari jenis kelamin maka sebanyak 50,41% atau 1.053.903 jiwa merupakan penduduk laki-laki. Sedangkan penduduk perempuan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 sebanyak 49,59% atau 1.036.716 jiwa.

#### 4.1.4. Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2013 dalam dokumen TKPK, sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 Tahun. Grafik di bawah ini memberikan gambaran penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat pendidikannya.

Gambar 4.4 Perbandingan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



Sumber : Dokumen TKPK kabupaten Sidoarjo 2014

Berdasarkan Dari grafik di atas terlihat bahwa sebanyak 39,26% Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat pendidikan SMU ke atas. Dari 39,26% tersebut, penduduk yang berpendidikan SMU masih mendominasi yaitu sebanyak 29,87%. Masih adanya penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang tidak sekolah

perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut perlu dicermati lagi karena dikhawatirkan masih banyak terdapat penduduk yang tidak bersekolah tersebut tidak semuanya dengan status ‘belum bersekolah’. Ditakutkan dari jumlah tersebut terdapat penduduk yang kesulitan memperoleh akses terhadap dunia pendidikan sehingga memaksanya tidak bersekolah. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tentunya harus tepat sasaran. Data persebaran penduduk Kabupaten Sidoarjo per Kecamatan berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2 Penduduk per Kecamatan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		Tdk / Blm Sekolah	Blm Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	Sidoarjo	35818	13239	33665	26693	66912	751	5007	26963	1339	45	210432
2	Buduran	16738	7017	16681	14099	30776	337	1721	8393	387	13	96162
3	Candi	25214	11569	28892	21332	45455	387	2622	11973	504	25	147973
4	Porong	21043	2092	23028	16528	22441	156	722	3289	85	7	89391
5	Krembung	12276	4886	16038	13955	20081	237	710	2273	45	2	70503
6	Tulangan	15023	8309	20299	17603	27977	247	964	3695	91	1	94209
7	Tanggulangin	20216	4312	24032	18968	31341	252	1275	6101	178	2	106677
8	Jabon	10114	3341	18884	12177	12180	121	446	1495	41	2	58801
9	Krian	23960	9200	28245	21873	34433	295	1379	5690	138	3	125216
10	Balong Bendo	12270	4858	18936	14986	20292	164	516	2490	69	2	74583
11	Wonoayu	16024	4096	24494	14175	19388	180	616	2958	96	5	82032
12	Tarik	12637	3665	19559	13552	16107	166	429	1568	43	1	67727
13	Prambon	13735	4986	21495	15241	20668	187	559	2436	61	2	79370
14	Taman	31490	18750	37568	32812	73315	1424	4432	17610	855	80	218336
15	Waru	34520	15081	32448	31238	75671	750	5384	30191	1780	62	227125
16	Gedangan	25420	6236	21738	18365	40391	418	2200	10308	435	21	125532
17	Sedati	19006	5549	19587	13863	29954	344	1997	7458	1021	17	98796
18	Sukodono	21457	6854	23437	18499	35238	477	2015	3110	354	16	111457
	Jumlah	366961	134040	429026	335959	622620	6893	32994	148001	7522	306	2084322

Sumber: Dokumen TKPK Kabupaten Sidoarjo 2014

#### 4.1.5. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan data pada dokumen pelaksanaan PKH 2014 halaman 48 oleh TKPK Kabupaten Sidoarjo, dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Sidoarjo paling banyak bekerja sebagai pegawai negeri baik itu PNS, TNI maupun Polisi. Dari 1.290.123 penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang telah bekerja sebagian besar (40,51%) atau 522.655 jiwa merupakan pegawai negeri. Dari jumlah pegawai negeri tersebut, penduduk Kabupaten Sidoarjo yang bermatapencaharian sebagai TNI lebih dominan (14,10%) atau 181.883 jiwa.

Sebanyak 313.593 jiwa atau 24,31% penduduk Kabupaten Sidoarjo merupakan pensiunan. Sektor lain yang menjadi mata pencaharian penduduk Kabupaten Sidoarjo adalah swasta, terlihat bahwa sekitar 16,20% atau 209.064 jiwa bekerja di sektor swasta. Walaupun demikian ternyata masih ada penduduk Kabupaten Sidoarjo yang bermata pencaharian sebagai pemulung. Tercatat sebanyak 0,32% atau 4.180 jiwa penduduk bekerja sebagai pemulung. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya harus memberikan perhatian lebih kepada penduduk yang masih bekerja sebagai pemulung. Hal ini tidak lepas dari kondisi pemulung yang pada umumnya masih jauh dari kata kehidupan sejahtera. Secara umum pengembangan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo dapat dikelompokkan ke dalam tiga wilayah yang berbeda yaitu :

##### a. Wilayah Barat

Wilayah barat Kabupaten Sidoarjo berbatasan langsung dengan kota Surabaya memiliki sektor unggulan yaitu industri. Dengan ketinggian berkisar 10-25 mdpl, sebagian wilayah barat ini ada yang dikembangkan sebagai kawasan pertanian yaitu sebesar 29% dari total pemanfaatan wilayah yang ada di sana. Sisanya dimanfaatkan sebagai pemukiman dan industri, di mana sebagian besar industri tersebut berada di Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman. Kondisi tersebut mengakibatkan pemusatan laju pertumbuhan penduduk berada di wilayah ini, di mana kawasan barat menempati peringkat pertama dalam hal kepadatan penduduk. Hal ini mengindikasikan jika kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini berpusat di daerah-daerah yang potensial untuk industri. Kepadatan ini akan semakin bertambah ketika pagi hari hingga sore hari akibat dari adanya pendatang harian yaitu pekerja industri yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo.

#### b. Wilayah Tengah

Wilayah tengah umumnya merupakan dataran dengan ketinggian antara 3-10 mdpl, di mana sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk pemukiman dan perdagangan. Pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo juga berada di wilayah ini, sehingga sektor ekonomi wilayah tengah ini ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan. Tidak mengherankan jika sektor perdagangan menjadi rutinitas harian masyarakat di kawasan ini.

#### c. Wilayah Timur

Wilayah ini merupakan wilayah yang cukup tertinggal dalam hal percepatan pertumbuhan perekonomiannya. Penyebabnya adalah wilayah timur ini hanya mengandalkan pengembangan perekonomian melalui perikanan, utamanya perikanan tambak dengan hasil utama yaitu bandeng dan udang. Walaupun terdapat penopang ekonomi lain berupa kawasan wisata hutan mangrove dan pulau Dem di daerah Jabon, rasanya hanya menyandarkan pada sektor tersebut cukup sulit untuk dapat bersaing dengan bagian wilayah yang lain.

#### **4.1.6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)**

##### **a) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi**

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres No. 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010

TKPK memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi,

Kabupaten dan Kota). Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Dalam pelaksanaannya, TKPKD diharapkan mampu :

- d) Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
- e) Melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- f) Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

Dasar pembentukan TKPK Provinsi Jawa Timur sudah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, namun masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009.

Pembentukan TKPKD Provinsi Jawa Timur ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, yang setiap tahun dilakukan penyempurnaan berturut turut sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/ 2003 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;

2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2004 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/27/KPTS/013/2005 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/63/KPTS/013/ 2006 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/135/KPTS/013/ 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/86/KPTS/013/ 2008 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/ 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/225/KPTS/013/ 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/231/KPTS/013/2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/221/KPTS/013/2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur.

Memahami kompleksitas masalah kemiskinan dan kerentanan setiap proses upaya penanggulangan kemiskinan, menyadarkan kita betapa pemecahan masalah ini tidak bisa dilakukan secara sektoral, tetapi multidimensi dalam program lintas pembangunan yang menyangkut sinergitas peran pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat. Kebijakan penanggulangan di Jawa Timur diarahkan pada “peningkatan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran” di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi 11 (sebelas) hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi antara lain: (1) hak atas pangan, (2) hak atas kesehatan, (3) hak atas pendidikan, (4) hak atas pekerjaan, (5) hak atas perumahan, (6) hak atas air bersih, (7) hak atas tanah, (8) hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) hak atas rasa aman, (10) hak atas akses partisipasi serta, (11) hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Sedangkan secara spesifik kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada:

1. Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan dan persalinan yang bermutu dan mudah terjangkau oleh keluarga miskin;
2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, permukiman, sanitasi yang layak dan sehat, serta air bersih;
3. Peningkatan ketersediaan pelayanan pendidikan, formal maupun non-formal, yang bermutu dan terjangkau, serta bebas biaya bagi masyarakat miskin;
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha, serta melindungi keberlangsungan usaha-usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan;
5. Peningkatan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi, serta menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan;

6. Peningkatan ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat miskin; Peningkatan reformasi pelayanan publik dalam pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat miskin, dengan biaya murah dan cepat;
7. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
8. Pengembangan sistem perlindungan sosial para kelompok rentan seperti pekerja anak dan anak jalanan, dan mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan;
9. Peningkatan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan tahapan pembangunan;
10. Pengembangan perlindungan terhadap perempuan keluarga miskin dari segala bentuk ketidakadilan gender.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Dinas/Instansi terkait anggota Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/221/KPTS/013/2012 melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Program-program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Timur telah didesain untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin agar mereka terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari garis kemiskinan. Adapun karakteristik program-program berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Menggunakan pendekatan partisipatif;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
3. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok;
4. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **b) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota Bab I Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat 9, menyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas

sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.

Dalam bab II tentang Penanggulangan Kemiskinan Bagian Kesatu yang meliputi tanggung jawab pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.

## **B. Penyajian Data**

### **4.2.1 Peranan TKPK Kabupaten Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan**

#### **1) TKPK Menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS)**

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang keberadaan tim ini memang dibentuk khusus sesuai PERPRES NO. 15 Tahun 2010 sehingga terjadi pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia khususnya wilayah kabupaten yang ditentukan oleh penulis yaitu Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo. TKPK bertindak sebagai tim yang mempunyai andil dalam menentukan rumah tangga sasaran dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan wawancara bapak Ardi Anindita di Sekretariat TKPK Kabupaten Sidoarjo.

“Jadi untuk menentukan sasaran, menentukan kegiatan apa yang dilakukan disana. TKPK memiliki peta prioritas wilayah untuk sasaran rumah tangga miskin. Jadi didalam peta itu TKPK sudah menentukan skala prioritas wilayah mana yang harus diintervensi oleh skpd dalam memberikan atau melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan tidak terkecuali juga yg program klaster 3. Jadi TKPK harus bekerja sesuai peta yang telah disusun” (Hasil wawancara tanggal 4 September 2014)

Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang juga menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan (issue-issue strategis dalam RPJMD 2011-2015 Kabupaten Sidoarjo diantaranya ditunjukkan oleh: (1) masih terdapat sekitar 10,70% Rumah Tangga Miskin (RTM) yang hidup dibawah garis kemiskinan; (2) masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan; (3) masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan), ikut mendukung kebijakan nasional tersebut dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo melalui Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/234/404.1.3.2/2014 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014. Melalui peningkatan peran TKPK Kabupaten dan SPKD Kabupaten Sidoarjo 2011-2015 diharapkan akan mengurangi in-efisiensi dan in-efektivitas dalam pelaksanaan koordinasi dan pemantauan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ardi Anindita melalui pesan singkat kepada penulis pada tanggal 24 April 2015:

“TKPK turun monitoring juga ke lapangan buat lihat prgram yang diberikan ke masyarakat tepat sasaran atau enggak, terus kendala-kendala yang ada apa aja”

Untuk mendukung penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan, TNP2K bekerja sama dengan dengan BPS mengembangkan Basis Data

Terpadu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ardi Anindita pada tanggal 30 Juli 2015:

“Kalau data kita kan ada BPS. Soal pengumpulan data tentang kemiskinan, TKPK sendiri juga selalu menerima laporan dari setiap SKPD yang ada di tim ini. Selain itu juga kan ada data dari BPS Kabupaten Sidoarjo.”

Untuk Program Perlindungan Sosial yang secara nasional terdiri dari sekitar 24 juta rumah tangga dengan kondisi sosio-ekonomi terendah. Jumlah dan persentase di setiap daerah berbeda-beda berdasarkan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah. Selain nama dan alamat, informasi terkait kondisi rumah tangga, karakteristik rumah tangga maupun individu juga dapat diperoleh dari Basis Data Terpadu yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan. Inti Basis Data Terpadu mengacu pada informasi yang dihimpun melalui PPLS 2011 yang dilaksanakan oleh BPS bulan Juli 2011. Metodologi PPLS 2011 dirancang oleh BPS bekerja sama dengan TKPK untuk mengakomodasi perbaikan terhadap beberapa pendataan serupa (PSE 2005 dan PPLS 2008). PPLS 2011 mendata jauh lebih banyak rumah tangga dari PPLS 2008 dan dilakukan perbaikan metodologi untuk memperhitungkan karakteristik spesifik masing-masing kabupaten/kota. Selain PPLS 2011, Basis Data Terpadu juga memanfaatkan sumber informasi lain seperti karakteristik desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, data kementerian/program, yang relevan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan karakteristik tertentu (misalnya tingkat kemiskinan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan). Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo sendiri, jumlah rumah tangga sasaran berdasarkan hasil pendataan PPLS 2011 yang diresmikan oleh TKPK terdapat

99.492 RTS (375.061 jiwa) dengan *income* perkapita 30% menengah kebawah yang tersebar di 18 kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.3.

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				Jumlah Individu			
	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3	Jumlah	Kel. 1	Kel. 2	Kel. 3	Jumlah
Tarik	2.467	3.249	2.833	8.549	10.251	11.447	9.297	30.995
Prambon	2.350	2.631	1.640	6.621	9.838	8.952	4.968	23.758
Kremlung	2.494	2.454	1.875	6.823	10.776	9.019	6.612	26.407
Porong	1.414	1.873	1.946	5.233	6.573	7.425	7.047	21.045
Jabon	1.684	2.155	1.954	5.793	6.988	8.102	6.828	21.918
Tanggulangin	1.044	1.441	1.477	3.962	4.919	5.741	5.000	15.660
Candi	980	1.614	2.075	4.669	4.387	6.099	6.835	17.321
Tulangan	1.838	2.396	1.996	6.230	7.581	8.507	6.301	22.389
Wonoayu	1.921	1.996	1.481	5.398	8.035	6.867	4.691	19.593
Sukodono	1.101	1.244	1.265	3.610	4.860	4.444	3.851	13.155
Sidoarjo	1.100	1.592	2.178	4.870	4.823	5.997	7.635	18.455
Buduran	804	1.129	1.525	3.458	3.731	4.570	5.304	13.605
Sedati	1.199	1.065	1.171	3.435	5.138	3.866	3.625	12.629
Waru	906	1.409	1.997	4.312	4.665	6.331	8.064	19.060
Gedangan	444	812	1.298	2.554	2.153	3.403	4.938	10.494
Taman	1.199	2.289	3.398	6.886	5.615	9.030	11.919	26.564
Krian	3.187	3.205	2.796	9.188	13.476	11.695	9.463	34.634
Balombang	2.557	2.847	2.497	7.901	10.373	9.435	7.571	27.379
<i>Kab. Sidoarjo</i>	<i>28.689</i>	<i>35.401</i>	<i>35.402</i>	<i>99.492</i>	<i>124.182</i>	<i>130.930</i>	<i>119.949</i>	<i>375.061</i>

Sumber Data : BDT PPLS 2011 dalam Dokumen LP2KD TKPK Kabupaten Sidoarjo 2014

Berdasarkan sumber data diatas maka TKPK membuat suatu gambar pemetaan wilayah dari masing-masing kelompok kesejahteraan yang fungsinya untuk memudahkan TKPK dalam melaksanakan penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Karena dengan pemetaan wilayah tersebut TKPK bisa menentukan wilayah mana yang tingkat kemiskinannya paling tinggi. Selanjutnya bentuk pemetaan wilayah prioritas hasil kerja dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.5 Sebaran Rumah Tangga Sangat Miskin (SM) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo



Gambar 4.6 Sebaran Rumah Tangga Miskin (M) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo



Gambar 4.7 Sebaran Rumah Tangga Hampir Miskin (HM) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo



Gambar 4.8 Sebaran Rumah Tangga Rentan Miskin (RM) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo



Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Berikut ini ditampilkan mengenai perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 4.9 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo 2006-2013



Sumber Data : Dokumen LP2KD TKPK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

Dari gambar grafik 4.10 dapat dilihat bahwa perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan. Sedangkan menurut pendapat bapak Ardi Anindita adalah sebagai berikut pada tanggal 30 Juli 2015:

“Dengan adanya TKPK ini, TKPK sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam merencanakan dan mengendalikan program-program penanggulangan kemiskinan. Sejauh ini TKPK sudah mengarahkan kepada SKPD teknis selaku eksekutor program untuk menentukan sasaran (masyarakat atau rumah tangga miskin) yang berhak menerima bantuan. Apabila dilihat dari capaian angka kemiskinan mulai tahun 2011 sampai 2013 di Sidoarjo, angka kemiskinannya terus menurun, contohnya ditahun 2011 yaitu masih dikisaran 6,97% dan pada tahun 2012 menurun menjadi 6,42% selanjutnya pada tahun 2013 kembali menurun pada angka 6,24%”.

Sedangkan menurut data grafik yang penulis cantumkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo justru meningkat menjadi 6,69%. Dalam kegiatan pengendalian penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo kepada SKPD pada masing-masing bidang, yaitu memantau perkembangan sasaran/penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Dalam memantau perkembangan sasaran/ penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan, TKPK membuat suatu laporan prioritas wilayah. Pembuatan Laporan Prioritas wilayah oleh Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan akan memudahkan SKPD yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan masing-masing sehingga dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2011-2015. Berikut adalah laporan prioritas wilayah yang dibuat oleh TKPK diantaranya:

#### 1. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan

Perkembangan indikator utama yang belum relevan dengan kemajuan di tingkat provinsi/nasional menyiratkan bahwa intervensi yang sudah dilakukan terhadap indikator utama itu (melalui perbaikan terhadap capaian indikator-indikator pendukungnya), secara kumulatif belum efektif. Oleh sebab itu, evaluasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan program/kegiatan terkait indikator-indikator pendukung yang bersangkutan perlu dilakukan. Prioritas wilayah ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan program/kegiatan dan alokasi anggaran bidang pendidikan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo yang nantinya akan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait di bidang pendidikan. Prioritas wilayah ini

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan program/kegiatan dan alokasi anggaran bidang pendidikan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

1. Penduduk Miskin Usia 7-12 Tahun Tidak Bersekolah

Gambar 4.10 Prioritas Wilayah Penduduk Miskin Usia 7-12 Tahun Tidak Bersekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



Sumber: Dokumen LP2KD TKPK Kabupaten Sidoarjo 2014

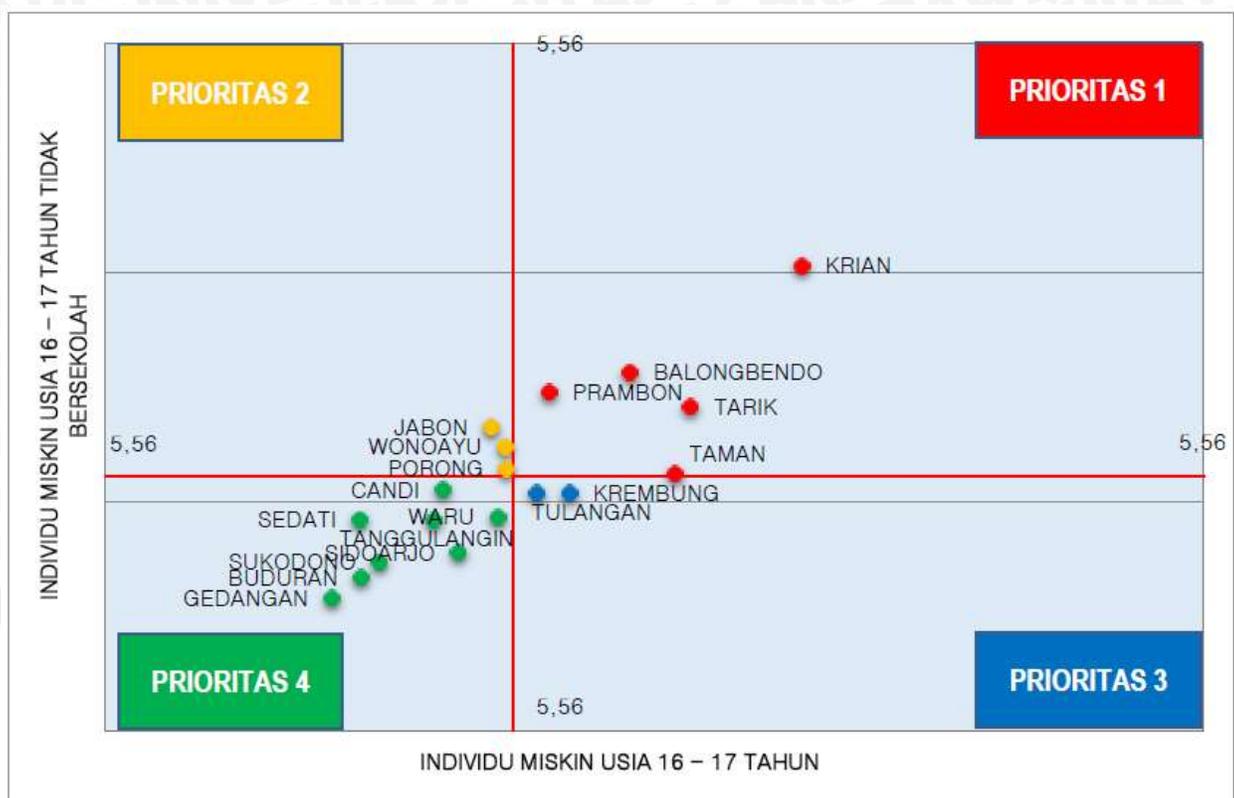
2. Penduduk Miskin Usia 13 -15 Tahun Tidak Bersekolah

Gambar 4.11. Prioritas Bagi Penduduk Miskin Usia 13 - 15 Tahun Tidak Bersekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



3. Penduduk Miskin Usia 16 - 17 Tahun Tidak Bersekolah

Gambar 4.12. Prioritas Wilayah Bagi Penduduk Miskin Usia 16- 17 Tahun Tidak Bersekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

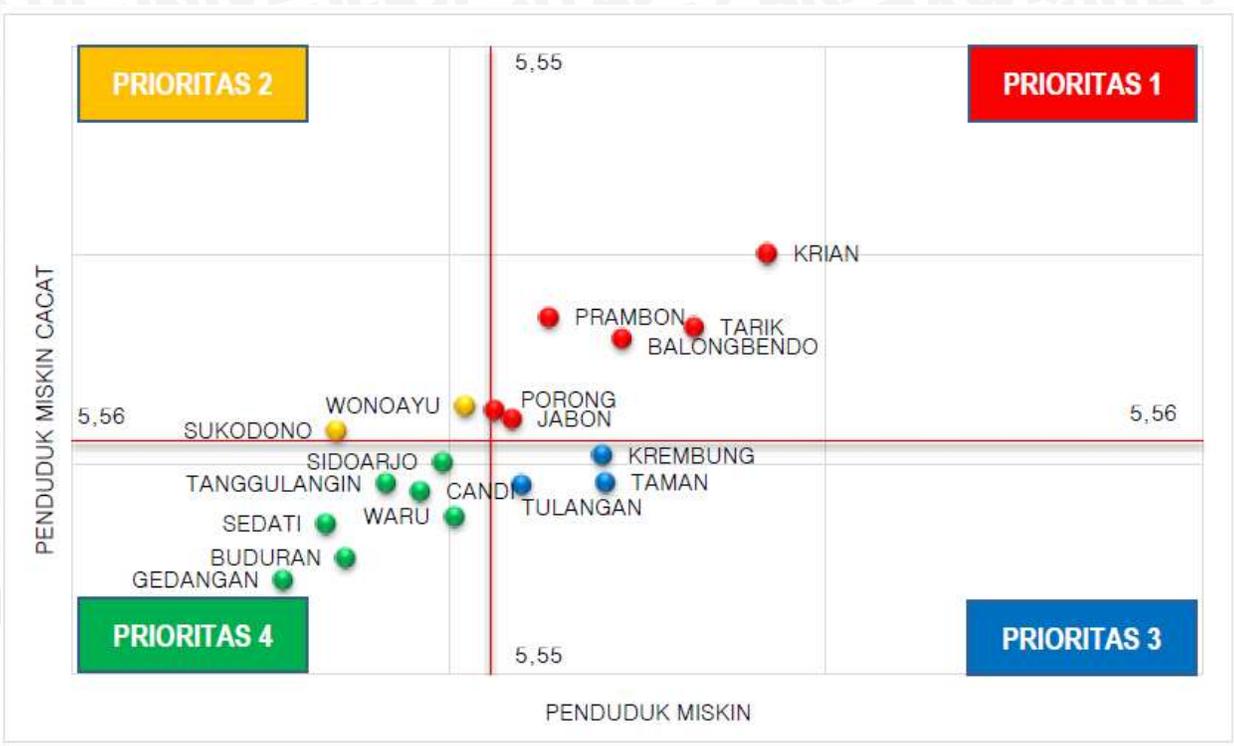


## 2. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan

Penduduk Miskin Cacat

Gambar 4.13 Prioritas Wilayah Intervensi Kebijakan Bidang Kesehatan Penduduk

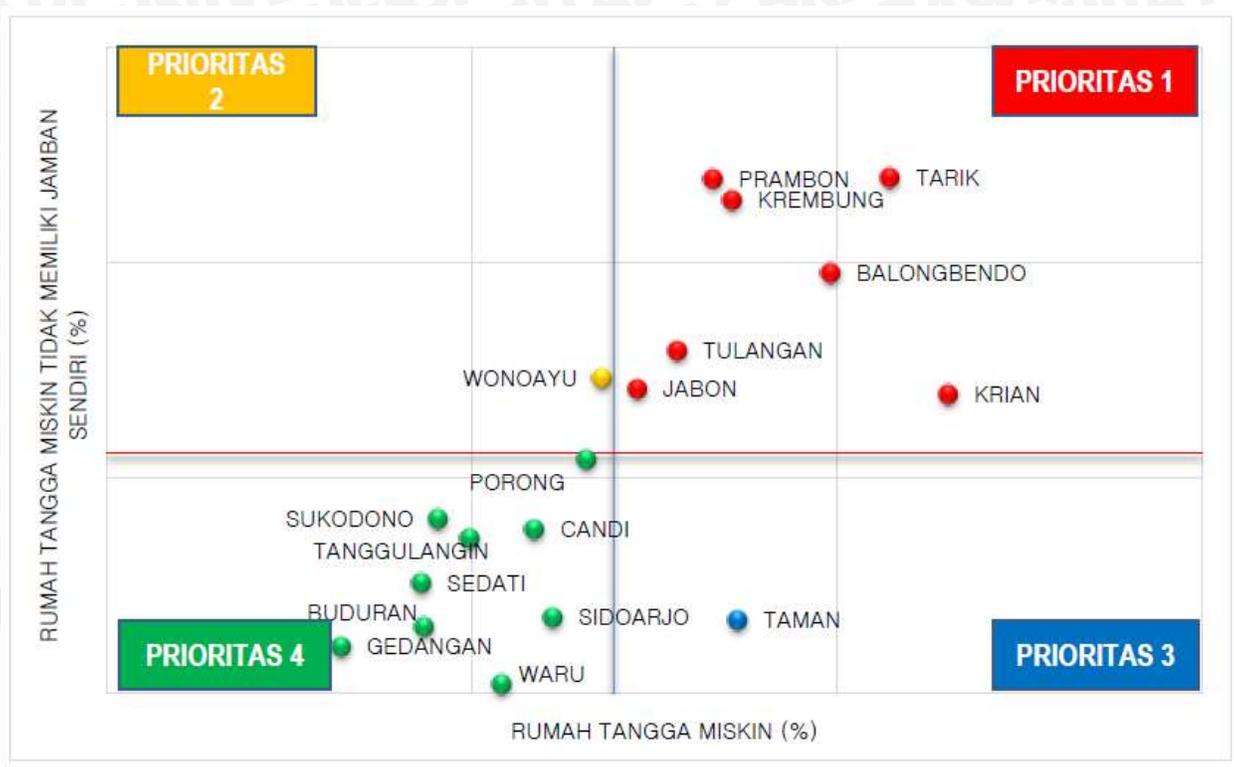
Miskin Cacat di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



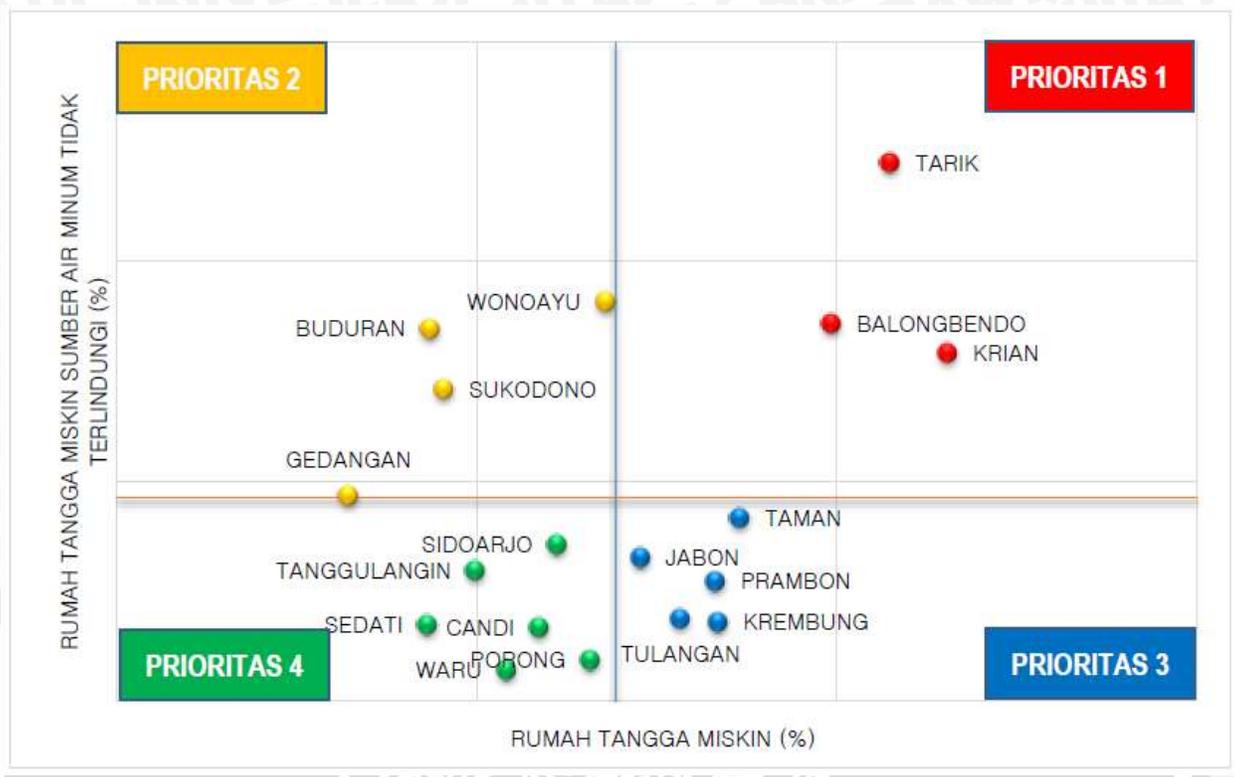
### 3. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

Adapun salah satu dampak adanya TKPK adalah dengan adanya prioritas wilayah pada bidang infrastruktur dasar. Karena bidang infrastruktur dasar penting dalam mengendalikan kemiskinan. Dengan adanya infrastruktur dasar yang baik dan terpenuhi, maka masyarakat miskin akan mendapatkan kemudahan akses untuk tidak berada pada daerah yang terisolasi dan kumuh. Berikut adalah gambar prioritas wilayah pada bidang infrastruktur dasar yang dibuat oleh TKPK Kabupaten Sidoarjo.

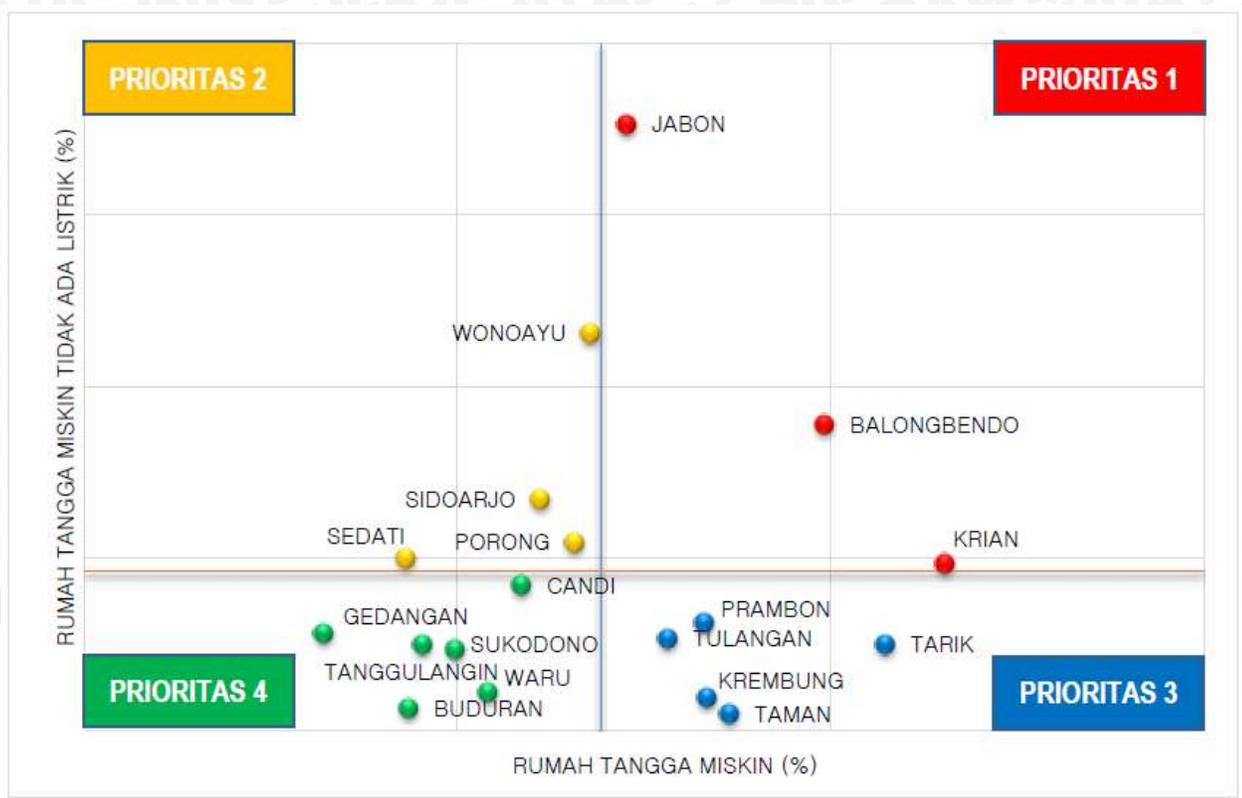
Gambar 4.14. Prioritas Wilayah Program Pembangunan Fasilitas Buang Air Besar Milik Sendiri Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



Gambar 4.15. Prioritas Wilayah Program Akses Air Minum Bersih Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

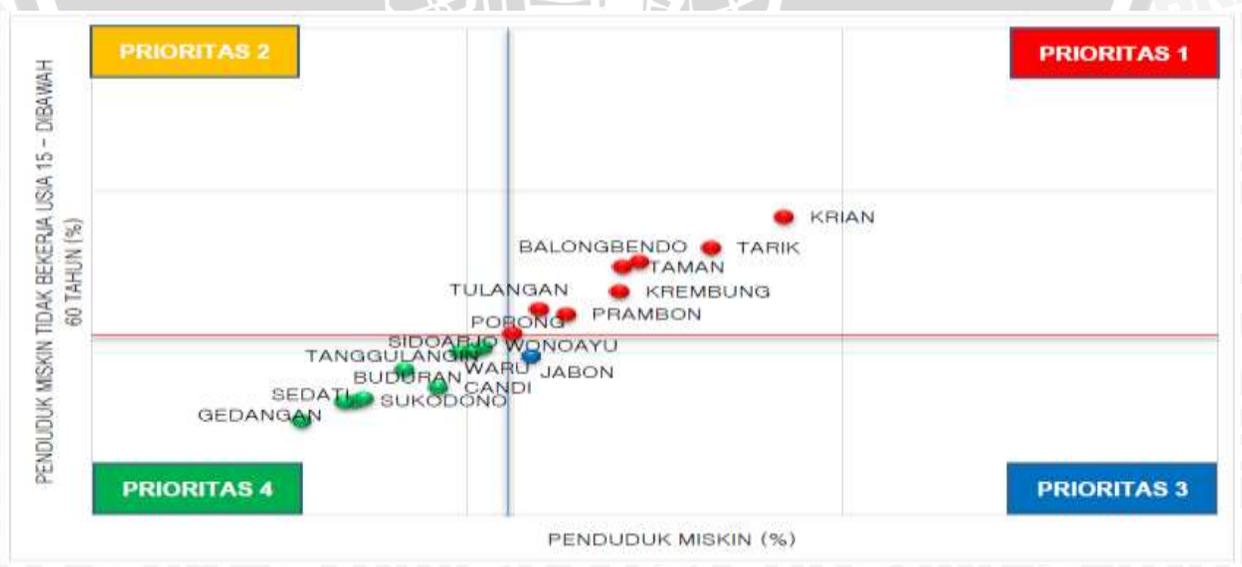


Gambar 4.16. Prioritas Wilayah Program Akses Penerangan Utama Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



4. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

Gambar 4.17 Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan Penurunan Angka Pengangguran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



## 2) TKPK Dalam Penyusunan Anggaran Yang Efektif Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Keberadaan TKPK juga berdampak pada penyusunan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Sehingga tidak terjadi pemborosan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.4. Dana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Jumlah
1	2008	96.105.198.550
2	2009	252.986.272.765
3	2010	46.723.988.830

Sumber: Dokumen LP2KD TKPK Tahun 2012

Melihat pada tabel diatas sebelum pembentukan TKPK, bahwa dana penanggulangan kemiskinan di Tahun 2008 dan 2009 mengalami pemborosan. Memang ada penurunan yang cukup tajam pada tahun 2009 berdasarkan data perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dari Dokumen LK2KD TKPK tahun 2014 sebesar dari tahun 2008 sebesar 8,67 menjadi tahun 2009 sebesar 6,91. Akan tetapi justru pada tahun 2009 menuju 2010 mengalami peningkatan angka kemiskinan. Bahkan jika dikalikan dua kali lipatnya anggaran tahun 2010 (TKPK terbentuk) hasil anggarannya tidak sebesar tahun 2009. Adapun pernyataan dari Bapak Ardi Anindita pada wawancara tanggal 3 Agustus 2015 yaitu:

“Jadi di tahun 2008 sama 2009 itu TKPK belum terbentuk. Dan belum ada suatu tim yang diposisikan khusus yang bertugas sebagai tim yang mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Sidoarjo. Anggaran tadi bisa membengkak

karena kurang tertatanya kinerja tim secara teknis bagaimana suatu penanggulangan kemiskinan yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan di Sidoarjo. Dari segi teknis pembuatan prioritas wilayah juga tidak spesifik yang TKPK buat. Penanggulangan kemiskinan lebih cenderung ke pemberian bantuan langsung tunai. Jadi penggunaan anggaran menjadi tidak efisien dan kurang efektif.”

Dari hal inilah maka peranan TKPK Kabupaten Sidoarjo sebagai tim penanggulangan kemiskinan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap penyusunan anggaran untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

TKPK mendapatkan dana dari APBD Kabupaten Sidoarjo untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Dana APBD untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kelola langsung oleh Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo yang kemudian disalurkan kepada SKPD yang bersangkutan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo sesuai bidangnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ardi Anindita 3 Agustus 2015:

“Jadi gini, dana asal TKPK itu kan dari APBD Sidoarjo. Nah dari situ kita kelola, dan kita buat susunan anggaran sehingga anggarannya bisa merata sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Pembuatan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ini juga kita lihat dulu apa program yang mereka punya untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Sidoarjo, selain itu juga dilihat dari banyaknya rumah tangga miskin yang ada di lapangan yang masuk di setiap program-program tersebut.”

Pada pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lapangan yang melaksanakan adalah SKPD yang bersangkutan pada bidangnya masing-masing, Berikut adalah komposisi anggaran yang dikoordinasikan oleh Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo kepada SKPD yang bersangkutan:

- a. Komposisi Anggaran Belanja Sektor

Gambar 4.18 Komposisi Belanja Sektoral Terhadap Anggaran di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



Sumber Data: Dokumen LP2KD TKPK Kabupaten Sidoarjo 2014

Di tahun 2013, sektor kesehatan dan perumahan fasilitas umum adalah dua sektor yang memperoleh bagian terbesar dari anggaran belanja daerah. Tiga sektor lainnya yaitu sektor ekonomi, pendidikan, pelayanan umum, serta lingkungan hidup menempati prioritas berikutnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Distribusi anggaran tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan RPJMD 2010-2015 tahun ke-3 Kabupaten Sidoarjo. Dengan pembagian anggaran seperti ini diharapkan SKPD teknis mampu mengalokasikan dengan baik.

#### b. Anggaran Belanja Menurut Urusan dan Fungsi Pemerintahan

##### 1) Bidang Pendidikan

Tabel 4.6 Anggaran Belanja Sektoral Menurut Urusan Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013

Kode	Sektor	Jumlah (Rp)	Persen
10.1.01	Pendidikan	227.859.485.111,89	93,21
10.1.18	Kepemudaan dan Olahraga	13.731.806.300,00	5,62
10.1.26	Perpustakaan	2.876.178.900,00	1,18
Total Kabupaten		244.467.470.311,89	100

Sumber: Dokumen LP2KD TKPK kabupaten Sidoarjo tahun 2014

## 2) Bidang Kesehatan

Tabel 4.6 Anggaran Belanja Sektoral Menurut Urusan Kesehatan di Kabupaten

Sidoarjo Tahun Anggaran 2013

Kode	Sektor	Jumlah (Rp)	Persen
7.1.02	Kesehatan	332.789.811.189,66	98,93
7.1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3.605.923.463,00	1,07
Total Kabupaten		336.395.734.652,66	100

Sumber: Dokumen LP2KD TKPK kabupaten Sidoarjo tahun 2014

## 3) Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum

Tabel 4.7 Anggaran Belanja Sektoral Menurut Urusan Perumahan dan Fasilitas

Umum di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013

Kode	Sektor	Jumlah (Rp)	Persen
6.1.03	Pekerjaan Umum	375.419.062.614,00	84,75
6.1.04	Perumahan	67.543.789.155,00	15,25
Total Kabupaten		442.962.851.769,00	100

Sumber: Dokumen LP2KD TKPK kabupaten Sidoarjo tahun 2014

## d) Bidang Ekonomi

Tabel 4.8 Anggaran Belanja Sektor Menurut Urusan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2013

Kode	Sektor	Jumlah	Persen
4.1.07	Perhubungan	20.462.582.609,00	16,37
4.1.14	Ketenagakerjaan	6.741.656.000,00	5,39
4.1.15	Koperasi dan usaha Kecil menengah	6.300.790.386,00	5,04
4.1.16	Penanaman modal	4.087.725.300,00	3,27
4.1.22	Pemberdayaan masyarakat desa	8.097.258.050,00	6,48
4.2.01	Pertanian	11.880.127.774,00	1,42
4.2.02	Kehutanan	282.687.500,00	0,23
4.2.03	Energi dan sumberdaya manusia	1.769.786.400,00	1,42
4.2.05	Kelautan dan perikanan	41.856.029.520,00	33,48
4.2.06	Perdagangan	18.376.845.606,00	14,70
4.2.07	Industri	4.602.051.600,00	3,86
4.2.08	Ketransmigrasian	561.000.000,00	0,45
	<b><u>Total kabupaten</u></b>	<b><u>125.018.540.745,00</u></b>	<b><u>100</u></b>

Sumber: Dokumen LP2KD TKPK kabupaten Sidoarjo tahun 2014

### 3) TKPK Melakukan Koordinasi dan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Dalam melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, peneliti mengambil salah satu contoh program yaitu Program rehab Rumah dan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2). TKPK berkoordinasi dengan BPMPKB selaku SKPD teknis dalam pelaksanaan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya terdapat P3M yang letaknya tidak jauh dari sekretariat TKPK Kabupaten Sidoarjo. P3M berfungsi sebagai penghimpun laporan dari masyarakat jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni oleh TKPK Kabupaten Sidoarjo. TKPK juga melakukan pemantauan kedua program tersebut. Dari hasil penelitian yang dihimpun oleh peneliti, pelaksanaan pemantauan biasanya dilaksanakan di pagi hari pukul 7.00. Berikut akan dibahas mengenai kedua program yang dipilih oleh peneliti, yaitu:

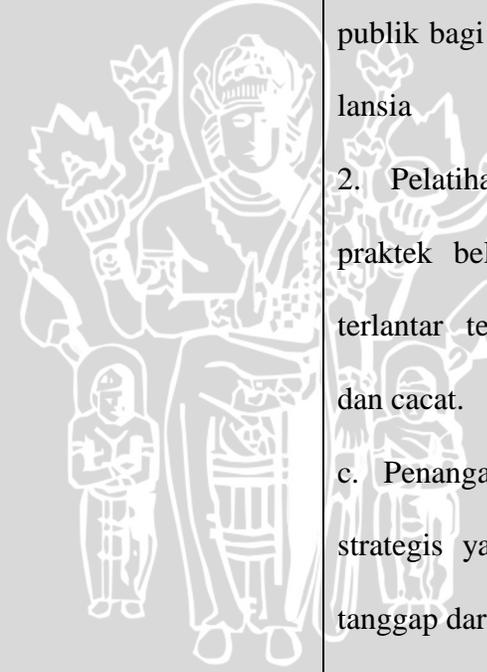
#### (a) Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Pelaksanaan prioritas bidang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten Sidoarjo melalui SKPD yang bersangkutan. Setiap SKPD mempunyai program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Diantaranya:

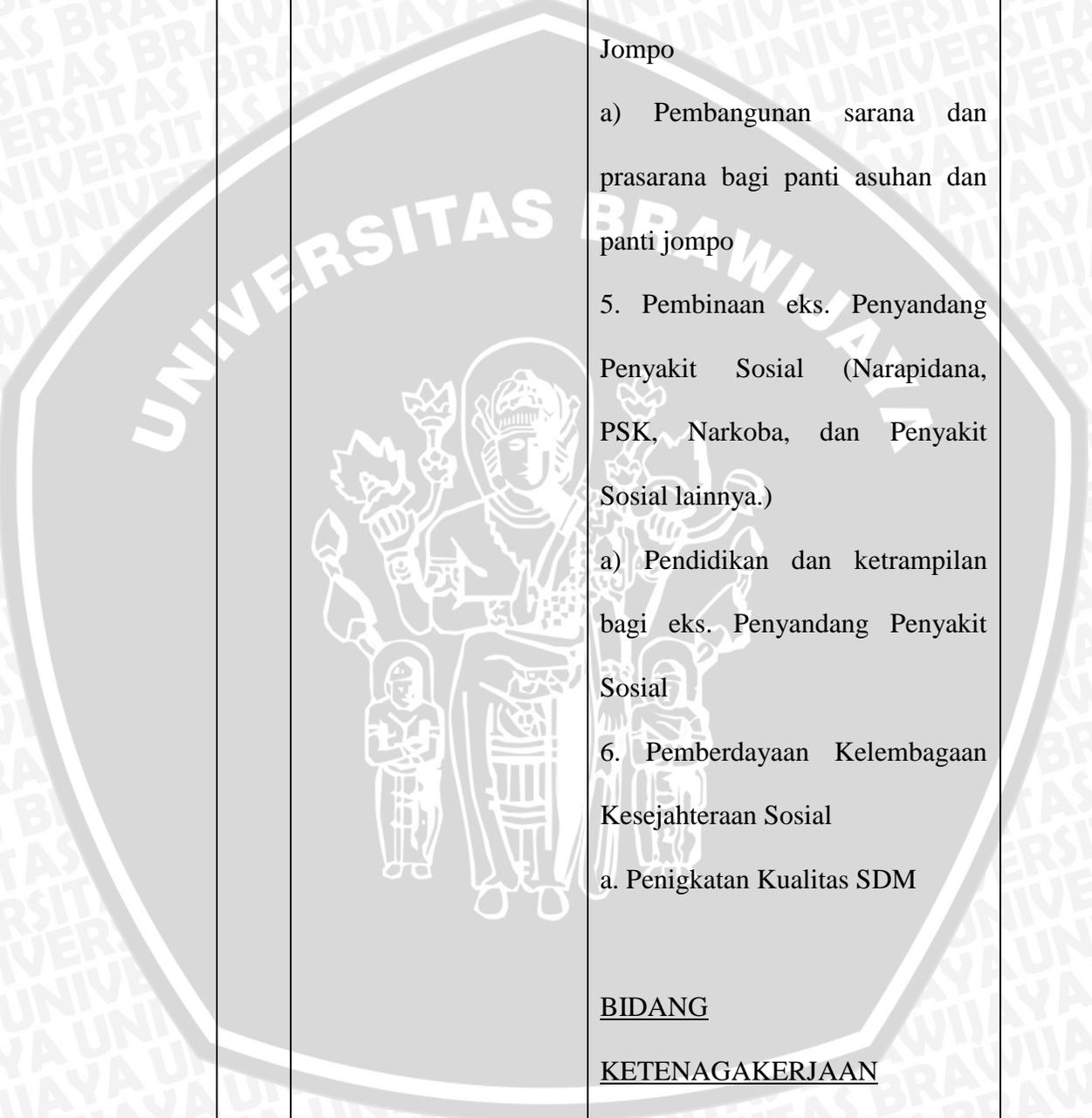
Tabel 4.9 Program Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kabupaten Sidoarjo

NO.	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM
1.	BPMPKB	Pelayanan Kontrasepsi : Pengadaan alat kontrasepsi

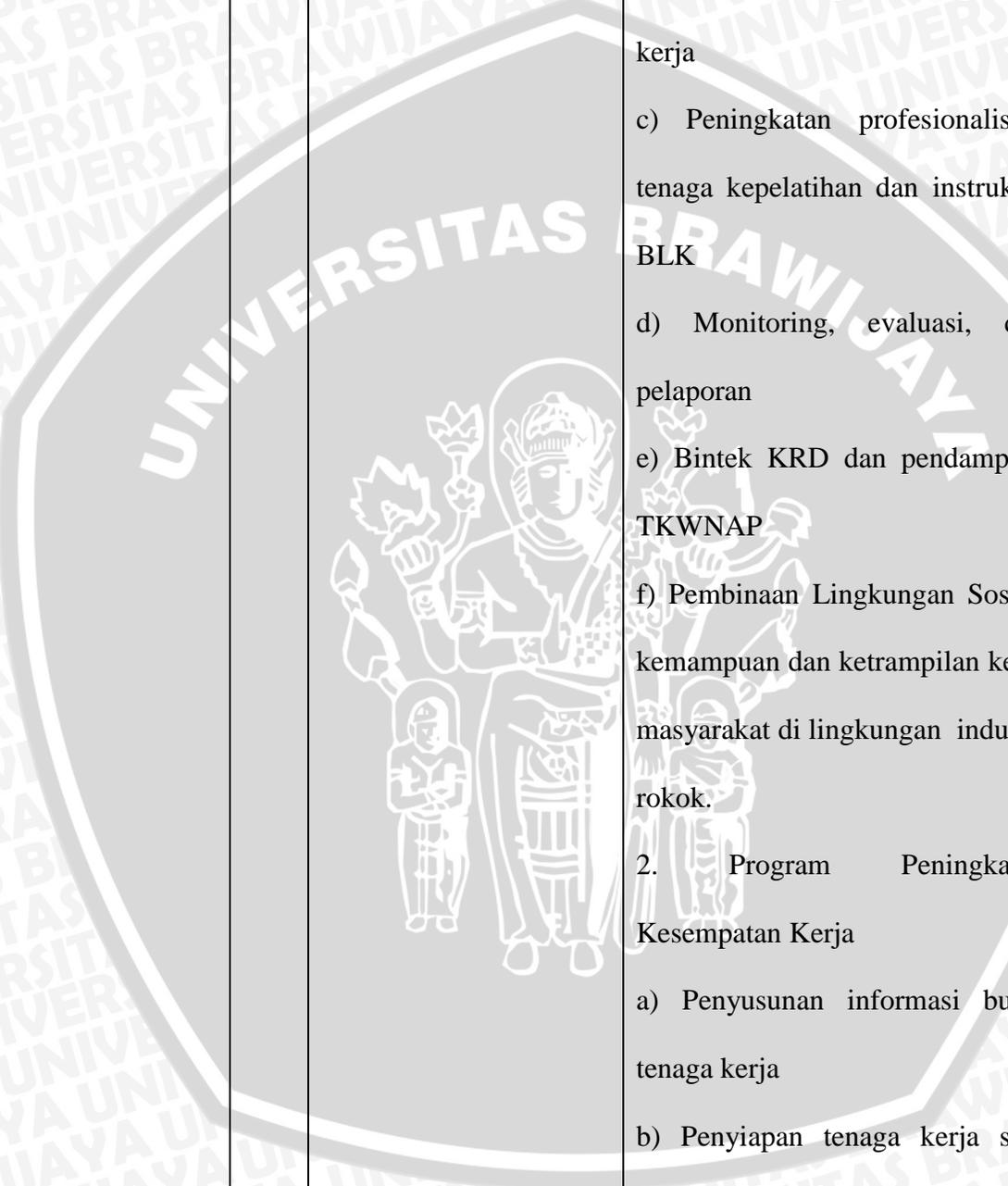
		<p>Akselerasi Posyandu</p> <p>Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin</p> <p>UPPKS</p> <p>PNPM – MP : Tridaya</p> <p>PNPM – MPKT : Tridaya</p> <p>Rehab Rumah</p> <p>Gerdu Taskin</p> <p>P3EL</p>
<p>2.</p>	<p>Dinsosnaker</p> 	<p><u>BIDANG SOSIAL</u></p> <p>1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.</p> <p>a) Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KTA dan penyandang kesejahteraan sosial (PMKS)</p> <p>b) Pelatihan keterampilan</p>

		<p>berusaha bagi keluarga miskin</p> <p>c) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</p> <p>2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a) Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia</p> <p>2. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan dan cacat.</p> <p>c. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tepat tanggap darurat dan luar biasa</p> <p>d. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum, bagi nkorban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.</p> <p>3. Pembinaan Anak Terlantar</p>
--	---	---



		<p>a) Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar</p> <p>4. Pembinaan Panti Asuhan dan Jompo</p> <p>a) Pembangunan sarana dan prasarana bagi panti asuhan dan panti jompo</p> <p>5. Pembinaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya.)</p> <p>a) Pendidikan dan ketrampilan bagi eks. Penyandang Penyakit Sosial</p> <p>6. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. Penigkatan Kualitas SDM</p> <p><b><u>BIDANG</u></b></p> <p><b><u>KETENAGAKERJAAN</u></b></p> <p>1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</p>
--	---	---



		<p>a) Penyusunan data base tenaga kerja daerah</p> <p>b) Diklat ketrampilan bagi pencari kerja</p> <p>c) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK</p> <p>d) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan</p> <p>e) Bintek KRD dan pendamping TKWNAP</p> <p>f) Pembinaan Lingkungan Sosial, kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri rokok.</p> <p>2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>a) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja</p> <p>b) Penyiapan tenaga kerja siap pakai</p> <p>c) Pemberian kesempatan kerja</p>
--	---	---



		<p>3. Progran Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja</p> <p>a) Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja</p> <p>b) Fasilitas penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial</p> <p>c) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan</p> <p>d) peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja</p>
<p>3.</p>	<p>Badan Ketahanan Pangan</p>	<p>Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>a) Pemanfaatan lahan pekarangan</p> <p>b) penanganan daerah rawan pangan</p>
<p>4.</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>1. Dana block grand</p> <p>2. Penanganna kasus balita gii buruk, balita BGM Gakin, dan</p>



		<p>bumil KEK Gakin</p> <p>3. Pemberian kacamata pada anak sekolah</p> <p>4. Program makanan tambahan anak sekolah</p> <p>5. Pap Smear</p> <p>6. Penanggulangan TB – Paru</p>
<p>5.</p>	<p>Dinas Pertabunaken</p> 	<p>1. Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>a) Pelathian petani dan pelaku agribisnis</p> <p>2. Pembangunan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian</p> <p>a) Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian</p> <p>3. Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Pertanian</p> <p>4. Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan</p> <p>a) Pengambanagn agribisnis peternakan</p> <p>b) Pembangunan Sarana</p>



		prasarana Pembibitan Ternak
6.	Dinas Pendidikan	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan pemberian BKSM bagi siswa SMA, SMK, SMALB, MA-NdanS
7.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag, dan ESDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkuatan Permodalan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyaluran dana bergulir</li> </ol> </li> <li>2. Program Pengembangan Kapasitas IPTEK             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pelatihan pengembangan sistem teknologi industry</li> </ol> </li> <li>3. Peningkatan Pasar             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pasar Murah</li> </ol> </li> <li>4. Pengembangan Kewirausahaan UKM             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengembangan Kewirausahaan UKM Pemula</li> </ol> </li> </ol>
8.	PU Cipta Karya & Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembalian perumahan</li> <li>2. Lingkungan sehat perumahan</li> </ol>
9.	Bagian Administrasi Kesra&Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan bantuan masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan dan</li> </ol>

		masalah sosial lainnya. a) Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi OPK Raskin
10.	Bagian Administrasi Pembangunan	Pemberian hibah dana Pembangunan Partisipatif
11.	RSUD	1. Jaminan Kesehatan Masyarakat 2. Bantuan Keluarga Miskin

Sumber; Dokumen LP2KD TKPK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011

Realisasi pelaksanaan program dan capaian kinerja belum semuanya dilaporkan, karena sebagian masih dalam proses pelaksanaan. Namun, dari semua program penanggulangan kemiskinan, peneliti memilih untuk menyajikan data mengenai hasil pelaksanaan rumah tidak layak huni oleh BPMPKB. Pelaksanaan program rumah tidak layak huni juga didukung dari partisipasi masyarakat yaitu dengan melaporkan jika mengetahui bahwa ada rumah yang membutuhkan penanganan rehab rumah.

Partisipasi masyarakat didukung oleh pelayanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dipusatkan di P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik berupa kebijakan pembangunan, informasi maupun kritik yang membangun. Hal ini didukung oleh wawancara dari Bapak Ardi Anindita Tanggal 3 Agustus 2015:

“Masyarakat sendiri bisa ikut berpartisipasi untuk mengurangi angka kemiskinan di Sidoarjo. Kan Kita juga ada kerjasama ya semacam dukungan

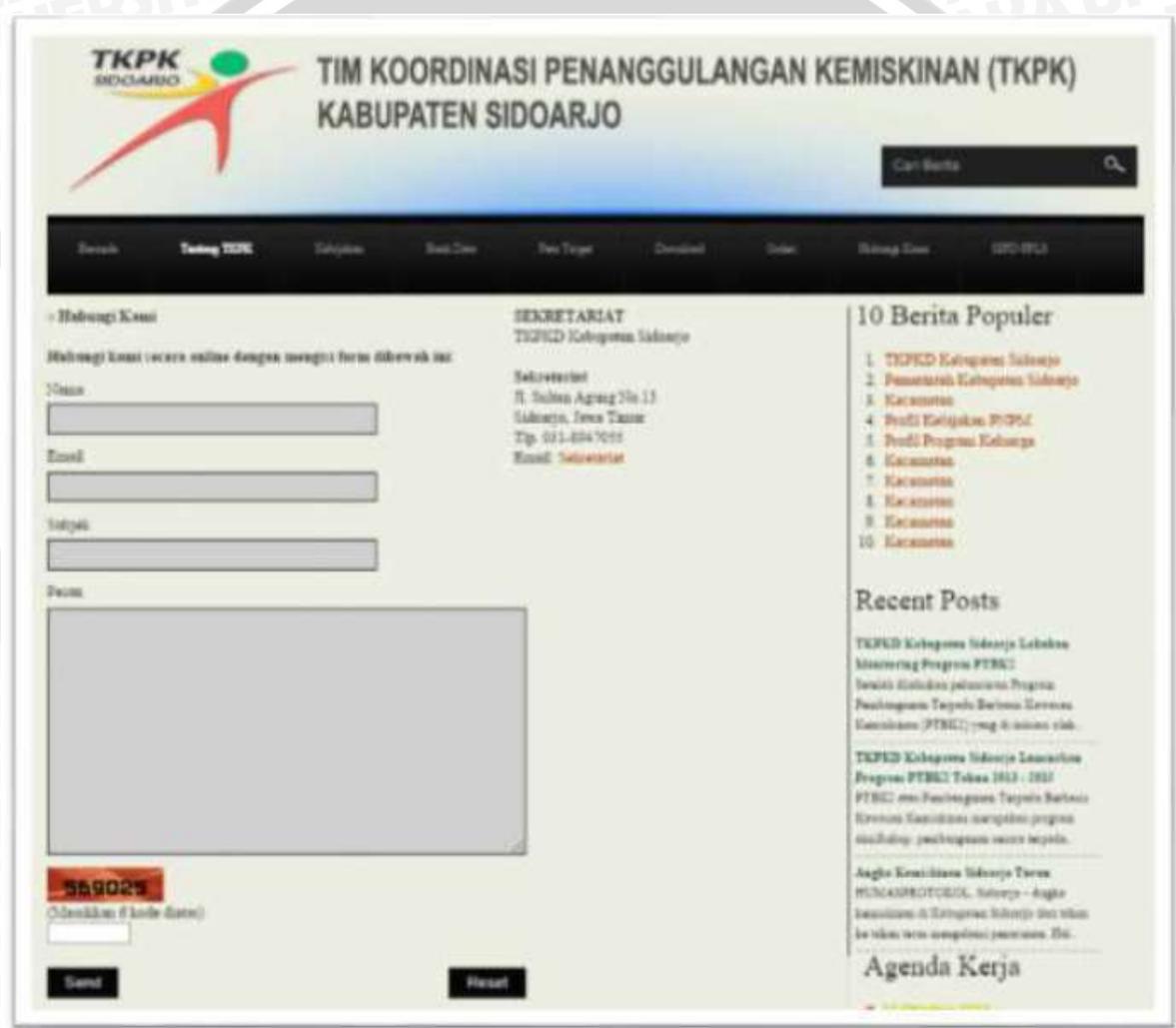
dari P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) Tempatnya nggak jauh dari sini. Satu lahan. Jadi kita gampang untuk mencari info, ya cepatlah untuk dapat info mengenai data masyarakat yang membutuhkan bantuan rehab rumah”

Pelayanan Pengaduan merupakan pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menekan dan mengurangi berbagai kendala atau permasalahan khususnya dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang di luncurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Masyarakat dapat mengadukan segala permasalahannya kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui media tersebut, tidak saja permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, tetapi juga semua aspek pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Disamping mengadukan permasalahan, masyarakat juga diharapkan memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun daerah, baik secara terpisah maupun menyeluruh. Dari media ini, masyarakat dapat langsung mengirimkan permasalahan, kritik dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sekaligus dapat melihat jawaban atau respon atas keluhan, kritik dan saran tersebut.

Saat ini Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo melalui Sekretariat yang berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki website sendiri yang beralamatkan di <http://www.tkpkd.sidoarjokab.go.id> yang didalam content-nya juga terdapat formulir pengaduan secara online atas program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga tanggapan, keluhan, saran, dan masukan terhadap program atau kegiatan dapat lebih fokus dan efektif penanganannya. Berikut ini ditampilkan contoh pengaduan masyarakat tentang

program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui website resmi TKPKD Kabupaten Sidoarjo :

Gambar 4.19. Formulir Online Pengaduan Masyarakat Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo Melalui Website Resmi



Berikut contoh detail pengaduan yang sudah dipublikasikan:

Kode Pengaduan : 02010110001

Nama Pelapor : Ibu. Nur

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : -

Telepon : -

Fax : -

Pekerjaan : Wiraswasta

Email : -

Tanggal Pengaduan : 2 November 2010

Tanggal Pengaduan Dicatat : 2 November 2010

Subjek : Rumah tak layak huni

Uraian Pengaduan : Ada salah satu warga menempati rumah tidak layak huni, nama pemilik rumah tersebut adalah: Bapak Supatno usianya sekitar 48 tahunan salah satu warga kami di di wilayah Kmp. Wates Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo. Kondisi ini kami sampaikan lewat pengaduan P3M dengan harapan agar instansi yang terkait dan berwenang bisa melihat langsung survey ke lapangan dan dapat kiranya menindaklanjuti agar memp[eroleh bantuan Program rehab Rumah. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Media Pengaduan : Telepon

Petugas Pencatat : Agus Kuswara

Respon Pengaduan : Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan keluarga Berencana

Tanggal Respon : 10 November 2010, Jam 11:41

Subjek Respon : Rumah tidak layak huni

Isi respon : Sebelumnya kami haturkan

Terimakasih kepada Ibu Nur yang telah memberi informasi ke BPMPKD, setelah kami cek ke lapangan bahwa bapak Supatno yang ibu maksud tidak ada, yang ada bapak Supatmo umur 48 tahun alamat di Jl. Dr. SUTomo III RT 04 RW 02 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo. Kalau yang ibu maksud adalah bapak Supatmo ini memang setelah kami survey layak untuk dibantu. Karena untuk pelaksanaan Rehab rumah tidak layak huni untuk tahun 2010 sudah dilaksanakan maka rumah bapak Supatmo akan direhab tahun 2011. Demikian informasi dari kami terimakasih.

Dijawab hari ke : 7

Bakohumas : Ernawati Br Tanggung, S.sos

Kelayakan Publikasi : Layak Di publikasikan Pada tanggal 18 November 2010

(Sumber: Dokumen Laporan Kinerja TKPK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011)

Tabel 4.10. Penerima bantuan program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di 19 Kecamatan di Kavupaten Sidoarjo:

NO	KECAMATAN	NAMA DAN ALAMAT YANG SUDAH MENDAPATKAN HIBAH TAHUN 2013			
		No	NAMA	ALAMAT	RT/RW
1	WARU	1	PURWANTO	WEDORO	RT.001 RW.005
		2	CATUR ENDANG P.	BUNGURASIH	RT.003 RW.003
	TOTAL	2			
2	SEDATI	1	SUPARNO	PEPE	RT.001 RW.001
		2	RIAMIN	KALANGANYAR	RT.021 RW.005
	TOTAL	2			
3	KRIAN	1	NASIKAH	SIDOMULYO	RT.004 RW.004
		2	M.ARIF	SIDOMULYO	RT.004 RW.004
		3	SAMPUNAH	GAMPING	RT.004 RW.001

		4	RUSMAN	JERUKGAMPING	RT.004 RW.001
		5	NGATENO	JERUKGAMPING	RT.003 RW.002
	TOTAL	5			
4	TARIK	1	KEMINAH	KEMUNING	RT.022 RW.004
	TOTAL	1			
5	TAMAN	1	UMI KULSUM	KEDUNGTURI	RT.010 RW.004
		2	ABD. WAHAB	KEDUNGTURI	RT.010 RW.004
		3	LILIS SULISTYOWATI	KEDUNGTURI	RT.026 RW.004
		4	ABD. KHOLIL	SEPAJANG	RT.011 RW.006
		5	DUNUN	TANJUNGSARI	RT.004 RW.005
		6	KUSAIRI	TANJUNGSARI	RT.005 RW.001
		7	PAIJAH	KRAMBANGAN	RT.014 RW.003
		8	LAMIRIN	KALIJATEN	RT.010 RW.002
	TOTAL	8			
6	JABON	1	ISMAIL HUDA	KEBOGUYANG	RT.003 RW.001
		2	K. KHOTIMAH	KEBOGUYANG	RT.002 RW.006
		3	KASIADI	KUPANG	RT.003 RW.003
		4	SAMSUDI	KUPANG	RT.003 RW.003
	TOTAL				
7	TANGGULANGIN	1	WAKIRIN	KLUDAN	RT.003 RW.001
		2	INGGAH SUSANTO	KLUDAN	RT.002 RW.001
	TOTAL				

<b>8</b>	WONOAYU	1	MANSYUR	KARANGPURI	RT.004 RW.003
		2	SRI RETNO FAUJIA	JABARANKULON	RT.002 RW.001
	TOTAL				
<b>9</b>	TULANGAN	1	JAIDUL ROCHMAN	KAJEKSAN	RT.009 RW.002
	TOTAL				
<b>10</b>	GEDANGAN	1	KUDORI	GEMURUNG	RT.001 RW.003
		2	SUPARMAN	GEMURUNG	RT.003 RW.004
	TOTAL				
<b>11</b>	PRAMBON	1	KARTAJAB	KEDUNGSOLO	RT.004 RW.002
		2	KASUMI	TEMU	RT. 001 RW.004
		3	SUYANTO	KAJARTRENGGULI	RT. 004 RW.002
		4	LEGIRAN	KAJARTRENGGULI	RT. 005 RW.001
		5	ISWANTO	BENDOTRETEK	RT. 001 RW.001
		6	DJUMAATI	BENDOTRETEK	RT. 005 RW.001
		7	SUEB	WIROBITING	RT. 004 RW.001
		8	WAHYUDI	KEDUNGKEMBAR	RT. 004 RW.001
		9	MOCH. TOHIR	KEDUNGKEMBAR	RT. 002 RW.003
		10	KARMANI	KEDUNGKEMBAR	RT. 005 RW.001
		11	SEGER	BULANG	RT. 006 RW.001
		12	WIWID	JATIALUNALUN	RT. 006 RW.001

					RW.001 RT. 001 RW.004 RT. 004 RW.001 RT. 005 RW.002
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>			
12	BADURAN	1	GUNARTO	BJN. KEMANTREN	RT. 001 RW.001
		2	WAHYUDI	BJN. KEMANTREN	RT. 001 RW.001
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>			
13	CANDI	1	SULAMI	TRENGGULUNAN	RT. 018 RW.007
		2	MUJADI	TRENGGULUNAN	RT. 013 RW.005
		3	SAMSURI	SUGIHWARAS	RT. 014 RW.004
		4	ISMADI	KALIPECABEAN	RT. 013 RW.003
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>			
14	KREMBUNG	1	NANANG SETYO	KERET	RT. 009 RW.003
		2	ABU BAKAR	WONOMLATI	RT. 008

					RW.004
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>			
15	PORONG	1	EKOPURWANDI	WUNUT	RT. 013 RW.002
		2	KARTINI	WUNUT	RT. 024 RW.004
		3	ABDUL HADI	KEDUNGSOLO	RT. 005 RW.001
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>			
16	SIDOARJO	1	M. RIDWAN	SUKO	RT. 006 RW.001
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>			
17	SUKODONO	1	SUDARMADJI	PADEMONEGORO	RT. 006 RW.001
		2	SAMA'I	PADEMONEGORO	RT. 006 RW.001
		3	SUKADI	BANGSRI	RT. 006 RW.001
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>			
18	BALONGBENDO	1	SULIAH	SIKALAN	RT. 006 RW.001
		2	SEMI	BOGEMPINGGIR	RT. 006 RW.001
		3	WAHYUDI NUGROHO	BOGEMPINGGIR	

	4	BASUKI	BOGEMPINGGIR	RT. 006
	5	SUMADI	GGG. KEPUHSARI	RW.001
	6	SITUN	SEKETI	RT. 006
				RW.001
				RT. 006
				RW.001
				RT. 006
				RW.001
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>			

Sumber: Dokumen Rehab Rumah Tidak Layak Huni BPMPKB 2013

Berikut tanggapan masyarakat mengenai bantuan kemiskinan melalui program rehab rumah tidak layak huni oleh TKPK Kabupaten Sidoarjo yang bekerja sama dengan BPMPKB selaku SKPD yang terkait dengan program rehab rumah tidak layak huni. Banyak dari masyarakat lebih memberikan saran untuk pelaksanaan program rehab rumah tersebut. Diantaranya:

“Program rehab rumah bagus mbak untuk masyarakat miskin. Kan bantuan berupa tempat tinggal yang layak itu lebih efektif daripada bantuan tunai kasih-kasih uang. Karena kan nggak tau uangnya dipakai untuk keperluan apa. Kalau ada program rehab rumah kan bisa langsung tepat uangnya untuk membuat sebuah tempat tinggal yang layak. Tempat tinggalnya kan juga bisa dimanfaatkan untuk jualan misalnya gorengan atau sekedar rokok dan kopi yang biasa-biasa aja. Lebih bermanfaat dari TKPK sendiri tinggal memberi motivasi ke masyarakat yg menerima bantuan rehab rumah ini untuk berdaya aja supaya masyarakat miskin sasaran sadar akan pentingnya memanfaatkan peluang. Kan sudah ada rumah juga termasuk peluang. Mereka kan juga bisa mengajukan permintaan bantuan modal atau hanya pinjaman kecil-kecilan ke Pemerintah Sidoarjo.”

(Masyarakat Sidoarjo)

“Kalo tanggapan soal rehab rumah sih untuk TKPK dan SKPD nya BPMPKB saya lebih ke agar memastikan bahwa apakah rumah tidak layak huni tersebut rumah benar-benar milik warga itu atau bukan. Karena jangan sampai yang TKPK dan

BPMPKB rehab itu adalah rumah kontrakan aatau rumah yang dibangun tanpa ada surat kepemilikan rumahnya. Seperti itu aja sih.”

(Masyarakat Sidoarjo)

“Program rehab rumah di Kabupaten Sidoarjo menurut saya sih setidaknya alokasi dana nya bisa lebih terarah jadi digunakan untuk kegiatan yang menurut saya ni kegiatan yang tepat sasaran. Karena yang dibutuhkan masyaakat yang miskin memang tempat tinggal terlebih lagi tempat tinggal yang beratap.”

(Masyarakat Sidoarjo)

“Kalau saya setuju mbak sama program rehab rumah begini ini. Karena dengan begitu bantuannya kan langsung ada wujudnya. Jai nggak bisa diselewengkan sama masyarakat. Kalau bantuan sembako atau uang tunai kan kadang ada masyarakat yang tidak miskin mengaku miskin. Kalau rumah kan dengan bentuknya saja kita bisa tau itu rumah layak untuk mendapatkan bantuan atau enggak”

(Masyarakat Sidoarjo)

Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat mengenai program rehab rumah di Kabupaten Sidoarjo, masyarakat lebih setuju dengan adanya program bantuan rehab rumah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Program rehab rumah dinilai efektif dibandingkan dengan pemberian bantuan langsung tunai. Selain itu, tempat tinggal yang layak diharapkan didukung dengan pelatihan motivasi-motivasi ketrampilan agar masyarakat bisa memanfaatkan tempat tinggalnya tersebut untuk bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi dari TKPK dan SKPD teknis yaitu BPMPKB sendiri bisa lebih memberikan dorongan berupa motivasi dan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat terlebih untuk masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan rehab rumah dan memiliki tempat tinggal yang layak. Namun, ada juga masyarakat yang kurang setuju dengan adanya program Rehab Rumah Tidak Layak Huni ini, berikut wawancaranya:

“Saya kira program rehab rumah itu tidak efektif mbak, selain itu kan material biayanya mahal mbak. Kalau hanya dibuatkan rumah yang layak lalu mereka tetap menagnggur tidak bekerja, ya percuma. Lebih baik membuat suatu tempat tinggal seperti rumah susun, tapi disana mereka nggak hanya tinggal. Dikasih lah

ketrampilan, diajarin usaha, diajarin kreatif bikin apa aja yang seenggaknya laku dijual dipasaran. Kan banyak limbah-limbah yang masih bisa diolah dan ada nilai jualnya. Banyak loh contoh-contoh orang yang manfaatin limbah-limbah seperti koran bekas, kertas bekas menjadi peralatan seperti kotak pensil, rak, banyak kok. Kalau saya sih lebih ke seperti itu lah kurang lebih. Bukannya nggak setuju cuma saya kan memberi saran aja mbak.”

(b) Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2)

Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2)

Merupakan Program pembangunan secara terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015 terhadap lokasi atau wilayah sasaran tertentu berbasis data dengan peringkat kemiskinan tertinggi dengan harapan intervensi-intervensi kebijakan yang meliputi kelompok-kelompok indikator program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan untuk pembuatan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014. Penurunan angka kemiskinan, peningkatan status ekonomi dan sebagai bentuk proses pembelajaran sosial kepada masyarakat secara berkelanjutan. Pembiayaan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) secara keseluruhan bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo.

“Nah pogram PTBK2 ini wilayah yang akan di tuju sesuai hasil pemetaan ada 3 pemetaan. Jabon, krebung dan tarik. Bentuk kegiatannya sesuai kalster 1,2 3. Di klaster 1 Ada rumah sehat, lalu di klaster 2 ada jamban sehat, sedankan klaster 3 itu pelatihan-pelatihan menjahit, pelatihan-pelatihan lah pokoknya. Kemudian ada klaster 3 yang usaha mikro kecil itu seperti bantuan traktor, dan bantuan di bidang pertanian biasanya. Ini programnya berlangsung sampai 2015. Ini kebijakan baru.”

Tabel 4.11. Tahap Pertama Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

NO	PROGRAM	TOTAL SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)			TOTAL ANGGARAN (Rp)
			DESA TROMPOASRI	DESA KEMUNING	DESA TAMBAK REJO	
1	RUMAH LAYAK HUNI (RLH)	237	230.000.000	560.000.000	1.580.000.000	2.370.000.000
2	JAMBAN SEHAT/LAYAK	526	350.000.000	452.500.000	512.500.000	1.315.000.000
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>763</b>	<b>580.000.000</b>	<b>1.012.500.000</b>	<b>2.092.500.000</b>	<b>3.685.000.000</b>

Tabel 4.12. Tahap Kedua Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

NO	PROGRAM	TOTAL SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)			TOTAL ANGGARAN (Rp)
			DESA TROMPOASRI	DESA KEMUNING	DESA TAMBAK REJO	
1	RUMAH LAYAK HUNI (RLH)	220	200.000.000	500.000.000	1.500.000.000	2.200.000.000
2	JAMBAN SEHAT/LAYAK	350	250.000.000	250.000.000	375.000.000	875.000.000
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>450.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>1.875.000.000</b>	<b>3.075.000.000</b>

Tabel 4.13. Tahap Ketiga Pelaksanaan Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

NO	PROGRAM	TOTAL SASARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)			TOTAL ANGGARAN (Rp)
			DESA TROMPOASRI	DESA KEMUNING	DESA TAMBAK REJO	
1	RUMAH LAYAK HUNI (RLH)	220	200.000.000	500.000.000	1.500.000.000	2.200.000.000
2	JAMBAN SEHAT/LAYAK	350	250.000.000	250.000.000	375.000.000	875.000.000
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>450.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>1.875.000.000</b>	<b>3.075.000.000</b>

Gambar 4.20. Monitoring Pelaksanaan Program Jamban Sehat PTBK2 Tahap Pertama

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013



Adapun program, kegiatan dan capaian kinerja sampai dengan Bulan Oktober tahun 2013, sebagai berikut :

A. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dibidang Pemerintahan untuk anggaran pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 2.413.610.000 dengan jumlah kepala desa yang akan diganti sebanyak 180 orang realisasi sampai bulan Oktober ini sudah dilantik 120 orang dan masih tersisa 60 orang diharapkan pada akhir tahun ini sudah selesai semuanya. Selain itu ada bantuan untuk pelantikan kepala desa sebesar Rp. 2.500.000 per orang. Untuk Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang harus diganti pada tahun 2013 berjumlah 291 lembaga. Sampai bulan Oktober ini yang belum tinggal 50 BPD dan diharapkan selesai akhir tahun ini.

Untuk penghasilan tetap perangkat desa tahun 2013 disediakan dana 62 milyar untuk untuk 322 desa dengan rincian : Kades Rp. 2.150.000 per orang, Sekretaris Desa non PNS Rp. 1.892.000 dan perangkat desa Rp. 1.720.000 khusus perangkat

desa yang terkena dampak lumpur mendapat tambahan Rp. 500.000 per orang untuk kepala desa, sedangkan sekretaris desa Rp.300.000 dan perangkat desa Rp.200.000, selain itu telah diberikan pula tunjangan purna tugas bagi Kepala Desa 10 juta rupiah per orang dan perangkat desa 5 juta rupiah per orang. Mulai tahun 2013 di Kabupaten Sidoarjo memberikan tunjangan untuk ketua RT dan ketua RW. Adapun jumlah ketua RT sebanyak 8.429 orang dan jumlah ketua RW sebanyak 2.014 orang total semuanya berjumlah 10.443. Direncanakan setiap Ketua RT/RW menerima tunjangan lebih kurang Rp100.000 per orang, dan untuk keperluan tersebut telah disediakan anggaran sebesar Rp10 miliar. Mengingat perkembangan jumlah RT/RW baru terus meningkat dan bertambah maka ke depan nantinya Ketua RT/RW diperkirakan tidak menerima tunjangan dengan nilai yang sama, akan disesuaikan dengan anggaran yang disediakan. Diharapkan pada bulan Nopember 2013 ini akan dilakukan pembayaran sekaligus 12 bulan (satu tahun) secara tuntas.

#### B. Bidang Ekonomi

Arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Sidoarjo Tahun 20 13 adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin, dan meningkatkan investasi daerah. Faktor internal yang dimiliki oleh daerah yaitu peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi modal utama untuk menciptakan program dan kegiatan yang inovatif di bidang ekonomi maupun pendukung kegiatan ekonomi.

Demikian juga dengan faktor eksternal, yaitu semakin membaiknya kondisi ekonomi nasional serta perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang terus meningkat. Dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal,

perekonomian Kabupaten Sidoarjo saat ini sedang menuju perkembangan yang sangat membanggakan. Hal ini dapat dilihat dari indikator makro ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang dicapai pada akhir tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2013, sebagai berikut :

- 1) Pendapatan regional (PDRB) pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp64.475.515,18, mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp73.933.189,67.
- 2) Pendapatan perkapita pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,05 %. Jika pada tahun 2011, pendapatan perkapita sebesar Rp12.430.386 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp13.018.910.
- 3) Nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan. Pada tahun 2011 besaran nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo mencapai 3,93%, sedangkan pada tahun 2012 nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 4,23%.
- 4) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi 6,90%, sedangkan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sebesar 7,13%. Hal ini didukung dengan wawancara dengan Petugas di Sekretariat TKPK tanggal 24 September 2014:

“Kita melihat perkembangan harga kebutuhan pokok beras. Setiap tahunnya ada tren naik nggak, kemudian susu, telur, daging. kalo itu semakin naik berarti inflasinya semakin tinggi. Posisi orang yang ada di garis kemiskinan, dia bisa shock kan turun kebawah karena harga kebutuhan pokok naik dan gajinya tetep. Karena kalo dilihat dari struktur konsumsi. Konsumsi orang miskin paling banyak beras, kedua rokok. Jadi dia uangnya habis untuk beli beras dan beli rokok”

Pencapaian kinerja makro ekonomi daerah tersebut diatas, tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan TKPK sebagai tim yang keberadaannya untuk

menangani permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo yang dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian kabupaten Sidoarjo. Dukungan TKPK dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka peningkatan investasi di Sidoarjo, sehingga investasi daerah mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika pada tahun 2012 jumlah investasi Kabupaten Sidoarjo mencapai kurang lebih 15,5 trilyun rupiah, maka pada tahun 2013 (per September) nilai investasi Daerah (NON PMDN) Kabupaten Sidoarjo berjumlah Rp. 7.755.503.280.439, PMA Rp. 377.324.597.196, PMDN Rp. 257.616.067.121 total nilai investasi Kabupaten Sidoarjo Rp. 8.390.443.944.756.

Kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan Invesment Award tiga kali berturut turut pada tahun 2010, 2011, 2012 untuk tahun 2012 diberikan kepada Bupati Sidoarjo oleh Gubernur Jawa Timur pada Januari 2013, penilaian penghargaan invesment awards adalah pada banyaknya jumlah izin yang masuk di Kabupaten Sidoarjo jadi tidak menghitung jumlah uangnya, tetapi yang dinilai adalah kinerja pelayanan perizinanya cepat dan tepat waktu dengan biaya sesuai dengan peraturan.

Dari pelaksanaan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) oleh TKPK dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi Perijinan dan Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Dari aspek penguatan dan perluasan lembaga-lembaga ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi, dapat disampaikan bahwa upaya-upaya penguatan dan perluasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama untuk dikembangkan terutama pada sektor basis, karena sektor ini terbukti cukup signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun pendapatan per kapita masyarakat. Oleh

karena itu jumlah lembaga UMKM dan dana yang digulirkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah UMKM mencapai 169 ribu usaha dan UKM 17 ribu usaha. Hal ini didukung dengan wawancara dengan bapak Ardi Anindita tanggal 24 September 2014

“Kalo menurut saya, untuk program pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, dari hasil laporan SKPD yang melapor kepada kita melihat dari target semuanya sudah berjalan 100 persen”

Selain itu masih ada sekitar 85 sentra-sentra industri, ditambah 11 kampung-kampung usaha, baik jajanan, batik, bebek maupun kampung krupuk, kampung pot, kampung jamur, dll. Dari segi pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Sidoarjo yang terus mengalami peningkatan yang cukup tajam, hingga menghasilkan berbagai penghargaan. Hasilnya mengangkat martabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2013, telah dicanangkannya Kota UKM, yakni ‘Sidoarjo Kota UKM Indonesia’. Begitu juga dari segi perindustrian di wilayah Sidoarjo tahun 2012 telah berkembang menjadi 16.473 pengusaha, terdiri dari 14.117 industri kecil dan mikro 1.988 industri menengah dan 368 industri besar.

Dan di bidang Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi bahwa pertumbuhan Koperasi Wanita (Kopwan) juga mengalami peningkatan untuk Kopwan yang mengikuti program dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 535 unit usaha dengan ini koperasi mendapat prestasi Bupati Sidoarjo di tahun 2013 ini telah mendapat penghargaan Bakti Koperasi Tingkat Nasional yang diberikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Syarif Hasan pada tanggal 12 Juli 2013 di Mataram Nusa Tenggara Barat. Hasil monitoring Komisi Persaingan Perdagangan Usaha (KPPU) di bidang usaha mini market di Kabupaten Sidoarjo mendapat atensi yang baik dari hasil

evaluasi, sudah 80% mini market di Sidoarjo sudah memiliki perizinan sedangkan perizinan Pemkot Surabaya masih 20% saja.

Pada aspek pemberdayaan kelompok keswadayaan dan bantuan masyarakat, masih menjadi sorotan TKPK Kabupaten Sidoarjo karena kemiskinan memerlukan perlakuan khusus antara lain dengan memberdayakan masyarakat. Salah satunya yaitu melalui pendampingan program-program Pemerintah Pusat (seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan ada di 3 kecamatan Wonoayu, Tarik, Jabon mendapat bantuan sebesar 5 milyar, dengan perincian Jabon 2 milyar, Wonoayu dan Tarik masing masing 1,5 M.

Secara keseluruhan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Kabupaten Sidoarjo, di kawasan perkotaan ada 15 kecamatan dan perdesaan di 3 kecamatan, adapun kegiatan berupa program pavingisasi, drainase, perbaikan “plengsengan” dan pos kesehatan desa serta simpan pinjam dana bergulir. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin untuk tahun 2013 direncanakan sebanyak 300 rumah dan telah direhab sebanyak 100 rumah yang berasal dari dana APBD dan 100 rumah lagi dari dana CSR Bank Jatim Sidoarjo setiap rumah mendapat bantuan 5 juta rupiah sehingga total nantinya menjadi 200 rumah yang telah direhab.

### C. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah, adalah melalui pembangunan infrastruktur wilayah. Peningkatan infrastruktur merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan dalam rangka mempertahankan bahkan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif. Adapun Pembangunan

Jalan aspal baru terbangun sepanjang 95,30 Km, perbaikan /pemeliharaan jalan aspal sepanjang 351,24 km Selain itu, juga menyelesaikan perbaikan jalan yang rusak di tahun 2013 sekitar 85,47 kilometer dari panjang jalan beraspal 942,38 kilometer. Target lain, yakni melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Barat (JLB), memperlebar Jalan Lingkar Timur (JLT), dan Frontage Road Buduran-Waru. Dengan harapan bisa segera direalisasikan. Karena akan memacu pergerakan perekonomian masyarakat Sidoarjo.

Untuk jembatan di bangun sebanyak 6 buah, serta jembatan yang terehabilitasi / terpelihara sebanyak 35 buah. 6 jembatan sebagai prioritas yakni jembatan Gisik Cemandi, jembatan Sepanjang lama, jembatan Bakung Pringgodani, jembatan Kedungcangkring, jembatan JLB, serta jembatan di Mlirip, Kecamatan Tarik. Jembatan Gisik Cemandi, sebagai akses masyarakat mengangkut hasil tambak.

Bidang transportasi Kabupaten Sidoarjo tidak hanya diupayakan melalui pembangunan fisik tetapi juga dengan pengembangan budaya berlalu lintas dan pengelolaan lalu lintas. Pemerintah kabupaten memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya pengembangan di bidang lalu lintas dengan diterimanya penghargaan berupa Piala Wahana Tata Nugraha kategori Lalu Lintas Kota Sedang Tahun 2013 yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2013 oleh Menteri Perhubungan RI.

#### D. Bidang Sosial Budaya

Dalam Bidang sosial budaya, pelaksanaannya lebih kepada bidang pendidikan, kebijakan diarahkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu mutu, relevansi dan pemerataan. Peningkatan kompetensi guru dan kurikulum yang berorientasi pada budaya dan karakter bangsa ,manajemen dan tata kelola layanan prima menjadi fokus

program pada tahun 2013. Kinerja pendidikan yang telah dicapai pada tahun 2012 adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 103,69 %, SMP 96,41%, dan SMA 84,86%; Angka Putus Sekolah (APS), SD 0,02%, SMP 0,14%, dan SMA 0,21%.

Untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) telah dibangun pusat pelayanan berkebutuhan khusus (resources center) yang khusus menangani penyandang tuna rungu dan tuna wicara, dan juga autis center ini sebagai tindak lanjut kerjasama Provinsi Jawa Timur dengan Australia Barat Kabupaten Sidoarjo ditunjuk sebagai *pilot project*. Untuk pembangunan gedung Autis Center Sidoarjo akan dibangun pada tahun depan.

Di bidang kesehatan, program difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana kondisi Puskesmas dan Pustu yang kurang memadai, maka mulai tahun 2012 dan 2013, dilakukan pembenahan fisik dan pemenuhan sarana prasarana. Pada tahun 2012, dilakukan rehabilitasi 12 Puskesmas dan 7 Puskesmas Pembantu. Sedangkan pada tahun 2013, dilakukan rehabilitasi 22 Puskesmas dan 26 Puskesmas Pembantu.

Kebijakan penguatan Puskesmas dan Pustu ini dibidang kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga dilakukan penekanan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Pada tahun 2012 Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 29 ibu atau 96,27 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2013 (data sampai dengan September 2013 ) 19 ibu atau 71,75 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2012 ada 313 bayi atau sebesar 10,39 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan sampai dengan Bulan September 2013 tercatat sebesar

256 bayi atau 9,67 per 1000 kelahiran hidup. Kelahiran hidup Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 berjumlah 26.482 bayi.

Angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari jumlah prosentasenya. Data kemiskinan yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik) Sidoarjo tahun 2008 jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa dan angka kemiskinan mencapai 9,4%. Sekarang tahun 2013 jumlah penduduk Sidoarjo mencapai 2.084.280 jiwa dan angka kemiskinan prosentasenya menurun tinggal 6,97% namun dari segi jumlah jiwa meningkat, peningkatannya bukan dari angka kelahiran tetapi dari pertumbuhan urbanisasi yang mencapai 8% sementara angka kelahiran hanya 0,01% . Angka tersebut di bawah rata rata kemiskinan nasional yang sebesar 12,6% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 13,2%.

**5) Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)**

Salah satu fungsi TKPK sesuai dengan Permendagri No 42 Tahun 2010 yaitu dalam pelaksanaannya, TKPKD diharapkan mampu membuat laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (Pasal 25 Permendagri No. 42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

Dalam hal ini peneliti menyampaikan hasil rapat koordinasi TKPK Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2014 yaitu:

### a) Analisa Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar (November 2014)

Secara umum ruang lingkup kegiatan Penyusunan Analisa Kemiskinan Bidang infrastruktur dasar adalah menyusun dokumen dalam bentuk laporan yang berisikan informasi capaian pada setiap indikator penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur dasar, dan pemetaan wilayah yang menjadi prioritas penanganan (mapping) berdasarkan data PPLS 2011. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari laporan TKPK bersama BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo atas Analisa kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar yang Dilaksanakan Pada November 2014 adalah sebagai berikut :

#### 1. Sumber Air Bersih

Kecamatan Tarik memiliki RTS terbanyak dalam memenuhi kebutuhan air minumnya masih menggunakan sumber yang tidak terlindungi. Fenomena yang cukup menarik terlihat di Kecamatan Krian, meskipun dari segi jumlah RTS merupakan yang terbesar, tetapi dalam memenuhi kebutuhan minumnya ternyata sudah cukup baik. Hal ini terlihat RTS di Kecamatan Krian merupakan yang terbesar dalam penggunaan air ledeng dan sumber yang terlindungi sebagai sumber air minum.

Masih terdapat RTS di Kabupaten Sidoarjo yang memanfaatkan sumber air tidak terlindungi untuk kebutuhan air minum. Kecamatan yang menjadi prioritas pertama untuk diintervensi program akses air minum bersih adalah Kecamatan Tarik, Kecamatan Balongbendo, dan Kecamatan Krian. Program yang akan diintervensikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus difokuskan terhadap ketiga Kecamatan

tersebut. Adapun Kecamatan yang masuk prioritas kedua yaitu Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sukodono, dan Kecamatan Gedangan.

## 2. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Banyak RTS di Kabupaten Sidoarjo yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar yaitu mencapai 38.681 rumah tangga atau sekitar 38,88%. Sedangkan RTS yang sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri sebesar 37,80% atau 37.602 rumah tangga, sisanya sebesar 23,32% atau 23.204 rumah tangga masih menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama atau fasilitas umum

Terdapat tiga Kecamatan dengan jumlah RTS yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar terbanyak yaitu Kecamatan Tarik (4.629 RTS), Kecamatan Prambon (4.618 RTS), dan Kecamatan Krembung (4.429 RTS). Kondisi yang demikian perlu mendapat perhatian serius, sebab fasilitas tempat buang air besar terkait dengan sanitasi yang berhubungan langsung dengan kesehatan suatu masyarakat

## 3. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Masih banyak RTS di Kabupaten Sidoarjo yang tidak menggunakan tangki/SPAL sebagai tempat akhir pembuangan tinja yaitu sebesar 57.770 rumah tangga atau sekitar 58,06%. Sisanya sebesar 41.722 rumah tangga atau sekitar 41,94% menggunakan media lain sebagai tempat akhir pembuangan tinja. Tempat pembuangan akhir tinja ini sangat berpengaruh terhadap kerentanan masyarakat miskin terhadap penyakit yang timbul akibat sanitasi lingkungan yang kurang baik. Terdapat tiga Kecamatan dengan jumlah RTS terbanyak yang menggunakan media lain sebagai tempat pembuangan akhir tinja

yaitu Kecamatan Tarik, Kecamatan Krian, dan Kecamatan Balongbendo. Fenomena cukup menarik

terjadi di Kecamatan Krian, di satu sisi jumlah RTS yang masih menggunakan media lain sebagai tempat akhir pembuangan tinja merupakan terbanyak kedua di Kabupaten Sidoarjo, tetapi di sisi lain RTS yang sudah menggunakan tangki/SPAL juga terbanyak kedua;

#### 4. Sumber Penerangan

Mayoritas RTS di Kabupaten Sidoarjo sudah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangannya yaitu sebanyak 96.885 RTS atau sekitar 97,39%. Sisanya sebesar 2,08% atau 2.073 RTS menggunakan listrik non PLN, dan hanya 0,54% atau 534 RTS saja yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangannya; Jumlah RTS yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan paling banyak berada di Kecamatan Jabon yaitu sebesar 113 rumah tangga;

Sebagaimana di atas maka beberapa hal yang dapat disarankan guna peningkatan penanganan kemiskinan bidang infrastruktur dasar di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Program percepatan penanganan kemiskinan, khususnya infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sejalan dengan strategi penanggulangan kemiskinan yang diterapkan yaitu terkait pemenuhan kebutuhan hak dasar. Dalam hal ini salah satunya adalah kebutuhan akan infrastruktur dasar;

2. Agar program yang diintervensikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih tepat sasaran dan efisien, maka perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam dan komprehensif terkait masih terdapatnya RTS yang belum terpenuhi kebutuhan infrastruktur dasarnya. Hal ini terkait dengan masih adanya RTS yang menggunakan sumber tidak terlindungi untuk kebutuhan minum, masih kurang baiknya sanitasi lingkungan, dan masih ada RTS yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan;
3. Kiranya diperlukan juga pemilahan program/kegiatan berdasarkan sasaran jenis infrastruktur dasar yang menjadi fokus intervensi. Dengan demikian capaian kinerja setiap program/kegiatan beserta anggaran yang menyertainya dalam menanggulangi kemiskinan di bidang infrastruktur dasar dapat terukur;
4. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui TKPKD Kabupaten Sidoarjo terus mengawal pelaksanaan program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) yang pelaksanaannya sampai dengan tahun 2015. Harapannya dengan pengawalan yang intens, manfaat dari program ini dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat;
5. Forum CSR yang sudah ada di Kabupaten Sidoarjo hendaknya dapat dimaksimalkan fungsi dan perannya dalam mengatasi kemiskinan di bidang infrastruktur dasar. Apabila hal ini dapat diwujudkan maka pengatasan kemiskinan di bidang infrastruktur dapat lebih cepat tercapai
6. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan terobosan-terobosan yang inovatif dengan tetap mengacu pada koridor aturan dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

7. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif guna mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan terutama di bidang infrastruktur dasar.

**b) Analisa Pelaksanaan PKH 2014 (November 2014)**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil laporan Analisa Pelaksanaan PKH 2014 oleh TKPK dan BAPPEDA yaitu:

1. Jika pada tahun 2011, rata-rata persentase RTSM non eligible di Kabupaten Sidoarjo baru 5,18%, maka pada tahun 2012 meningkat menjadi 12,33%, setahun kemudian meningkat lagi menjadi 17,83% dan pada tahun 2014 sudah mencapai 29,84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKH sudah menunjukkan hasil yang signifikan.

RTSM yang sudah keluar dari PKH sejatinya masih termasuk dalam kategori miskin, oleh sebab itu ketika RTSM tersebut sudah berhasil naik level seharusnya segera disambut dengan program-program kemiskinan yang lain. Harapannya mereka tidak akan tar-degradasi lagi ke dalam Klaster I. Meskipun hal tersebut menjadi semacam kewajiban, akan tetapi sampai dengan saat ini mekanisme tersebut masih belum berjalan secara efektif. Akibatnya banyak RTSM yang telah berhasil keluar dari PKH, terpaksa harus kembali turun kelas karena tidak terjangkau oleh program-program kemiskinan yang lain.

Pada tahun 2014, pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidoarjo setidaknya telah menjangkau 272 Desa/Kelurahan di 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, Desa/Kelurahan yang paling banyak dijangkau PKH adalah Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Taman yaitu masing-masing 24 Desa/Kelurahan. Terdapat tiga

Kecamatan yang Desa/Kelurahan di daerahnya paling sedikit terjangkau PKH yaitu Kecamatan Jabon, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Buduran. Pada ketiga Kecamatan tersebut jumlah Desa/Kelurahan yang sudah terjangkau PKH masing-masing sebanyak 15 Desa/Kelurahan. Dari sisi jumlah awal RTSM PKH, Kecamatan Krembung tercatat memiliki jumlah awal RTSM PKH paling banyak yaitu 1.028 rumah tangga. Adapun Kecamatan Sukodono tercatat memiliki jumlah awal RTSM PKH paling sedikit yaitu 504 rumah tangga saja. Meskipun demikian ternyata banyaknya jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau PKH tidak selamanya berbanding lurus dengan jumlah awal RTSM PKH.

2. Berdasarkan jumlah RTSM PKH yang eligible pada pencairan bantuan PKH setiap tahap, maka paling besar berada di Kecamatan Tulangan. Rincian RTSM PKH yang eligible di Kecamatan Tulangan adalah sebesar 91,25% pada Tahap I; 91,13% pada Tahap II dan Tahap III. Sedangkan Kecamatan Sukodono memiliki jumlah RTSM PKH eligible paling sedikit, yaitu sebesar 61,11% pada Tahap I, turun lagi menjadi 60,91% pada Tahap II, dan kembali turun pada Tahap III menjadi 60,52%. Kondisi ini sedikit memberikan gambaran bahwa kondisi RTSM pada Klaster I yang memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat dari PKH paling banyak berada di Kecamatan Tulangan.

Terkait dengan jumlah realisasi bantuan, maka terlihat bahwa jumlah realisasi bantuan PKH Tahap I dan III paling besar berada di Kecamatan Jabon, sedangkan untuk Tahap II paling besar di Kecamatan Krembung. Adapun Kecamatan Prambon merupakan wilayah dengan jumlah realiasi bantuan PKH paling kecil pada setiap

tahapnya. Dengan demikian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara besaran RTSM PKH yang eligible dengan jumlah realisasi bantuan.

3. Memperhatikan manfaatnya dalam pengatasan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mengadopsi program ini menjadi kebijakan daerah tentunya dengan melakukan beberapa penyesuaian. Setidaknya terdapat dua hal penting yang perlu disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo. Pertama, terkait dengan validasi data penduduk miskin yang akan memperoleh manfaat dari program ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa data kemiskinan PPLS 2008 dan PPLS 2011 masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu dilakukan validasi sebagaimana telah dilakukan TKPKD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2012. Harapannya pelaksanaan program ini akan lebih tepat sasaran dan mempercepat pengatasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Kedua, terkait dengan komplementaritas program pengatasan kemiskinan. Apabila Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengadopsi program ini sebagai salah satu strategi pengatasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu penekanan masalah komplementaritas program-program yang sudah ada. Berdasarkan pengalaman, hal ini sulit diwujudkan karena berkaitan dengan permasalahan data.

### **c) Analisa PNPM MP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 (November 2014)**

Adapun kesimpulan dari laporan Analisa PNPM MP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri khususnya pedesaan dan Perkotaan ini diintegrasikan dengan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbangdes). Agenda pengintegrasian program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan dengan Perencanaan Desa.

Di tahun 2013, ada perubahan strategi yang secara masif diterapkan fasilitator, yang pertama dengan mengenalkan konsep integrasi di forum Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP). Sedangkan yang kedua melalui pelaksanaan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) yang menerapkan integrasi waktu dan integrasi nilai dengan MusrenbangDes di sebagian Desa dampingan. Kegiatan perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2014 telah mengimplementasikan strategi integrasi yang bersinergi dengan sistem perencanaan pembangunan reguler daerah;

2. Membahas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan tentunya harus difokuskan pada tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo, seluruh masyarakat

sudah di undang untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo menjadi penting karena apa yang akan dibangun khususnya kegiatan lingkungan dari PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan mengangkut kepentingan masyarakat. Pada tahap perencanaan, pihak PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten

Sidoarjo selaku fasilitator melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa perwakilan dari pihak masyarakat dan biasanya yang hadir dalam FGD ini ialah para tokoh masyarakat. Selain pihak PNPM dan perwakilan masyarakat, FGD ini juga dihadiri pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), serta pihak kelurahan. FGD ini dilakukan untuk merumuskan kebutuhan masyarakat secara bersama-sama serta menentukan apakah program ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. FGD ini dilakukan untuk menentukan lokasi mana saja yang layak menerima bantuan dana dari program ini. Rapat yang dilakukan bersama masyarakat dilaksanakan di masing-masing lingkungan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam rapat tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program selaku penerima program tergolong sedang. Hal ini dikarenakan masyarakat penerima program hanya memberikan sedikit masukan ketika proses FGD sedang dilaksanakan.

Pada umumnya lebih dari separuh peserta yang hadir tidak berpartisipasi dan berkontribusi pada perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga tidak selalu hadir dalam rapat perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak PNPM. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa di dalam proses perencanaan penentuan program, semua masyarakat yang diundang hadir untuk mengikuti rapat. Menurut informan, di dalam suatu Desa/Kelurahan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan untuk pembangunan. Akan tetapi tentu saja tidak semua kebutuhan akan pembangunan akan dapat langsung terpenuhi, semuanya membutuhkan proses. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

dalam proses perencanaan masyarakat sudah cukup baik dalam memberikan ide-ide guna kemajuan pembangunan.

3. Membahas juga mengenai hasil penelitian yang dihimpun oleh sekretariat TKPK bersama dengan BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa masyarakat sudah turut serta dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat sudah berpartisipasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan. Pihak PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan selaku penanggung jawab keseluruhan program memberikan akses kepada masyarakat untuk menentukan kegiatan yang dirasakan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat bisa berupa tenaga kerja, bahan ataupun pemberian makanan kepada para pekerja. Menurut informan, partisipasi masyarakat pada tahap persiapan dan perencanaan teknis sudah cukup baik, masyarakat yang diwakili oleh KSM, selalu berusaha mempersiapkan semua persyaratan agar supaya proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan. Akan tetapi ada informan yang berpendapat bahwa terkadang ada sebagian masyarakat yang sangat sulit untuk diajak bekerja sama, walaupun sebenarnya kegiatan yang akan dibangun bermanfaat langsung kepada mereka. Informan lainnya berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan belum maksimal, hal ini dikarenakan umumnya apa yang menjadi kesepakatan 30% partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan hanyalah di atas kertas, akan tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Hal ini terlihat dari umumnya para pekerja walaupun untuk membangun lingkungannya sendiri mereka harus meminta upah,

padahal sebenarnya mereka dapat memberikan sumbangan tenaga agar nantinya kegiatan lingkungan yang sementara dilaksanakan dapat lebih baik kualitasnya. Pada tahap pelaksanaan terlihat sekali partisipasi masyarakat terutama pada kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama melalui gotong royong.

4. Dari 49 kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo, tercatat kegiatan yang realisasinya sudah mencapai 75% pendamping ternyata capaiannya masih belum mencapai 75%. Tercatat sebanyak 65,31% atau 32 kegiatan yang dilakukan pendamping realisasinya masih di bawah 75%. Dari jumlah tersebut jika diperinci lebih jauh, maka sebanyak 21 kegiatan (42,68%) berstatus sudah dilaksanakan dan 11 kegiatan (22,45%) berstatus dalam proses dan belum dilaksanakan. Gambaran ini sedikit banyak mengindikasikan bahwa kinerja pendamping masih belum maksimal. Terlihat bahwa kegiatan-kegiatan yang realisasinya masih belum mencapai 75%, pada umumnya statusnya sudah selesai dan melebihi jadwal pelaksanaan.

#### **4.2.2. Hambatan Kinerja TKPK Kabupaten Sidoarjo Dalam Penanggulangan Kemiskinan**

Dalam pelaksanaan kinerja TKPK Kabupaten Sidoarjo ada hambatan yang mempengaruhi dalam prosesnya, factor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

##### **Faktor Penghambat**

Dalam melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Sidoarjo sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Banyaknya program-program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan oleh Pemerintahan Pusat yang menuntut adanya *cost sharing* kepada Pemerintahan Daerah, Sementara APBD nilainya terbatas
2. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan TKPKD itu sendiri. Dalam arti, peran dan fungsi masing-masing pokja belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan sisi personal yang melekat pada satuan kerja atau organisasi harus berkonsentrasi pada 2 (dua) bahkan lebih terhadap fungsi yang lain.
3. Masing-masing SKPD atau perangkat daerah masih belum memahami secara jelas makna pelaksanaan penanggulangan kemiskinan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dari aspek monitoring dan evaluasi program/kegiatan.
4. Masih lemahnya sinkronisasi dan sinergitas dalam penyediaan data baik itu data capaian indikator-indikator kemiskinan yang bersumber dari badan pusat Statistik (BPS) maupun data dari SKPD. Karena terkadang dari sisi masyarakat sendiri jika mengetahui akan mendapatkan bantuan, masyarakat lebih suka mengaku bahwa dirinya miskin. Seperti pernyataan dari Sekretariat TKPK:  

“Awalnya masyarakat tidak suka jika didata miskin. Tapi ketika ada bantuan, biasanya mereka yang tidak terdata malah protes ‘kok saya nggak masuk’ begitu. Jadi pada dasarnya masyarakat lebih suka minta, terutama yang terdata masyarakat miskin sasaran. Belum adanya kesadaran masyarakat dalam artian masyarakat ini yang sudah masyarakat menengah”
5. Faktor mutasi pegawai juga turut mempengaruhi dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena pegawai yang sudah memiliki capability dalam bidang penanggulangan kemiskinan di mutasi karena alasan penyegaran organisasi dan sebagainya, sehingga pegawai yang baru harus memulai pemahaman bidang tersebut dari titik nol lagi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ardi Anindita

“Adapun factor penghambat dari Sumber Daya Manusia. Dalam artian dari sisi kuantitas (jumlah personil) didalam organisasi ini. Ada saran TKPK ini muncul sebagai skpd sendiri. Jadi bukan lagi sebagai tim tapi sebagai dinas. Kemudian sering mutasi pegawai. Jadi sangat berpengaruh di kinerja TKPK. Selanjutnya penghambat ada pada anggaran. TKPK perlu dukungan anggaran untuk operasionalisasi kegiatan tkpk. Dan selain itu, belum adanya keterpaduan program. Jadi, karena banyaknya program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, provinsi & Kabupaten Sidoarjo sendiri yang membuat tumpang tindih sasaran.” (Hasil wawancara tanggal 4 September 2014)

### **C. Analisis Data**

#### **4.3.1. Peran TKPK Kabupaten Sidoarjo Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan**

##### **1) TKPK Menentukan Rumah Tangga Sasaran**

Menurut Keban (2004:17) menuliskan bahwa secara khusus kegiatan administrasi publik difokuskan kepada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Artinya administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik maupun penyediaan barang-barang publik. Persepsi umum tentang administrasi adalah “The Management Of Public Affairs”. Karena itu, kegiatan ini meliputi semua yang dilakukan oleh para manajer publik.

Sedangkan pendapat Shafritz dan Russel (1997:20) dalam Yeremias (2004:84), manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan

organisasi. Definisi ini tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan tetapi juga sekelompok orang yang bertanggung jawab menjalankan proses tersebut.

Dari kedua hal tersebut sudah jelas bahwa peran TKPK dalam hal ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menentukan Rumah Tangga Sasaran. Dengan begitu maka akan ada kemudahan bagi SKPD teknis dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan di lapangan. Sehingga angka kemiskinan di Sidoarjo dapat terus menurun sesuai dengan target pengurangan angka kemiskinan yang sudah ditentukan.

Pembuatan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilakukan oleh TKPK dimaksudkan untuk memperjelas siapa saja masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang sudah ada. Dalam hal ini, setiap SKPD teknis sudah mempunyai program-program penanggulangan kemiskinan. Contohnya BPMPKB dengan Program Rehab Rumah.

Seperti yang diungkapkan oleh Sarwoto (1978) dalam Juliantara (2005:53) yaitu “organisasi lini dan staff adalah organisasi yang pada umumnya dipergunakan pada organisasi pemerintah. Organisasi ini terdiri dari atas unit-unit lini dan unit-unit staff. Dalam organisasi ini telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lini adalah orang-orang atau unit-unit secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tugas pokok atau tujuan organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan staff disini adalah unit-unit yang tidak secara langsung ikut serta mencapai tujuan organisasi, tetapi hanya memberikan kontribusinya dalam hal-hal yang tidak langsung

dengan menyediakan bantuan dibidang kepegawaian, keuangan, material, dan bantuan lainnya baik untuk kepentingan unit staff sendiri maupun unit lini.”

TKPK termasuk dalam organisasi lini dan staff. Karena dapat dilihat dari proses pengerjaan penentuan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Orang-orang atau unit-unit secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tugas pokok atau tujuan organisasi terutama dalam menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dalam hal ini, TKPK bekerja sama dengan BPS dalam mendapatkan data, selain itu SKPD juga terlibat dalam penyediaan data dimana masyarakat yang harus mendapatkan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Kerjasama TKPK, BPS dan SKPD teknis dalam menentukan Rumah Tangga Sasaran memudahkan Tim ini dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan ditentukannya Rumah tangga Sasaran (RTS) maka program-program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan meminimalisir adanya kesalahan data. Jadi, tidak ada lagi masyarakat yang memang tidak seharusnya menerima bantuan akan mendapatkan bantuan. Dengan begitu angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo diharapkan akan berkurang setiap tahunnya.

Menurut pendapat Arthur G. Bedeian (dalam Handoko 2000:112) manfaat dan tujuan organisasi antara lain adalah sebagai berikut:

- 5) Membantu memberikan arah dalam pembuatan rencana yang efektif dan pelaksana
- 6) Dapat memberikan motivasi pada karyawan dalam melaksanakan aktivitas organisasi

- 7) Membantu mengenalkan eksistensi organisasi pada masyarakat maupun lembaga atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- 8) Membantu pimpinan organisasi dalam mengkoordinasikan bawahannya maupun dalam pembuatan kebijaksanaan organisasi.

Dengan adanya kriteria manfaat dan tujuan organisasi tersebut pembuatan laporan prioritas wilayah dapat membantu SKPD teknis agar bekerja sesuai dengan arah dalam pembuatan rencana prioritas wilayah sehingga pelaksanaannya akan lebih efektif. Selain itu pembuatan laporan prioritas wilayah dapat memberikan motivasi untuk melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. SKPD teknis akan lebih termotivasi karena sudah ada prioritas wilayah dan itu cukup memudahkan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui program-program penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, pembuatan laporan prioritas wilayah akan mempermudah TKPK dalam melakukan pembagian bantuan yang sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan pada masing-masing SKPD. Masing-masing SKPD akan lebih mudah dalam menentukan lokasi mana yang harus ditangani terlebih dahulu, dalam masalah pendidikan, kesehatan, dll.

Menurut James D. Money dalam Sutarto (1981:123) memberikan pengertian koordinasi sebagai:

*“The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common purpose”*

(Pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan bersama)

Dapat dijelaskan bahwa TKPK mengatur sekelompok SKPD yang terlibat agar melaporkan hasil kerjanya, sehingga sekretariat TKPK akan mengetahui wilayah mana yang masih membutuhkan penanganan yang cepat atau diprioritaskan dibanding dengan wilayah yang lainnya. Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Ardi Anindita dalam Sekretariat TKPK Kabupaten Sidoarjo bahwa TKPK bekerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data mengenai kondisi kemiskinan serta adapun data yang dilaporkan oleh SKPD mengenai rumah tangga miskin.

## **2) TKPK Menyusun Anggaran Yang Efektif Untuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan**

Salah satu pendapat mengenai Organisasi adalah Menurut pendapat Makmur (2008:109) yakni:

Organisasi terdiri dari organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah pembentukan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara resmi dengan diikat suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setiap manusia yang terikat dalam persekutuan itu juga secara resmi pengangkatannya dengan ditandai surat keputusan bagi pejabat yang berwenang. Sedangkan organisasi informal adalah suatu bentuk organisasi sebagai pelengkap atau pendukung keberhasilan kegiatan organisasi formal. Pembentukan organisasi informal tidak serumit pembentukan organisasi formal.

Berdasarkan pendapat diatas maka TKPK adalah organisasi resmi yang berkaitan dengan pemerintah. Karena pembentukannya bersal dari PERPRES NO. 15 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI NO. 42 Tahun 2010. Selain TKPK merupakan organisasi resmi yang berkaitan dengan pemerintah, TKPK juga merupakan organisasi publik yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada publik tanpa mencari laba untuk kepentingan organisasi ini. Dapat dikatakan demikian juga

terutama dalam hal penyusunan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Karena berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Ardi Anindita di Sekretariat TKPK Kabupaten Sidoarjo, dana untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo oleh TKPK berasal dari APBD Sidoarjo. TKPK mengelola dan membuat susunan anggaran sehingga anggarannya bisa merata sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Pembuatan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan ini juga melihat program-program yang dimiliki oleh SKPD teknis untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga dilihat dari banyaknya rumah tangga miskin yang ada di lapangan yang masuk di setiap program-program tersebut. Hal ini juga didukung dengan pendapat Sedangkan menurut Blake dan Mouton dalam Miftah Thoha (2010:168) yaitu pengertian organisasi dengan mengenalkan tujuh unsur yang melekat pada organisasi. Ketujuh unsur tersebut diantaranya: (1) Organisasi senantiasa mempunyai tujuan, dalam hal ini TKPK mempunyai tujuan yang jelas yang diatur dalam PERMENDAGRI NO.42 Tahun 2010. (2) Organisasi mempunyai kerangka (*structure*), disini TKPK Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai kerangka struktur organisasi yang dari ketua TKPK hingga pelaksana teknis (3) organisasi mempunyai sumber keuangan, seperti yang telah diketahui dalam hal ini TKPK mempunyai sumber keuangan yang jelas yaitu dari APBD (4) Organisasi mempunyai cara yang memberikan kecakapan bagi anggotanya untuk melaksanakan kerja mencapai tujuan tersebut, dapat dilihat pada pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan oleh TKPK dan SKPD teknis (5) didalam organisasi terdapat proses interaksi hubungan kerja antara orang-orang yang bekerja sama mencapai tujuan

tersebut, hal ini dapat dilihat dari hubungan koordinasi antara TKPD dan SKPD teknis dalam melaksanakan program rehab rumah dan pelaksanaan PTBK2 (6) organisasi mempunyai pola kebudayaan sebagai dasar cara hidupnya, (7) organisasi mempunyai hasil-hasil yang ingin dicapainya, TKPK tentu memiliki target untuk hasil-hasil yang ingin dicapai yaitu mempercepat pengurangan angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo.

#### **4) TKPK Melakukan Koordinasi dan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah**

Dalam suatu tim koordinasi, maka suatu pelaksanaan fungsi koordinasi sangat diperlukan untuk mencapai target-target dan pelaksanaan program-program yang telah dibuat. TKPK melaksanakan kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) dalam pelaksanaan program rehab rumah tidak layak huni.

Menurut Leonard D. White (1981:123) koordinasi adalah :

*“Coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the movement and operation of parts in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole”*

(Koordinasi adalah penyesuaian diri dari bagian-bagian satu sama lain, dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan)

Dalam hal ini, salah satu program TKPK adalah Rehab Rumah Tidak Layak Huni. TKPK berkoordinasi dengan BPMPKB dan P3M. BPMPKB selaku SKPD teknis dalam menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pelaksanaan Rehab umah Tidak Layak Huni ini, masyarakat pun dapat berperan serta dalam menuju keberhasilan program ini. Dengan cara mengisi formulir di website P3M. Formulir tersebut membantu TKPK dalam melakukan koordinasi dengan BPMPKB mengenai informasi tentang rehab rumah. Jadi, BPMPKB dan TKPK dapat menentukan rumah yang menjadi sasaran program Rehab Rumah Tidak Layak Huni.

Sedangkan dalam pelaksanaan PTBK2, TKPK berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) merupakan program pembangunan secara terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015.

Jadi, TKPK bersama dengan SKPD teknis keduanya sama-sama memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan. Adanya kerjasama yang baik dari tiap-tiap bagian sehingga penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo melalui Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni dapat berjalan dengan tepat sasaran.

#### **5) Menyampaikan Laporan Hasil Rapat Koordinasi TKPKD, Paling Sedikit 3 Kali Dalam Satu Tahun**

Suatu organisasi terutama organisasi publik, pasti memiliki kinerja berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun kinerja yang baik menurut Kusnadi (2003:267) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Rasional. Kinerja yang baik seharusnya diterima oleh akal sehat. Tidak ada kinerja yang baik yang tidak rasional.

- b. Konsisten. Kinerja yang baik seharusnya sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi dan departemen dan tujuan organisasi.
- c. Tepat. Kinerja yang baik harus dapat dinyatakan secara teoat dan jelas serta tidak menimbulkan kemenduan penafsiran.
- d. Efisiensi. Kinerja yang baik sedapat mungkin melalui pengorbanan dana yang minim dengan hasil yang memuaskan.
- e. Tertantang. Kinerja yang baik seharusnya memberikan tantangan yang tinggi bagi pelakunya dan diupayakan menjadi motivator yang efektif.
- f. Terarah. Kinerja yang baik seharusnya terarah kepada suatu tujuan tertentu, dapat melalui garis komando atau lepas
- g. Disiplin. Kinerja yang baik seharusnya dikerjakan melalui disiplin yang tinggi.
- h. Sistematis. Kinerja sebaiknya dilakukan secara sistematis dan tidak acak
- i. Dapat dicapai. Kinerja yang baik sebaiknya diarahkan dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan.
- j. Disepakati. Kinerja yang baik seharusnya disepakati oleh semua pihak yang terkait, baik dari pimpinan puncak sampai kepada pelaksana terendah.
- k. Terkait dengan waktu. Kinerja yang baik seharusnya dikaitkan dengan waktu yang telah terukur
- l. Berorientasi kepada kerjasama kelompok. Kinerja yang baik seharusnya diarahkan kepada kerjasama kelompok. Kinerja kelompok umumnya lebih efektif dan efisien daripada kinerja individu.

Kinerja TKPK jika dilihat dari pendapat diatas, diantaranya:

1) Rasional

TKPK mempunyai suatu kejelasan mengenai penempatan jabatan anggota, tugas, fungsi, dan wewenang setiap anggota TKPK dan SKPD yang terkait.

2) Konsisten

Adanya pembagian tugas, fungsi, dan wewenang setiap anggota TKPK dan SKPD yang terkait secara rinci sehingga dengan adanya pembagian tugas serta fungsi tersebut kinerja TKPK dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo akan dapat terlaksana dengan baik

3) Tepat

Kinerja TKPK dapat dilihat pada peran dan kesekretariatan, dimana peran dari bagain kesekretariatan yakni sebagai penyusun program kebijakan, tata letak, tata usaha, hubungan masyarakat dan kearsipan yang kemudian hal itu dilaksanakan sebagaimana disesuaikan dengan bidangnya masing-masing.

4) Efisiensi

Kinerja TKPK terlaksana dengan adanya penetapan biaya seluruh kegiatan dan program-program yang dilaksanakan oleh TKPK kabupaten Sidoarjo. Selain itu, didukung dengan adanya capaian dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ardi Anindita dalam wawancaranya.

5) Tertantang

TKPK dibentuk dan difokuskan pada percepatan pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga keberadaannya benar-benar di fokuskan pada

pembuatan program-program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan agar angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menurun setiap tahunnya.

6) Terarah

Sesuai dengan manajemen kinerja TKPK Kabupaten Sidoarjo, dalam melaksanakan kinerjanya telah sesuai dengan agenda kegiatan TKPK yang telah ditetapkan.

7) Disiplin

Anggota TKPK melaksanakan tugasnya sesuai dengan agenda kegiatan yang telah disepakati. Sekretariat TKPK Kabupaten Sidoarjo menyediakan informasi untuk penelitian yang berkaitan dengan TKPK Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan jam kerja operasional pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at pukul 08.00 – 16.00 WIB

8) Sistematis

Terdapat susunan rangkaian biaya dalam pelaksanaan koordinasi dari sekretariat TKPK dengan SKPD terkait.

9) Dapat Dicapai

Selain penurunan angka kemiskinan, TKPK bekerjasama dengan Dinas Koperasi, perijinan, dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pengembangan UMKM. Selain itu, TKPK juga melaksanakan kerjasama dengan BPMPKB Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan Rehab Rumah Tidak Layak Huni.

10) Disepakati

Kesepakatan TKPK dengan BPS perlu dilakukan kesepakatan ulang karena selama ini TKPD terkadang masih menemui kesulitan dalam menentukan data. Dan ini menjadi hambatan TKPK dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

11) Terkait dengan waktu

Terkait dengan waktu, TKPK Kabupaten Sidoarjo dapat menurunkan angka kemiskinan di Sidoarjo setiap tahunnya. Tetapi tidak ditentukan deadline waktu yang secara konkret. Hanya saja, setiap tahunnya TKPK membuat suatu Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk dokumen

12) Berorientasi kepada kerjasama kelompok

Dalam suatu tim koordinasi, maka suatu pelaksanaan fungsi koordinasi sangan dikedepankan untuk mencapai target-target dan pelaksanaan program-program yang telah dibuat. TKPK melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta semua SKPD teknis.

**6) Hambatan Kinerja TKPK Kabupaten Sidoarjo Dalam Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan**

TKPK Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menghambat proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Beberapa pendapat para ahli tentang asas-asas organisasi diungkapkan Mohyi, (1999:61-63) diantaranya:

1. Fayol, mengungkapkan 5 asas-asas manajemen yang dikatakan sama dengan asas-asas organisasi yaitu salah satunya adalah pembagian kerja (division of work) dan kesatuan jiwa korp (esprit de corp). Menurut pendapat Fayol dalam Mohyi (1999:61-63) diatas, TKPK belummenuhi asas pembagian keerja yang baik dikarenakan masih lemahnya kapasitas kelembagaan TKPKD itu sendiri. Dalam arti, peran dan fungsi masing-masing pokja belum berjalan secara maksimal, hal tersebut

dikarenakan sisi personal yang melekat pada satuan kerja atau organisasi harus berkonsentrasi pada 2 (dua) bahkan lebih terhadap fungsi yang lain. Selain itu masing-masing SKPD atau perangkat daerah masih belum memahami secara jelas makna pelaksanaan penanggulangan kemiskinan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dari aspek monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

Dan belum adanya kesatuan jiwa dikarenakan faktor mutasi pegawai juga turut mempengaruhi dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut terjadi karena pegawai yang sudah memiliki capability dalam bidang penanggulangan kemiskinan di mutasi karena alasan penyegaran organisasi dan sebagainya, sehingga pegawai yang baru harus memulai pemahaman bidang tersebut dari titik nol lagi. Hal ini akan menghambat kesatuan jiwa setiap individu didalam suatu organisasi. Dikarenakan lingkungan baru akan menuntut suatu individu akan memulai lagi adaptasi dengan orang-orang baru. Mulai dari adaptasi bekerja sama sampai dengan adaptasi dengan tugas yang fokus pekerjaannya berbeda dari yang sebelumnya.

Sedangkan Herbert Simon dalam Pasolong (2011:14) membagi prinsip administrasi yang lebih umum yaitu efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas dikalangan kelompok. TKPK Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan efisiensi menurut Herbert dan Simon daam Pasolong (2011:14) masing-masing spesialisasi tugas dikalangan kelompok sudah dibentuk sesuai dengan bagan anggota TKPK menurut PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2010. Hanya saja, masih terdapat adanya ketimpangan tugas karena masih lemahnya kapasitas kelembagaan TKPKD itu sendiri. Dan peran dan fungsi masing-masing pokja belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dikarenakan sisi personal yang melekat pada

satuan kerja atau organisasi harus berkonsentrasi pada 2 (dua) bahkan lebih terhadap fungsi yang lain. Hal ini juga kurang sesuai dengan efisiensi administrasi menurut Herbert dan Simon pada pernyataan nomer dua yaitu “Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hierarki yang pasti”. Selanjutnya efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, tempat. Dalam hal ini Masing-masing SKPD atau perangkat daerah masih belum memahami secara jelas makna pelaksanaan penanggulangan kemiskinan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dari aspek monitoring dan evaluasi program/kegiatan.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Dari analisis terhadap terhadap temuan di lapangan pada penelitian ini, maka beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu organisasi yang bergerak pada bidang percepatan pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Organisasi ini melaksanakan kinerjanya berdasarkan beberapa indikator kemiskinan yaitu salah satunya adalah banyaknya rumah yang tidak layak huni.
2. Dengan adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sidoarjo ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
3. Dengan adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) ini telah membawa perubahan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sidoarjo, perubahan tersebut diantaranya:
  - a. Perubahan di bidang fisik

Adanya perubahan keadaan rumah masyarakat miskin penerima bantuan dari kerjasama antara TKPK dengan SKPD yang terkait yaitu BPMPKB berupa program bantuan rumah tidak layak huni. Perubahan keadaan rumah masyarakat miskin yang

sebelumnya dinyatakan tidak layak huni karena dinding belum beruba tembok, lantai masih berupa tanah, serta keadaan atap yang tidak cukup untuk melindungi dari panas maupun hujan menjadi rumah yang sehat dan memenuhi standart rumah layak huni.

b. Perubahan di bidang ekonomi

Perubahan di bidang ekonomi ini dapat ditunjukkan dengan:

- 1) Pendapatan regional (PDRB) pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp64.475.515,18, mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp73.933.189,67.
- 2) Pendapatan perkapita pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,05 %. Jika pada tahun 2011, pendapatan perkapita sebesar Rp12.430.386 sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp13.018.910.
- 3) Nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan. Pada tahun 2011 besaran nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo mencapai 3,93%, sedangkan pada tahun 2012 nilai inflasi Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 4,23%.
- 4) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi 6,90%, sedangkan pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo sebesar 7,13%.

Pencapaian kinerja makro ekonomi daerah tersebut diatas, tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan TKPK sebagai tim yang keberadaannya untuk

menangani permasalahan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo yang dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian kabupaten Sidoarjo. Dukungan TKPK dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka peningkatan investasi di Sidoarjo, sehingga investasi daerah mengalami kenaikan cukup signifikan. Jika pada tahun 2012 jumlah investasi Kabupaten Sidoarjo mencapai kurang lebih 15,5 trilyun rupiah, maka pada tahun 2013 (per September) nilai investasi Daerah (NON PMDN) Kabupaten Sidoarjo berjumlah Rp. 7.755.503.280.439, PMA Rp. 377.324.597.196, PMDN Rp. 257.616.067.121 total nilai investasi Kabupaten Sidoarjo Rp. 8.390.443.944.756.

4. Koordinasi antara TKPK dengan SKPD teknis yaitu BPMPKB selaku SKPD teknis program rehab rumah tidak layak huni yang diangkat sebagai contoh oleh peneliti. Selain itu dalam pelaksanaannya TKPK juga berkoordinasi dengan P3M dalam menghimpun saran dan informasi dari masyarakat mengenai masyarakat sasaran yang membutuhkan bantuan program rehab rumah tidak layak huni.

5. TKPK melaporkan hasil laporannya setahun 3x pada bulan November 2014. Yaitu meliputi

- 1) Analisa bidang infrastruktur dasar
- 2) Analisa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 2014
- 3) Analisa PNPM MP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014

## B. Saran

Dari beberapa kesimpulan dan hasil analisis maka guna mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan yaitu:

1. TKPK perlu memperbaiki ulang proses koordinasi dengan penyedia data untuk menentukan Rumah tangga sasaran (RTS) dan dalam pembuatan prioritas wilayah sebagai sarana untuk membantu SKPD dalam bekerja. Sehingga adanya fokus dan prioritas wilayah mana yang harus didahulukan untuk menerima bantuan. Jika dari pihak penyedia data dan TKPK tidak berkoordinasi dengan baik maka akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan penerimaan bantuan.
2. TKPK Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan koordinasi dengan pendamping maupun fasilitator PTBK2 yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Rehab rumah tidak layak huni (BPMPKB) guna memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan partisipatif. Hal ini dimaksud agar semua informasi dari masyarakat dapat secara tepat ditangkap pada proses pengambilan keputusan di tingkat lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. A., Narbuko C, 2005.. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen SDM Buku 1*. Jakarta: Indeks
- Echols, John. M. dan Shadily, Hassan. 1986. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia
- Esmara, Hendra. 1996. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Habibi, Ahmad. 2012. *Skripsi: Peran Negara Dalam Implementasi Program Pembinaan Narapidana Wanita*. Malang
- Handoko, Hani T. 2000. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: Bpfe
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Ihyaul Ulum. 2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: pembaharuan
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika

Makmur. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (2000), "Introduction: Social Policy and Social Welfare" dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), *The Handbook of Social Policy*, London: Sage, halaman xi-xv

Miles, M.B dan Huberman, A.M., Saldana Jhonny, 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book*. SAGE Publication

Mohyi, ach. 1999. *Teori dan Perilaku Organisasi*. Malang: UMM Press

Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mulyadi. 2001. *Balanced Scorecard Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.

Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Aksara

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Makasar: Alfabeta

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2010

Peraturan Presiden (Perpres) No 15 Tahun 2010

Rivai Veithzal, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : dari Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ruky, Ahmad. 2002. *Manajemen SDM*. Jakarta: Bumi Aksara

Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi: Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung:cv. Mandar maju.

Simajuntak, Payaman J 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta

Singarimbun, Handayani. 1985. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Gunung Agung

Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja Diklat Provinsi Dati 1*. Surabaya

Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan pengentasan Kemiskinan*. Malang: Intimedia

Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Sutarto. 1981. *Dasar-dasar Oragnisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press  
Bulaksumur

Suzetta, Paskah. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin*. Jakarta: SMERU

Terry, G.R., dan Lestie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan Keempatbelas*. Jakarta: Bumi Aksara

Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)* Jakarta: Salemba Empat

Lampiran 1



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 2 Mei 2014

Kepada

Nomor : 070 / 3611 / 203 / 2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Bupati Sidoarjo  
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik  
di  
SIDOARJO

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 April 2013 Nomor : 5132/UN10.3PG/2014 perihal Riset/Survei, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 070/ 3611/203/2014 atas nama Imeyda Agdella Tarore dengan judul proposal "Evaluasi kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sidoarjo sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas Pengurangan Angka Kemiskinan (Studi pada Pelaksanaan "Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik  
JOY SUPRIANTO, S.STP., M.PSDM  
Pembina  
NIP. 19750319.199511.1.002

Tembusan :  
Yth. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);  
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
Brawijaya Malang di Malang.

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
BADAN PEENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Sultan Agung No. 13 Telepon. 031-8961437 Fax. 031 8956819  
Situs : [www.bappeda.sidoarjo.kab.go.id](http://www.bappeda.sidoarjo.kab.go.id), Email : [happedn@sidoarjo.kab.go.id](mailto:happedn@sidoarjo.kab.go.id)  
SIDOARJIC - 61211

Sidoarjo, 16 September 2014

Nomor : 050/ 404 5.3/2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran :-  
Perihal : Pelaksanaan Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sidoarjo

SIDOARJO

Mendasari surat Saudara Nomor 072/467/404.6.4/2014 tanggal 9 Mei 2014 perihal sebagaimana pokok surat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

- Nama : IMEY, DA AGDELIA TARORE
- Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 Mei 1992
- Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- NIM : 10.030101111102
- Alamat : Pondok Sidokare Asri RR-5 Sidoarjo
- Judul Penelitian : "Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan ( IKPK) di Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Peningkatan Efektifitas Penurunan Angka Kemiskinan". Studi Pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Telah melaksanakan penelitian di magang di Bappeda Kabupaten Sidoarjo sesuai jadwal yang diusulkan guna kepentingan yang bersangkutan. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN SIDOARJO  
Sekretaris  
  
Drs. PUGUH PRAMONO, M.Si  
Pembina TV/1  
SIDOARJO 031 8228 158201 1 001

- Tembusan :
- Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
  - 2. Yang Bersangkutan.

### Lampiran 3

#### Pedoman Wawancara:

1. Dalam melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, bagaimana TKPK dalam menentukan Rumah tangga Sasaran?
2. Apakah selama ini TKPK sudah berjalan sesuai rencana kegiatan yang sudah ditentukan?
3. Bagaimana TKPK dalam melaksanakan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan?
4. Bagaimana cara TKPK dapat menumpulkan data tentang kemiskinan di Sidoarjo?
5. Apakah keberadaan TKPK berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di kabupaten Sidoarjo?
6. Bagaimana menurut pendapat bapak terhadap jumlah anggaran sebelum adanya TKPK dan saat terbentuknya TKPK (TKPK sudah ada)?
7. Bagaimana TKPK sehingga dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Sidoarjo, TKPK mendapatkan anggaran dalam melaksanakan program-programnya?
8. Apakah ada kerjasama antara masyarakat dan TKPK dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?

#### Untuk Masyarakat

1. Apakah program rehab rumah adalah program yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana menurut tanggapan saudara atas pelaksanaan program rehab rumah?
3. Adakah saran untuk pelaksanaan program rehab rumah?

Lampiran 4

Foto-Foto Kegiatan TKPK Kabupaten Sidoarjo







Ardi Anindita S.STP

Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

(Anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo - TKPKD).